

Vol. 12 No. 03 (2023)

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial



Nomor : 200/M/KPT/2020



Diterbitkan oleh :
Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
Kementerian Sosial RI

Vol 12, No. 03 (2023)

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Sebuah Jurnal yang menyajikan Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk hasil penelitian bidang kesejahteraan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial. Terbit setahun tiga kali periode April, Agustus, dan Desember. SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mulai terbit Vol 1 No. 1 September - Desember 2011, merupakan kelanjutan dari "Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial" yang terbit pertama kali Vol 1 No. 1 Januari 1995 sampai dengan Vol 16 No. 2 Mei - Agustus 2011. Terhitung mulai edisi Vol 5 No.2 Januari - April 2016 menggunakan Open Journal System (OJS). Penulis yang akan mengajukan naskahnya untuk dimuat di jurnal ini harus melakukan pengiriman naskah melalui Open Journal System (OJS). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 21/E/KPT/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I tahun 2018 ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah **Terakreditasi Peringkat 2** (Volume 6 Nomor 1 tahun 2016 sampai Volume 10 Nomor 1 tahun 2020). Pada Tahun 2020 kembali mengajukan akreditasi dan berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia No. 200/M/KPT/2020 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III tahun 2020 ditetapkan kembali sebagai sebagai Jurnal Ilmiah **Terakreditasi Peringkat 2**. Pada tahun 2022 dilakukan pengalihan pengolahan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial ke Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pada tahun 2023 dilakukan perubahan website dari <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia> ke <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk>

Alamat :

Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI
Radio Dalam, 11, Jl. Margaguna Raya No.1, RT.11/RW.1, Gandaria Sel., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12420
e-mail : sosiokonsepsia@gmail.com
e-journal: <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk>

Editorial Team

Penanggungjawab

Afrizan Tanjung, M.Si, Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Manajer Jurnal

Dr. Toton Witono, ST, MA, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Pimpinan Editor

Agus Wahyudi, S.ST. Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Editor Bagian

Dr. Sri Tjahjo Rini, M.Si. Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Nyi R. Irmayani, SH., M.Si. Scopus ID [57956596800](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57956596800) Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Dr. Ferry Rhendra Pananda Putra Sitorus, A.Ks, M.Si, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Jazak Akbar Hidayat, S.H, MA., Ph.D Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin, Indonesia

Drs. Indro Widi Handoko, M.Si. Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Noor Anggorowati, SIP, MPA, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia.

Siti Rohmanatin Fitriani, S.Th, MA , Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin, Indonesia

Lasarus Jehamat, S.Sos, MA, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Sri Widayanti, S.PdI, MA. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Proofreader

Bina Adi Prakasa. Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta

Layout Editor

Zaenal. Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta

Sekretariat

Baiq Endang Dwi Handayani M.Si. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Jakarta

Anisa Retno Febriyanti. Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Jakarta

Mitra Bebestari

Prof. Adi Fahrudin, Ph.D, Scopus ID: 35261484600, Fakultas Psikologi, Universitas Bhanyangkara Raya, Jakarta, Indonesia.

Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D, Scopus ID: 57210976685, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.

Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, Scopus ID: 25823852000, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.

Prof. Irwanto, Ph.D, Scopus ID: 7409586829, Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, Indonesia.

Agus Fanar Syukri, Ph.D, Scopus ID: 56516912500, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Binahayati Rusyidi, Ph.D, Scopus ID: 55778489900, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Univesitas Padjajaran, Bandung, Indonesia.

Dr. Bambang Rudito, Scopus ID: 36632972600, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung, Indonesia.

Nurhadi, S.Sos. M.Si. Ph.D, Scopus ID: 57209449684, Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Dr. Santoso Tri Raharjo, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Univesitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

Dede Rahmat Hidayat, M.Psi, Ph.D, Scopus ID: 57210163446, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Tauhid Komara Yudha, S.Sos. M.PD, Scopus ID: 57201631933, Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Mu'man Nuryana, M.Sc., Ph.D. Scopus ID: 57223229321, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Dr. Hari Harjanto Setiawan, M.Si Scopus ID: 57225011816 Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Badrus Susantyo, Ph.D. Scopus ID: 57223215291 Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Yanuar Farida Wismayanti, SST., MA., PhD. Scopus ID: 57202466692 Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Habibullah, S.Sos., M.Kesos. Scopus ID: 57732733900 Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Daftar isi

Krisis Keluarga dalam Perkembangan Otonomi Perempuan <i>Drajat Tri Kartono, Argyo Demartoto, Fatwa Nurul Hakim, Chesa Amanda Marsela</i>	98 - 112
Kearifan Lokal dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Saat Kebencanaan: Refleksi Pengalaman Masyarakat Saat Terjadi COVID-19 <i>Suryani, Tyas Eko Raharjo dan Soetji Andari.</i>	113 - 130
Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Seboro Kabupaten Probolinggo di Masa Pandemi <i>Nining Ailiyah, M. Asif Nur Fauzi, Nur Chalimah, Mohammad Affan Wahyudi</i>	131 - 141
Spiritual Resilience: Analisis Faktor Yang Meningkatkan Kesejahteraan Mental Ibu Rumah Tangga di Cirebon <i>Fahmi Idris, Mukhrijal, Saddam Rassanjani, Meli Fauziah, Vera Octavia</i>	142 - 157
Peran Pelopor Perdamaian dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jawa Barat <i>Soni Akhmad Nulhaqim, Wandi Adiansah, Nadila Auludya Rahma Putri, Maulana Irfan</i>	158 - 169
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Objek Wisata dengan Memanfaatkan Modal Sosial <i>Dia Meirina Suri, Moris Adidi Yogia, Cifebrima Suyastri</i>	170 - 180
Perlindungan Pekerja bagi Pekerja Lanjut Usia di Daerah Perdesaan: Analisis Situasi dan Kebijakan di Provinsi DI Yogyakarta <i>Aryan Torrido, Muh. Ullil Abshor, Khatibul Umam</i>	181 - 193

Pengantar Redaksi

Jurnal Sosio Konsepsia adalah forum untuk publikasi, desiminasi dan perdebatan ide-ide dari hasil penelitian kesejahteraan sosial. Jurnal ini bertujuan untuk memajukan pemahaman teori, membentuk kebijakan, dan menginformasikan praktik penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Sosio Konsepsia diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tiga kali dalam setahun yaitu bulan April, Agustus dan Desember. Jurnal Sosio Konsepsia terakreditasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek / BRIN) Peringkat 2 sesuai SK No.200 / M / KPT / 2020 Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020. Pada Volume 12, No. 03, Mei – Agustus 2023 menyoroti tentang permasalahan kesejahteraan sosial baik individu, masyarakat maupun organisasi.

Drajat Tri Kartono, Argyo Demartoto, Fatwa Nurul Hakim, Chesa Amanda Marsela. Permasalahan krisis keluarga menyebabkan adanya perubahan relasi kuasa dalam keluarga yang berpengaruh pada hilangnya kepercayaan perempuan otonom terhadap instansi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman tentang krisis keluarga dan relasi kuasa dalam keluarga yang berdampak terhadap permasalahan kepercayaan atas institusi keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi deskriptif kuantitatif dengan analisis korelasi *product moment*. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun di Kota Surakarta dengan 187 responden yaitu perempuan yang belum menikah dengan usia minimal 25 tahun. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prosentase menghasilkan 28% tidak krisis, 52% moderate dan 19% krisis. Hal tersebut memiliki arti bahwa kecenderungan orientasi perempuan menjadi perempuan otonom ke arah moderat dan otonom. Ini akan berakibat pada kecenderungan perempuan untuk tidak menikah atau lebih menikmati kehidupan sendiri. Hasilnya akan berakibat pada terjadinya krisis keluarga di masa depan karena lembaga perkawinan tidak lagi sangat diharapkan oleh perempuan. Perempuan telah memiliki kekuatan keluar dari tekanan sosial untuk mewajibkan menikah dan berkeluarga.

Suryani, Tyas Eko Raharjo dan Soetji Andari. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui kearifan lokal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Kearifan lokal yang dapat didayagunakan dalam mengatasi kelangsungan hidup pada saat pandemi COVID-19 meliputi pengetahuan lokal, budaya lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, proses sosial, dan solidaritas kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial saat pandemi COVID-19. Di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan pengetahuan sosial masih kental dengan tradisi jimpitan. Hasil dari kegiatan tersebut setelah terkumpul dapat dipergunakan untuk membantu warga masyarakat yang terdampak COVID-19. Sedangkan di Kabupaten Kulonprogo muncul istilah jogo tonggo istilah dalam bahasa jawa yang mengandung makna menjaga antartetangga. Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat, selalu ada semangat saling memberi dan menolong antara sesama tetangga. Selain hal tersebut masih ada tradisi-tradisi yang dapat digunakan sebagai alat dalam memberikan layanan bagi warga yakni sifat gotongroyong yang selalu ada di dua lokasi tersebut. Sifat gotongroyong yang sampai saat ini masih dipertahankan. Rekomendasi perlu adanya kerjasama di antara pemerintah setempat dengan warga dalam melestarikan budaya lokal maupun tradisi yang dianggap dapat memberikan pertolongan bagi warga masyarakat pada saat wabah COVID-19 menyebar.

Nining Ailiyah, M. Asif Nur Fauzi, Nur Chalimah, Mohammad Affan Wahyudi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peningkatan angka kemiskinan yang disebabkan adanya pandemi COVID 19 di Desa Seboro Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa timur. Hal ini ditunjukkan dengan angka Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang naik dari tahun sebelumnya khususnya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Pemerintah berinisiatif memberikan bantuan yang berupa pangan non tunai kepada Keluarga yang berhak menerima manfaat (KPM) melalui data yang diajukan oleh pemerintah desa.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (KEMENSOS) dengan tujuan dalam permasalahan ekonomi di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektifitas BPNT terhadap perekonomian masyarakat di Desa Seboro tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik Reduski Data (Data Reduction), penyajian data (display data), Penegasan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion Drawing and Verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BPNT di Desa Seboro sudah efektif dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan waktu penyalurannya. Keefektifan tersebut ditunjukkan dengan bantuan tersebut memberikan manfaat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di desa tersebut namun belum dapat memenuhi sepenuhnya perekonomian seperti sebelum masa pandemi.

Meli Fauziah, Vera Octavia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat spiritual para ibu rumah tangga dan memverifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketahanan spiritual di Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni *mix method*, kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif. Subjek penelitiannya yaitu para ibu rumah tangga berjumlah 36 orang dengan kategori miskin di Wilayah Kabupaten Cirebon. Data kualitatif diperoleh melalui *in-depth interview*, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari penyebaran angket yang disusun dengan mengacu pada *Spiritual Transcendence Scale* dari Piedmont. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat spiritualitas para ibu rumah tangga tersebut sebesar 4,52 yang berada pada kategori tingkat spiritualitas yang tinggi. Hasil analisis faktor ketahanan spiritualitas menunjukkan bahwa yakin pada kematian sebanyak 94,4%, perasaan tenang dan bahagia setelah melakukan ritual ibadah sebanyak 86,1 %, keyakinan akan kehadiran Tuhan sebanyak 77,8%, yakin bahwa Tuhan selalu ada untuk menolong hambaNya sebanyak 77,8%, sisanya faktor lain dapat meningkatkan kesejahteraan mental para Ibu rumah tangga. Tingkat ketahanan spiritual yang tinggi terbukti mampu menjadikan mental seorang ibu rumah tangga sejahtera sehingga ketahanan keluarga terjaga. Temuan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan khusunya para penyedia layanan sosial untuk melakukan pendekatan dari aspek spiritual bagi kesehatan mental seseorang.

Soni Akhmad Nulhaqim, Wandi Adiansah, Nadila Auludya Rahma Putri, Maulana Irfan. Potensi dan angka kejadian konflik di Provinsi Jawa Barat tergolong cukup tinggi. Tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) merupakan salah satu pihak yang memiliki peran dan tugas penting dalam upaya penanganan konflik tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran Pordam dalam penanganan konflik sosial di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa observasi non partisipatif, *indepth interview*, dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pordam Provinsi Jawa Barat dalam penanganan konflik sosial meliputi upaya pencegahan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan pasca konflik. Upaya pencegahan konflik dilakukan melalui pembentukan dan penguatan Pordam, pemetaan daerah rawan konflik sosial, dan sosialisasi pencegahan konflik ke sekolah-sekolah. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar, Pordam berperan sebagai relawan yang memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan psikososial dalam kondisi kedaruratan bagi korban konflik sosial dan pengungsi. Dalam pemulihan pasca konflik Pordam berperan dalam upaya mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis di masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi dan rehabilitasi.

Dia Meirina Suri, Moris Adidi Yogia, Cifebrima Suyastri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata dengan pemanfaatan modal sosial dalam pengembangan objek wisata. Pandemi Covid 19 yang terjadi memberikan pengaruh terhadap objek wisata, jumlah wisatawan yang berkunjung turun secara drastis, hal ini menyebabkan kondisi perekonomian masyarakat sekitar menjadi menurun. Kondisi tersebut menuntut adanya

pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat lebih aktif dan partisipatif dalam mengelola objek wisata. Pengembangan objek wisata berbasiskan pemberdayaan masyarakat akan memberikan pengaruh bagi peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat disekitar objek wisata tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana masyarakat memanfaatkan modal sosial yang ada untuk pengembangan objek wisata.. Metode yang digunakan adalah kualitatif interpretatif, dalam pengumpulan informasi digunakan data primer yang didapatkan melalui observasi, dan wawancara mendalam. Untuk mendapatkan hasil yang valid dan kredibel digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan modal sosial memiliki kontribusi dalam pengembangan objek wisata, modal sosial dalam bentuk jaringan yang dibangun secara online maupun offline oleh masyarakat sekitar objek wisata, komunikasi dengan stakeholder dan pihak swasta, adanya kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat serta keterbukaan untuk pengembangan objek wisata. Direkomendasikan untuk pengembangan objek wisata dapat memanfaatkan modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata.

Aryan Torrido, Muh. Ulil Abshor, Khatibul Umam. Hanya sedikit penelitian yang memberikan perhatian pada kondisi kerja, perilaku ekonomi lansia, bahaya dan risiko kerja, serta perluasan akses terhadap perlindungan sosial di tempat kerja. Studi ini merupakan upaya untuk menganalisis kondisi kerja, perilaku ekonomi lansia, bahaya dan risiko kerja serta perluasan akses terhadap perlindungan sosial di tempat kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan observasi dan wawancara mendalam terhadap 22 informan yang berasal dari kalangan lanjut usia, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah. Studi ini menemukan bahwa lansia yang bekerja di pedesaan menggabungkan pertanian dan peternakan. Alasan bekerja bervariasi berdasarkan kelas sosial dimana alasan bekerja bagi lansia dari keluarga berada lebih cenderung karena alasan sosiologis sedangkan alasan bekerja bagi lansia dari keluarga berpendapatan rendah lebih cenderung karena alasan ekonomi. Paper ini juga menemukan bahwa berbagai bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan termasuk banyak pekerjaan yang menuntut fisik dan melelahkan, paparan bahan kimia, penggunaan alat pemotong yang tajam, mengangkat beban berat, berjalan jauh, jam kerja yang panjang dan binatang yang berbahaya. Sayangnya, para lansia tidak dilindungi oleh standar perlindungan sosial di tempat kerja mereka. Ada kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan mengenai lingkungan kerja yang ramah bagi orang lanjut usia.

Dewan redaksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan pikiran dalam penerbitan jurnal ini. Kami menyadari bahwa edisi kali ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan jurnal ini di masa mendatang.

Jakarta, 29 November 2023

Redaksi



Krisis Keluarga dalam Perkembangan Otonomi Perempuan

Drajat Tri Kartono^{1*}, Argyo Demartoto², Fatwa Nurul Hakim², Chesa Amanda Marsela⁴

¹ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah, Indonesia

² Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, Indonesia

* Korespondensi: drajat@staff.uns.ac.id ; +62 819-3778-8018

Diterima: 11 Januari 2023; Disetujui: 20 November 2023; Diterbitkan: 29 November 2023

Abstrak: Permasalahan krisis keluarga menyebabkan adanya perubahan relasi kuasa dalam keluarga yang berpengaruh pada hilangnya kepercayaan perempuan otonom terhadap instansi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman tentang krisis keluarga dan relasi kuasa dalam keluarga yang berdampak terhadap permasalahan kepercayaan atas institusi keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi deskriptif kuantitatif dengan analisis korelasi *product moment*. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun di Kota Surakarta dengan 187 responden yaitu perempuan yang belum menikah dengan usia minimal 25 tahun. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prosentase menghasilkan 28% tidak krisis, 52% moderate dan 19% krisis. Hal tersebut memiliki arti bahwa kecenderungan orientasi perempuan menjadi perempuan otonom ke arah moderat dan otonom. Ini akan berakibat pada kecenderungan perempuan untuk tidak menikah atau lebih menikmati kehidupan sendiri. Hasilnya akan berakibat pada terjadinya krisis keluarga di masa depan karena lembaga perkawinan tidak lagi sangat diharapkan oleh perempuan. Perempuan telah memiliki kekuatan keluar dari tekanan sosial untuk mewajibkan menikah dan berkeluarga.

Kata kunci: Institusi keluarga, krisis keluarga, perempuan otonom, relasi kuasa

Abstract: The problem of family crisis causes a change in power relations within the family, which affects the loss of autonomous women's trust in family institutions, leading to dissociative processes in family institutions, which can trigger family crises. This study aims to analyze the understanding of family crises and power relations that impact trust problems in family institutions. The method used in this study is a quantitative descriptive strategy with product-moment correlation analysis. This research was conducted within one year in the Surakarta City with 187 respondents who were unmarried women with a minimum age of 25 years. This study concluded that the percentage of research results resulted in 28% no crisis, 52% moderate, and 19% crisis. The data means the tendency of women's orientation to be autonomous woman towards moderate and autonomous. It will result in the tendency of women not to get married or to enjoy life alone more. The result will result in a family crisis in the future because the institution of marriage is no longer highly expected by women. Women already have the power to get out of social pressure to oblige marriage and a family.

Keywords: Family Institution, Family Crisis, Autonomic Woman, Power Relation

1. Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi sosial primer yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat dan memiliki ikatan dan interaksi sosial di dalamnya. Keluarga merupakan kelompok yang didasari atas pertalian sanak-saudara yang memiliki tanggung jawab utama atas sosialisasi anak dan pemenuhan berbagai kebutuhan pokok, keluarga terdiri dari kelompok yang memiliki hubungan darah, tali perkawinan, maupun adopsi dan individu yang hidup bersama dalam rentang waktu yang tidak terbatas (Cohen, 1983). *Marriage Life* adalah masuknya individu ke dalam siklus kehidupan keluarga, yaitu dengan persiapan meninggalkan rumah sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab secara finansial dan emosional (Santrock, 2021). Menurut (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974) Pasal 1 melihat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membuat keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan publik (Sutrisminah, 2022).

Seiring berjalaninya waktu keutuhan instansi keluarga semakin lama semakin memudar, hal ini di tandai dengan banyaknya kasus-kasus perceraian di berbagai daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Jawa Timur menduduki peringkat tertinggi dalam angka perceraian. Pada 2013 angka perceraian mencapai 83.201 perkara, lalu pada 2015 naik menjadi 87.473. Kemudian pada 2015, turun sedikit dari tahun 2014, menjadi 87.241. Sedangkan hingga September 2016 ini, angka perceraian di sana sudah mencapai 51.000 perkara. Peringkat kedua diduduki Jawa Tengah. Total angka perceraian pada 2013 sebanyak 68.202, kemudian 70.037 perkara pada tahun berikutnya, pada 2015 naik menjadi 71.774, dan hingga September 2016 berjumlah 40.850 perkara. Kemudian, Jawa Barat menduduki peringkat ketiga sebagai provinsi yang dengan angka perceraian tertinggi. Pada 2013, angka perceraian mencapai 62.184 kasus, pada 2014 naik cukup signifikan hingga mencapai 67.129 perkara, pada 2015 naik kembali hingga menjadi sebanyak 70.519 perkara, dan hingga September 2016 telah mencapai 39.350 perkara. Jakarta, sebagai ibu kota yang padat penduduk, jumlah angka perceraianya jauh di bawah tiga daerah tersebut. Pada 2013, angka perceraian di Jakarta berjumlah 8.837 kasus, kemudian pada 2014 sebanyak 9.731 perkara, naik pada 2015 menjadi 10.359, lalu hingga September 2016 angka perceraian di sana telah mencapai 3.071 kasus. Secara keseluruhan, dari 2013 sampai 2015 kemarin memang ada peningkatan kasus perkara perceraian. Pada 2013, angka perceraian di Indonesia berjumlah 319.066, lalu naik pada 2014 menjadi 336.769, dan naik kembali pada 2015 menjadi 349.774. Sementara, hingga September 2016, total angka perceraian di Indonesia sudah mencapai 153.550 (Badan Pusat Statistik, 2017). Lebih lanjut tercatat pada tahun 2017 dilaporkan 71.554 kasus perceraian di Jawa Tengah dan meningkat pesat dengan total 82.758 kasus terjadi selama tahun 2019, hal ini membuat Jawa Tengah menjadi provinsi yang memiliki angka perceraian cukup tinggi di Indonesia (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2018), (2020).

Padahal dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 menyebutkan bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan upaya terencana guna mewujudkan keseimbangan pertumbuhan penduduk dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi. Penyebab perceraian antara lain masalah komunikasi, ketidakcocokan, perubahan nilai dan gaya hidup, serta perselingkuhan (Amalia et al., 2017).

Tingginya tingkat perceraian ini juga disebabkan oleh perubahan kultur perempuan dimana mereka telah memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri. Otonomi perempuan adalah perempuan yang otonom, independen, dan mandiri dalam segala hal tentang tubuh dan kesehatannya. Prinsipnya otonomi merupakan wewenang manusia sesuai fitrohnya sebagai pemimpin bagi diri, keluarga, dan masyarakat (Naqiyah, 2005). Masuknya perempuan dalam ruang-ruang publik menyebabkan

terjadinya perubahan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan serta antara anak dan orang tua. Perubahan relasi kuasa ini menyebabkan terbukanya wacana baru dalam pemikiran mereka yang kemudian berdampak pada pergeseran persepsi mengenai makna perkawinan. Perkawinan mulai dimaknai sebagai hak kebebasan individu. Bagi perempuan lajang, perkawinan menjadi sebuah kontrak sosial, yang mengharuskan terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa ada intervensi dari pihak lain. Para perempuan lajang yang *notabene* merupakan perempuan yang memiliki otonomi dan kuasa penuh atas dirinya sendiri, menganggap perkawinan merupakan sebuah pilihan rasional; *personal*; dan tidak ditentukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu sistem perjodohan yang dilakukan oleh orang tua menjadi hal yang tidak relevan lagi, karena setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan dan memilih pendamping hidupnya (Sushartami, 2002).

Perkembangan otonomi perempuan di Indonesia telah banyak dikaji diantaranya pentingnya peran perempuan pada publik (Aliffiati & Kaler, 2020; Latifi & Udasmor, 2020; Novita, 2022; Rusta & Hairunnas, 2022; Yuliantri et al., 2021) dan ranah domestik (keluarga dan rumah tangga) (Aprilianti, 2018), (Mayangsari et al., 2022), (Nurrachmawati et al., 2018), (Paramita et al., 2017), (Synthesia & Hartono, 2023), (Zaluchu, 2022). Bahkan secara global peneliti telah menetapkan indeks otonomi perempuan dan digunakan untuk mengukur tingkat otonomi dalam pengambilan keputusan penggunaan fasilitas kesehatan (Mallick & Chouhan, 2022; Obasohan et al., 2019; Rizkianti et al., 2020), pertumbuhan anak (Saaka, 2020), dan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi perempuan (Malhab et al., 2021).

Hasil penelitian mengenai relasi kuasa kerap kali menempatkan perempuan pada posisi yang tidak berdaya telah dikaji oleh para peneliti secara ekstensif. Lemahnya otonomi perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dikaji oleh (Wuryandari, 2022) dimana mayoritas menjadi pekerja berkelas sosial rendah dalam balutan relasi kuasa yang ditentukan oleh orang di luar dirinya (suami, orang tua, agensi, dan lain sebagainya). Dalam konteks pekerja migran Indonesia, para perempuan dikonstruksikan sebagai anggota keluarga yang harus berkorban mencari nafkah demi melepaskan diri dari kemiskinan. Relasi kuasa perempuan yang timpang dalam kehidupan rumah kemudian berdampak sampai ke luar rumah ketika perempuan berinteraksi dengan laki-laki di ruang publik. Sejalan dengan hasil penelitian Tokan & Gai (2020) di Flores Timur, perempuan desa kurang mampu dan berani menyampaikan gagasan dan kritik dalam forum musyawarah desa. Relasi kuasa dan akses perempuan atas sumber daya desa masih terbatas karena kuatnya rezim oligarki desa berwajah otoritarian. Hadirnya relasi kuasa otoritarian juga dilanggengkan oleh kultur dan rendahnya tingkat pendidikan dan pengalaman perempuan desa. Urgensi ketimpangan relasi kuasa terhadap Perempuan untuk segera ditangani dikarenakan maraknya kasus kekerasan seksual yang bahkan terjadi di tempat-tempat yang dianggap aman seperti Lembaga Pendidikan maupun keagamaan. Temuan Pebriaisyah et al. (2022) menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara kyai dengan santri kemudian diperparah oleh budaya patriarki yang abadi dan telah terlembagakan di lingkungan pesantren menyebabkan praktik kekerasan seksual yang masih menjadi fenomena gunung es karena jarang terungkap bahkan sering ditutup-tutupi.

Konstruksi sosial budaya dalam hegemoni budaya patriarki menempatkan mereka sebagaimana ditunjukkan Simone de Beauvoir. Perempuan didefinisikan berdasarkan keliyanan perempuan, dimana ideologi maskulin tidak memberikan ruang pada aspirasi perempuan. Simone de Beauvoir dalam menjelaskan tentang kaum laki-laki akan selalu memegang kekuatan-kekuatan yang nyata dengan menjaga kaum perempuan dalam keadaan yang selalu bergantung, dan semua peraturan hukum dibentuk untuk melawan kaum perempuan. Dalam bukunya "The Second Sex" (De Beauvoir, 2014), Beauvoir menjelaskan berbagai macam proses yang dialami oleh perempuan yang berdampak terhadap subjektifitasnya sebagai "yang lain" terhadap laki-laki. Institusi sosial, khususnya perkawinan, menentukan bahwa laki-laki dan perempuan berlawanan satu sama lain dan tidak setara.

Bahkan dalam situasi terbaik sekalipun, seperti perempuan yang menjalani kehidupan mandiri harus terus menerus berkonflik antara kebebasan di dalam dirinya dan takdir keperempuannya yang secara sosial telah terkonstruksikan.

Pada tingkat *global*, penelitian terdahulu melihat beberapa permasalahan krisis keluarga, seperti penelitian (Doss et al., 2009) menyebutkan bahwa pasangan dengan usia pernikahan lima tahun akan mengalami berbagai masalah yang timbul (karena lima tahun pertama dalam kehidupan keluarga merupakan masa yang sulit). Data penelitian menunjukkan 36% dari 213 pasangan mengalami masa sulit dan mencari penyelesaian dengan membaca literatur (buku) mengenai hubungan pasangan suami-istri. 41 pasangan mengikuti workshop dan 49 pasangan membaca buku mengenai meningkatkan kualitas hubungan. Sedangkan dalam penelitian (Vaaler et al., 2009) menemukan bahwa agama merupakan faktor penyebab keretakan rumah tangga, disebutkan bahwa jika salah satu pasangan sangat taat dan lebih tekun dalam menghadiri ritual dan perayaan agama akan menjadi pemicu ketidakutuhan pernikahan. Keadaan keluarga yang krisis dapat menimbulkan kerugian pada banyak pihak terutama pada anak (Wulandari & Fauziah, 2019). Permasalahan krisis keluarga menyebabkan adanya perubahan relasi kuasa dalam keluarga yang berpengaruh pada hilangnya kepercayaan perempuan otonom terhadap instansi keluarga yang kemudian akan menimbulkan proses-proses disosiatif dalam instansi keluarga yang dapat memicu terjadinya krisis keluarga.

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menganalisis dampak relasi kuasa terhadap kepercayaan atas institusi keluarga. Kajian mengenai keluarga sebenarnya telah dilakukan dari berbagai macam disiplin keilmuan dan juga dalam berbagai macam topik. Disiplin ilmu psikologi terdapat beberapa topik popular seperti perkembangan keluarga (Gunarsa, 2004), (Lestari, 2012). Beberapa konsep yang digunakan khususnya konsepsi keluarga menurut (Morton et al., 1950) yakni tentang 5 syarat kebertahanan keluarga meliputi alokasi ekonomi, alokasi kekuasaan, alokasi solidaritas, integritas dan ekspresi. Dengan konsepsi keluarga otonom yang meliputi otonomi *single*, baik *single women* maupun *single man*. Carter & McGoldrick dalam (Santrock, 2021) terdapat enam tahapan siklus kehidupan keluarga, yaitu 1) meninggalkan rumah; 2) penggabungan keluarga melalui pernikahan bagi pasangan baru; 3) menjadi orangtua dan keluarga dengan anak; 4) keluarga dengan anak remaja; 5) keluarga pada kehidupan usia lanjut.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti ini ingin mengkaji tentang profil perempuan otonom, krisis keluarga dalam konstruksi perempuan otonom, faktor yang mempengaruhi perkembangan perempuan otonom dan krisis keluarga. Sejalan dengan permasalahan ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemahaman tentang krisis keluarga dan relasi kuasa dalam keluarga yang berdampak terhadap permasalahan kepercayaan atas institusi keluarga yang lebih komprehensif.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian *descriptive quantitative* (kuantitatif deskriptif) dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan karakteristik sampel yaitu perempuan belum menikah dengan usia minimal 25 tahun. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2018). Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta pada Tahun 2019 dengan estimasi waktu satu tahun. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan model *descriptive statistic* dengan menampilkan deskripsi frekuensi dan prosentase untuk masing-masing variabel kemudian dilanjutkan dengan analisis korelasi *product moment*.

3. Hasil

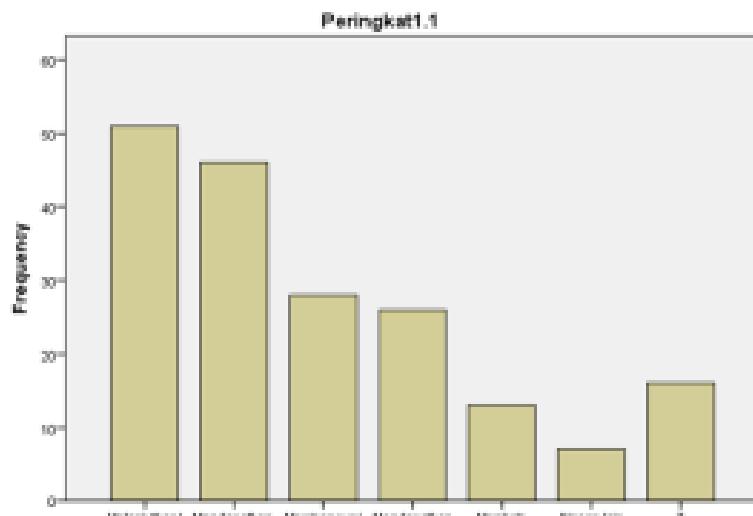
3.1. Karakteristik Responden

Drajat Tri Kartono, Argyo Demartoto, Fatwa Nurul Hakim, Chesa Amanda Marsela

Permatasari (2017) menyatakan seorang perempuan saat ini telah berkuasa terhadap kepemilikan tubuhnya yang dalam budaya dan hukum patriarki kuasa perempuan atas kepemilikan tubuhnya seringkali tidak diindahkan. Selain itu, keputusan perempuan untuk menikah membutuhkan pertimbangan banyak hal terkait keluarga, karir, cita-cita, ekonomi, dan lain-lain. Ada banyak alasan untuk menikah dan ada banyak alasan untuk tidak menikah. Wajar jika pernikahan dianggap sebagai pilihan yang rasional, terutama di wilayah metropolitan, namun tentu saja hal ini tidak bisa dianggap normal bagi masyarakat di kota kecil atau pedesaan. Sejalan dengan temuan penelitian (Elsara et al., 2022) masyarakat dapat memahami penundaan usia menikah bagi perempuan yang bekerja (wanita karir) namun tidak demikian bagi perempuan yang tidak bekerja dianggap sebagai aib. Berdasarkan penelitian (Repi & Maliombo, 2022), konstruksi pernikahan bagi wanita adalah wujud pemenuhan "tuntutan tradisi" dalam memasuki perannya sebagai istri dan ibu. Konstruksi pernikahan sebagai "tuntutan tradisi" pernah diteliti di Yunani oleh (Rontos et al., 2019). Hasilnya menunjukkan bahwa pelajar perempuan cenderung menunda keputusan mereka untuk menikah, karena stereotip tradisional keluarga tampaknya telah kehilangan pengaruhnya terhadap keputusan hidup yang diambil oleh perempuan muda. Selain itu, sebagian besar siswi menggunakan kohabitusi sebagai awal dari pernikahan. Responden diketahui menjadi lebih emansipasi dan mandiri dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sementara status sosial dan kemandirian finansial dicari melalui pendidikan dibandingkan melalui pernikahan.

Hasil dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan sejumlah 187 responden yang disesuaikan dengan kriteria penelitian ini yaitu perempuan yang berusia minimal 25 tahun dan belum menikah, yang mempunyai arti bahwa perempuan tersebut memiliki kuasa atas tubuhnya secara penuh.

3.2. Kegiatan yang paling penting

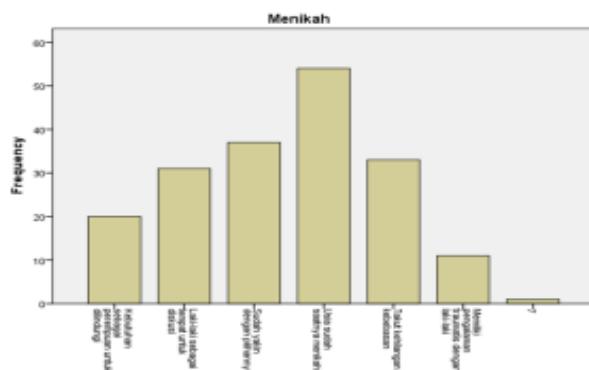


Gambar 1. Kegiatan Paling Penting

Perempuan pada masa sekarang telah menganggap pernikahan bukanlah prioritas utama, dari hal ini dapat dilihat pada tabel diatas dimana mereka dominan untuk melanjutkan dan menyelesaikan studi sebagai prioritas utama dengan prosentase 57 orang. Prioritas kedua merupakan membangun rumah dengan prosentase 46 orang. Ketiga, prioritas untuk mendapatkan pekerjaan dengan prosentase 28 orang. Kemudian kegiatan menikah dengan prosentase 13 orang, disusul dengan membeli mobil dengan prosentase 7 orang dan alasan lain dengan prosentase 16 orang. Anggapan bahwa pernikahan tidak menjadi prioritas utama bagi perempuan sesuai dengan penelitian (Repi & Maliombo, 2022) yang

mengungkap alasan wanita karir memutuskan belum menikah dimana terdapat berbagai faktor penyerta yang turut berperan dalam proses dan hasil pengambilan keputusan dari para informan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang terdiri dari adanya kebutuhan aktualisasi diri pada bidang masing-masing, serta keinginan akan kebebasan, dan faktor eksternal yang meliputi pengembangan karir, dan tidak ada tekanan untuk cepat menikah dari lingkungan sosialnya baik keluarga maupun lingkup pertemanan.

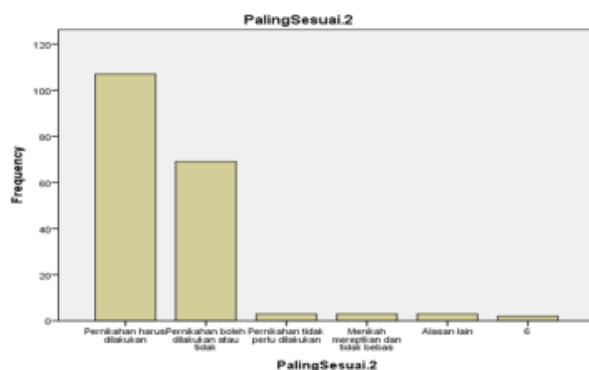
3.3. Penilaian Pernikahan bagi Perempuan



Gambar 2. Penilaian Pernikahan bagi Perempuan

Konstruksi perempuan mengenai pernikahan didominasi oleh faktor usia saatnya menikah dengan prosentase 54. Kedua, karena faktor sudah yakin dengan pilihannya dengan prosentase 37 orang. Ketiga, perempuan menganggap bahwasanya pernikahan merenggut kebebasan dengan prosentase 33 orang. Keempat, laki-laki sebagai wadah untuk berdiskusi dengan prosentase 31 orang. Kelima, kebutuhan untuk dilindungi dengan prosentase 20 orang. Keenam, memiliki trauma terhadap laki-laki dengan prosentase 11 orang yang menyebabkan perempuan tidak melakukan pernikahan. Hal ini mengindikasikan bahwasanya pernikahan dilakukan secara terpaksa karena terpanjang usia. Pada umumnya pernikahan dilakukan oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi karena dengan adanya kematangan emosi mereka dapat menjaga kelangsungan pernikahan. Selain dibutuhkan kematangan emosi dalam pernikahan dibutuhkan pula kesiapan fisik bagi perempuan, karena dalam pernikahan membutuhkan pemikiran, kesiapan psikologi dan persiapan ekonomi (Susiolo, 2020).

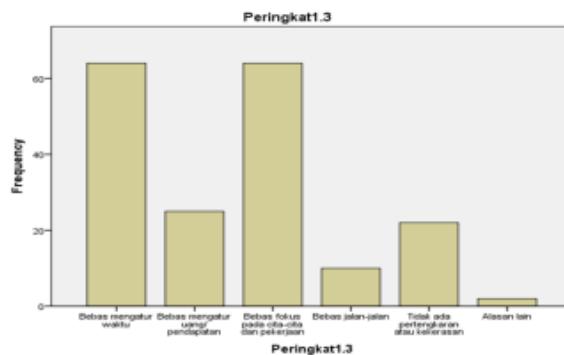
3.4. Penilaian Pernikahan



Gambar 3. Penilaian Pernikahan bagi Perempuan

Berdasarkan tabel diatas sejumlah 107 responden menganggap bahwasanya pernikahan harus dilakukan. Selanjutnya prosentase 69 orang menganggap pernikahan bisa saja dan bisa saja tidak untuk dilakukan. Selanjutnya 3 orang menjawab bahwa pernikahan tidak perlu dilakukan karena merepotkan. Dari data diatas dapat dilihat adanya indikasi bahwa ada sejumlah perempuan mulai melihat pernikahan sebagai hal yang kurang bernilai. Pengambilan keputusan oleh perempuan dalam menentukan karir dan pernikahan yang merujuk pada perkembangan otonomi perempuan telah diteliti oleh (Sier, 2021). Seiring dengan meningkatnya partisipasi siswa dari latar belakang pedesaan dalam sistem pendidikan tinggi Tiongkok, prestasi pendidikan perempuan muda mempengaruhi dinamika gender dalam rumah tangga pedesaan. Keputusan mengenai karir dan perkawinan anak perempuan yang berpendidikan tinggi dibentuk oleh strategi rumah tangga pedesaan yang bertujuan untuk membangun rumah tangga mandiri antara saudara laki-laki dan anak laki-laki.

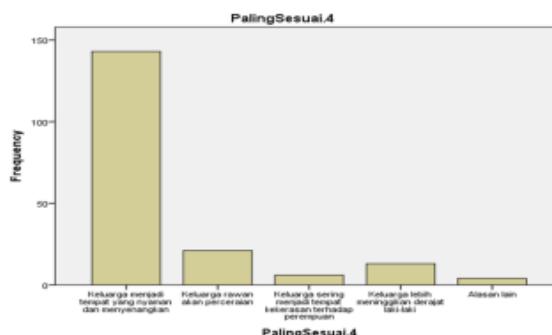
3.5. Kegiatan paling menyenangkan bila hidup mandiri



Gambar 4. Kegiatan Paling Menyenangkan bila Hidup Mandiri

Konstruksi perempuan nyaman hidup mandiri dipengaruhi oleh berbagai alasan bebas mengatur waktu serta bebas untuk fokus menggapai cita-cita dan pekerjaan dengan prosentase masing-masing sebanyak 64 orang. Selanjutnya alasan bebas mengatur uang atau pendapatan dengan prosentase 25 orang. Selanjutnya alasan bebas dari pertengkaran atau kekerasan dengan prosentase 22 orang. Serta terakhir adalah alasan bebas jalan-jalan jika hidup mandiri. Kebebasan hidup mandiri dengan fokus pekerjaan sesuai dengan penelitian (De Clercq & Brieger, 2022) yang mengkaji hubungan antara otonomi kerja perempuan dan keseimbangan kehidupan kerja (*work life balance*), dengan fokus khusus pada bagaimana hubungan ini dapat diperkuat oleh lingkungan yang mendiskriminasi perempuan, baik secara sosio-ekonomi, kelembagaan, atau budaya. Hasilnya menunjukkan bahwa rasa otonomi kerja meningkatkan kemungkinan mereka merasa puas dengan kemampuan mereka menyeimbangkan kebutuhan pekerjaan dan kehidupan pribadi.

3.6. Penilaian Terhadap Keluarga



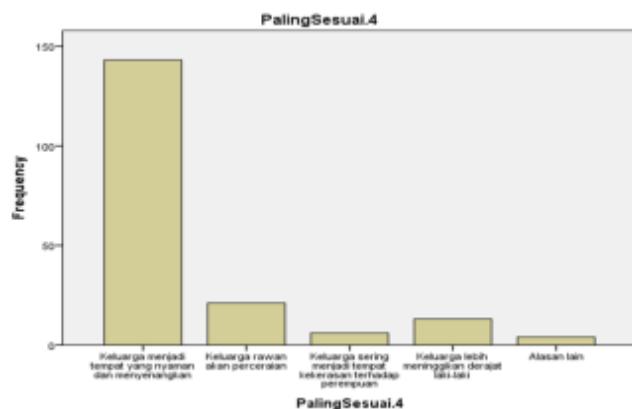
Gambar 5. Penilaian Terhadap Keluarga

Drajat Tri Kartono, Argyo Demartoto, Fatwa Nurul Hakim, Chesa Amanda Marsela

risis Keluarga dalam Perkembangan Otonomi Perempuan

Konstruksi perempuan terhadap institusi keluarga didominasi oleh anggapan bahwa keluarga menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan dengan prosentase 143 orang. Hasil tersebut menunjukkan harapan perempuan yang besar pada konsep keluarga bahagia dengan prinsip menciptakan rasa aman dan tenram dalam keluarga, menghindari kekerasan, serta hubungan yang setara antara suami dan istri (Anggraeniko et al., 2022; Nurliana, 2019). Selanjutnya konstruksi akan keluarga rawan akan perceraian dengan prosentase 21 orang. Selanjutnya konstruksi bahwa dalam keluarga laki-laki lebih ditinggikan derajatnya dengan prosentase 13 orang. Kemudian prosentase 6 orang menganggap bahwa dalam instansi keluarga merupakan tempat terjadinya kekerasan.

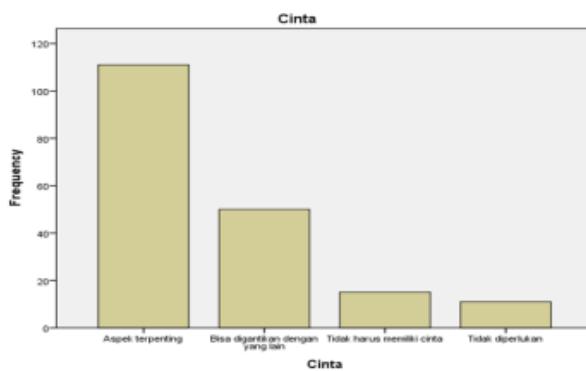
3.7. Aspek yang perlu dimiliki dalam keluarga



Gambar 6. Aspek yang perlu dimiliki keluarga

Konstruksi perempuan terhadap aspek-aspek yang perlu dimiliki dalam sebuah keluarga yaitu cinta merupakan aspek yang paling penting dengan prosentase 111 orang. Selanjutnya aspek ekonomi merupakan aspek yang paling penting dengan prosentase 26 orang. Aspek Pengetahuan merupakan aspek yang paling penting dengan prosentase 24 orang. Aspek rekreasi merupakan aspek paling penting dengan prosentase 5 orang. Dan 21 orang menjawab alasan lain mengenai aspek yang paling penting dalam institusi keluarga. Temuan (Napa et al., 2020) menunjukkan bahwa hidup bersama tanpa masalah keuangan merupakan kategori inti kebahagiaan keluarga, yang mencakup hubungan dekat, kepedulian satu sama lain, dan keamanan finansial. Keluarga perlu menyeimbangkan komponen-komponen ini ketika menghadapi stres, menggunakan metode coping untuk memulihkan kebahagiaan.

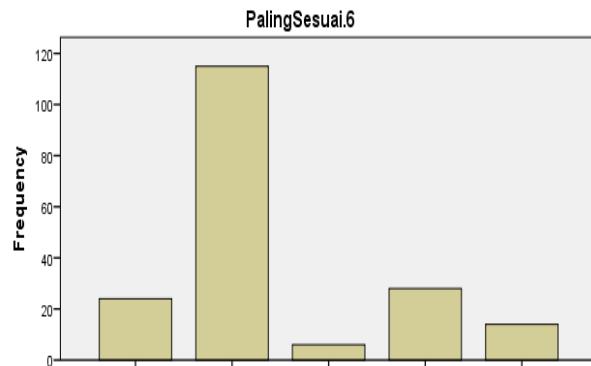
3.8. Penilaian cinta bagi perempuan



Gambar 7. Penilaian Cinta bagi Perempuan

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, bahwa sebanyak 111 orang sependapat bahwa cinta merupakan aspek terpenting dalam sebuah hubungan/ keluarga. Berbeda dengan 50 orang responden lain menganggap bahwa cinta bisa digantikan dengan hal lain ketika berada di dalam suatu hubungan. Sebanyak 15 orang menganggap bahwa cinta tidak harus dimiliki dan yang terakhir 11 orang menganggap cinta tidak diperlukan dalam hubungan/ keluarga.

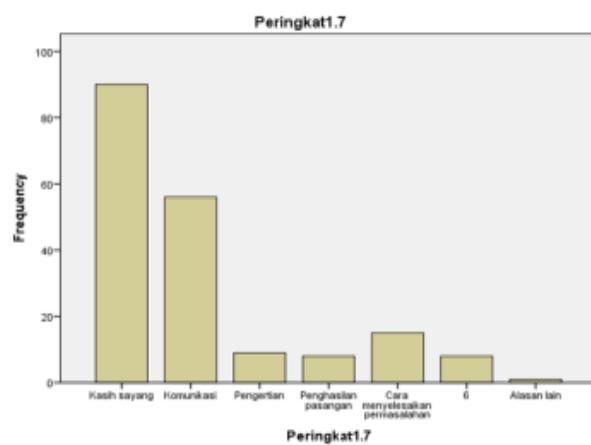
3.9. Impian perempuan di masa depan terhadap keluarga



Gambar 8. Impian Perempuan Terhadap Keluarga

Konstruksi perempuan akan instansi keluarga yang diidam-idamkan antara lain, keinginan mendapatkan keluarga yang harmonis dengan prosentase 115 orang. Selanjutnya keinginan adanya dukungan penuh dari suami terhadap apa yang perempuan lakukan dengan prosentase 28 orang. Selanjutnya memilih untuk sendiri sampai tua dengan prosentase 24 orang. 6 orang menginginkan keluarga yang memiliki banyak anak. Dan terakhir dengan prosentase 14 orang menginginkan memiliki *quality time* bersama keluarga.

3.10. Hal yang membuat keluarga menjadi bahagia:



Gambar 9. Hal yang membuat keluarga menjadi bahagia

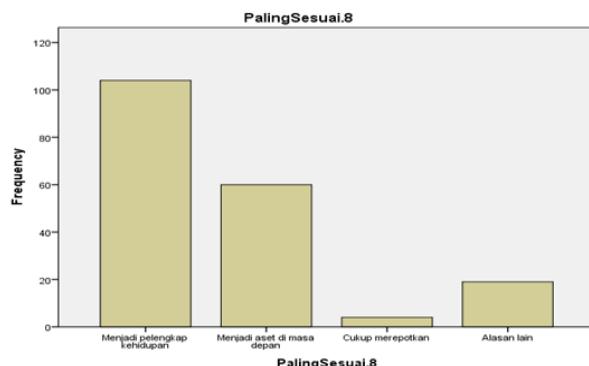
Seperti sebelumnya jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 187 orang, dari total tersebut 90 orang memilih bahwa hal yang membuat keluarga menjadi bahagia karena adanya kasih sayang, selanjutnya 56 orang memilih komunikasi sebagai salah satu hal yang membuat keluarga menjadi bahagia, disusul dengan sebanyak 15 orang menganggap bahwa dapat menyelesaikan permasalahan merupakan salah satu hal yang membuat keluarga menjadi bahagia. Selanjutnya, 9 orang memilih

Drajat Tri Kartono, Argyo Demartoto, Fatwa Nurul Hakim, Chesa Amanda Marsela

risis Keluarga dalam Perkembangan Otonomi Perempuan

pengertian dan 8 orang memilih penghasilan dari pasangan dan yang terakhir ada satu orang yang memiliki alasan lain sebuah keluarga itu bias bahagia.

3.11. Konsepsi perempuan terhadap anak-anak



Gambar 10. Konsepsi Perempuan Terhadap Anak-Anak

Konstruksi perempuan terhadap anak-anak didominasi oleh konstruksi akan anak sebagai pelengkap keluarga dengan prosentase 104 orang. Selanjutnya konstruk mengenai anak sebagai aset di masa depan dengan prosentase 60 orang. Konstruksi bahwasanya anak merepotkan dengan prosentase 4 orang dan jawaban anak mengenai anak lainnya dengan prosentase 19 orang.

4. Pembahasan

4.1. Konstruksi Perempuan Otonom mengenai Keluarga

Konstruksi Perempuan otonom dikaji dengan memberikan delapan pilihan pernyataan mengenai institusi keluarga. Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan jawaban sehingga jumlah dalam penyajian data lebih besar dari jumlah responden (187 orang). Secara keseluruhan pilihan hidup perempuan otonom yang disajikan dapat dikelompokan menjadi tiga aspek, yaitu kemandirian, keluarga, dan cinta.

Tabel 1. Konstruksi Perempuan Otonom

Pilihan Hidup Perempuan	Jumlah	Persentase	% Akumulatif
Hidup sendiri untuk mencapai karir, pendidikan, dan pekerjaan	105	14%	
Hidup sendiri untuk focus mencapai cita-cita	64	8%	23%
Hidup sendiri untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga	6	1%	
Hidup menikah karena kewajiban sosial dan harus dilakukan	107	14%	
Hidup menikah dengan anak sebagai pelengkap	104	14%	28%
Hidup harmonis berkeluarga	115	15%	
Hidup nyaman bersama keluarga	143	19%	49%
Hidup bersama dengan cinta	111	15%	

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Dalam Tabel 1, terlihat bahwa sebagian besar perempuan (49%) yang saat ini masih hidup sendiri, masih menghendaki hidup bersama dalam keluarga yang nyaman harmonis dan cinta. Walaupun

demikian perlu diperhatikan bahwa 23% perempuan yang sekarang hidup sendiri cenderung memilih hidup otonom tanpa keluarga untuk mengejar karier pendidikan, pekerjaan dan cita-cita. Sedangkan 28% perempuan memilih hidup bersama karena keterpaksaan kewajiban sosial atau kewajiban untuk memiliki keturunan. Gejala ini menunjukkan pergeseran yang penting dalam kemunculan dan perkembangan perempuan otonom di masyarakat Indonesia.

Perempuan otonom dalam penelitian ini identik dengan perempuan yang lebih memprioritaskan melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini para perempuan otonom telah berhasil meruntuhkan konstruksi perempuan sebagai *konco wingking* dan meruntuhkan stigma perempuan hanya akan menjadi ibu rumah tangga jadi tidak perlu sekolah tinggi. Para perempuan otonom masih saja berpikir bahwa pernikahan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan selama hidup walaupun mereka tidak mematok di usia berapa mereka akan menikah. Mereka juga berpikir untuk memutuskan menikah pada usia 27 ke atas. Hal ini disebabkan oleh mereka lebih mempertimbangkan pasangan yang sesuai kriteria mereka, pertimbangan ini disebabkan oleh perempuan otonom telah memiliki relasi kekuasaan yang setara berkaitan dengan karier dan sebagainya.

Namun di lain sisi perempuan otonom lebih memilih untuk hidup mandiri karena beberapa alasan, antara lain. Pertama, bebas untuk fokus menggapai cita-cita dan fokus pada karier mereka daripada melakukan pernikahan. Pandangan tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Hizi, 2018) yang mengeksplorasi praktik pengembangan diri melalui lokakarya keterampilan interpersonal. Praktik-praktik ini mengarahkan partisipan untuk mengekspresikan diri mereka sebagai pribadi yang otonom, terlepas dari hierarki sosial dan tanggung jawab kekeluargaan. Perempuan belum menikah yang menghadiri lokakarya menganggap pernikahan sebagai hambatan yang tidak dapat dihindari dalam realisasi diri mereka. Hal ini disebabkan oleh ketidaksetaraan gender dalam pernikahan, serta perluasan cita-cita otonomi individu di Tiongkok melalui reformasi ekonomi. Sebaliknya, kemungkinan cita-cita tersebut, yang selalu dibentuk dan dibatasi oleh kepentingan sosio-ekonomi yang menyebabkan rasa frustrasi perempuan terhadap budaya lokal. Fakta bahwa cita-cita ini menjanjikan pencapaian universal menyoroti peran gender yang membatasi otonomi perempuan.

Kedua, Hidup mandiri merupakan suatu solusi untuk yang menghindarkan perempuan dari situasi pertengkar dan kekerasan dalam institusi keluarga. Konstruksi pemikiran perempuan otonom mengenai instansi keluarga tersebut kemudian memicu perempuan otonom untuk lebih memilih hidup mandiri daripada melakukan pernikahan.

Perkembangan perempuan otonom tidak lepas dari berbagai faktor yang mendasarinya. *Pertama*, keluarga harus menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan sebagai sarana untuk melepaskan penat dari kehidupan publik dimana keluarga bisa dijadikan ruang untuk berdiskusi. *Kedua*, cinta yang merupakan faktor sebagai penyokong resiliensi lembaga keluarga terhadap hambatan internal maupun eksternal yang dapat menimbulkan disorganisasi keluarga. Menurut (Herdiana, 2019), definisi resiliensi adalah melibatkan kekuatan di bawah tekanan akibat krisis dan kesulitan yang berkepanjangan. *Ketiga*, mereka terkonstruksi bahwa keluarga ideal di "masa depan" harus terjalin relasi yang harmonis dan penuh kasih sayang. *Keempat*, mereka menganggap anak sebagai pelengkap kehidupan untuk mengusir rasa kesepian dan masa depan yang berfungsi sebagai penerus usaha yang telah dibangun oleh mereka. *Kelima*, aspek ekonomi; komunikasi; serta afeksi merupakan aspek pendukung agar hidup keluarga menjadi bahagia.

4.2. Krisis Keluarga dan Relasi Kuasa Perempuan Otonom

Krisis keluarga menurut (Morton et al., 1950) melihat bahwasanya keseimbangan keluarga dapat tercapai bila instansi tersebut memiliki lima persyaratan struktural yang harus dipenuhi, antara lain.

Drajat Tri Kartono, Argyo Demartoto, Fatwa Nurul Hakim, Chesa Amanda Marsela

risis Keluarga dalam Perkembangan Otonomi Perempuan

Pertama, diferensiasi peranan. *Kedua*, alokasi solidaritas keluarga. *Ketiga*, alokasi ekonomi. *Keempat*, alokasi integrasi dan ekspresi. Suatu lembaga keluarga akan utuh jika keempat aspek-aspek tersebut terpenuhi.

Teori Relasi Kuasa merupakan suatu teori yang dikemukakan oleh Michel Foucault. Teori ini melihat bahwasanya kekuasaan itu tidak bersifat negatif. Kekuasaan juga tidak dilihat sebagai dominasi, namun Foucault melihat bahwasanya kekuasaan itu beragam dan tersebar dimana-mana (*omnipresent*). Konsep kekuasaan Foucault itu melihat kekuasaan sebagai pendisiplinan tubuh (*disciplinary power*) yang berisi pada usaha “normalisasi” kelakuan tubuh dimana hal ini merupakan produksi dan internalisasi pengetahuan untuk melanggengkan relasi kekuasaan sebagai bentuk normalisasi tubuh. Dalam bukunya *The History of Sexuality Volume 1*, Foucault membagi lima proposisi mengenai kekuasaan, yakni. 1) kekuasaan bukan suatu yang didapat, diraih, digunakan atau dibagikan, tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak. 2) Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkis yang menandakan ada yang menguasai dan yang dikuasai. 3) Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi *binary opositions* karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya. 4) Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif. 5) Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (resistance). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya (Foucault, 1978).

Permasalahannya sekarang adalah pemberian aktualisasi diri di ruang publik bagi perempuan ternyata menjadi bumerang bagi mereka, hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu; pertama, kurangnya potensi diri sehingga tidak mampu bersaing dengan laki-laki dan kedua, kesiapan relasi gender yang belum mateng sehingga menciptakan permasalahan baru, yakni beban ganda bagi perempuan (Ajizah & Khomisah, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Mayangsari et al., 2022) menyimpulkan pada akhirnya faktor usia, pengalaman, serta perluasan wawasan perempuan sangat membantunya untuk menyetarakan dirinya di hadapan laki-laki sehingga seluruh proses pengambilan keputusan juga mampu dilakukannya, termasuk juga memberikan pertimbangan rasional atas statusnya dan menegosiasikan harapannya di hadapan laki-laki tanpa ada keraguan. Kesetaraan inilah yang menjadi kunci utama dari pihak perempuan untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Pihak di luar dirinya dapat diposisikan sebagai pihak yang hanya memberikan pertimbangan, tetapi tidak secara signifikan mempengaruhinya di dalam mengambil keputusan yang merupakan otonominya, sebab diri perempuan sendiri itulah yang akan menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang diambilnya.

Otonomi perempuan merupakan upaya memenuhi tuntutan perempuan saat ini, yang dihadapkan pada pilihan hidup yang tidak mudah. Sikap mandiri dan merdeka merupakan bekal perempuan untuk memilih cara hidup sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Perempuan berhak untuk memilih pendidikan, menjaga kesehatan, berkeluarga, bekerja di dalam atau di luar rumah, mengatur tubuhnya sendiri, memutuskan apa yang terbaik untuk kesehatan reproduksinya (apakah ia akan mengikuti KB atau tidak). Memutuskan untuk hamil atau tidak. Perempuan sendirilah yang harus bertanggungjawab sepenuhnya pada diri dan kehidupannya. Perempuan dengan otonominya akan mampu mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dirinya (Naqiyah, 2005).

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa perempuan otonom telah berhasil keluar dari relasi yang timpang dengan laki-laki dimana mereka mulai memiliki kekuasaan atas tubuhnya (*biopower*) sendiri. Hal ini kemudian menyebabkan beberapa perempuan memilih untuk hidup sendiri. Perempuan otonom mulai mereproduksi sebuah wacana pengetahuan baru yang menyebabkan kondisi hidup mereka mulai fleksibel dan tidak perlu diserasikan dengan norma dominan masyarakat yang mengharuskan perempuan untuk cepat menikah. Hal seperti ini kemudian menyumbang pada hilangnya rasa kepercayaan perempuan terhadap institusi keluarga. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menggunakan *software SPSS* yang mengindikasikan sejumlah 53% perempuan rentan

mengalami krisis keluarga, 28% perempuan tidak mengalami krisis keluarga dan 19% perempuan mengindikasikan adanya krisis keluarga di masa depan.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dimana peneliti menggunakan menghitung menggunakan *software* SPSS dengan teknik analisis deskriptif, mendapatkan hasil bahwa sebesar 28% dari total 187 responden perempuan tidak mengalami krisis keluarga di masa yang akan datang, selanjutnya sebesar 53% dari total responden berada dalam rentang *moderate* atau tengah-tengah dan yang terakhir sebanyak 19% mengindikasikan adanya krisis keluarga di masa yang akan datang. Hal ini mengandung arti bahwa kecenderungan orientasi perempuan menjadi perempuan otonom ke arah *moderate* yang kemudian akan berakibat pada kecenderungan untuk tidak melakukan pernikahan atau lebih menikmati kehidupan sendiri. Dampak dari perubahan orientasi perempuan mengenai pernikahan tadi akan berdampak pada terjadinya krisis keluarga di masa depan, karena lembaga perkawinan tidak lagi sangat diharapkan oleh perempuan. Hal ini menandakan bahwa perempuan telah memiliki kekuasaan atas tubuhnya untuk keluar dari tekanan sosial yang mewajibkan perempuan untuk menikah dan berkeluarga.

6. Saran

Adapun saran peneliti terhadap perempuan otonom di Kota Surakarta sebagai berikut: 1) sangat diharapkan para perempuan otonom untuk melihat substansi dari dibentuknya lembaga keluarga. 2) sangat diperlukannya sosialisasi mengenai resiliensi keluarga pada perempuan otonom. 3) Pentingnya menjaga keharmonisan dalam suatu keluarga sebagai kunci untuk menghindari terjadinya keutuhan lembaga keluarga.

Ucapan terimakasih:

Kami ucapan kepada Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, Surakarta yang telah menyediakan pendanaan untuk pelaksanaan penelitian ini. Demikian juga ucapan terima kasih kepada para responden yang bersedia untuk mengisi angket penelitian yang kami lakukan, kami ucapan terimakasih telah bersedia membantu kami untuk melakukan penelitian ini.

Daftar Pustaka:

- Ajizah, N., & Khomisah. (2021). Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Perseptif Sadar Gender. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(1).
<https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i1.11908>
- Aliffiati, A., & Kaler, I. K. (2020). Struktur Kelas Dan Otonomi Perempuan Tengger Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. *Studi Budaya Nusantara*, 4(1).
- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful. (2017). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4(2), 129–135.
<https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>
- Anggraeniko, L. S., Kania, D., & Saepuloh, U. (2022). Marital Rape Sebagai Suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 24(1), 163–178.
<https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18453>
- Aprilianti, C. (2018). Otonomi Perempuan terhadap Tenaga Penolong Persalinan di Kota Palangka Raya. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 8((2)).
- Badan Pusat Statistik. (2017). Jumlah Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk (Pasangan Nikah), 2014-2016. Diambil dari <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html>
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2018). Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di *Drajat Tri Kartono, Argyo Demartoto, Fatwa Nurul Hakim, Chesa Amanda Marsela*

risis Keluarga dalam Perkembangan Otonomi Perempuan

- Provinsi Jawa Tengah 2017. Diambil dari <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/2/jumlah-pernikahan-dan-percerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2020). Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2019. Diambil dari <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-percerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Cohen, B. J. (1983). *Sosiologi: suatu pengantar*. (S. Simamora, Ed.). Jakarta: Bina Aksara.
- De Beauvoir, S. (2014). The Second Sex. Dalam *Classic and Contemporary Readings in Sociology*. <https://doi.org/10.4324/9781315840154-29>
- De Clercq, D., & Brieger, S. A. (2022). When Discrimination is Worse, Autonomy is Key: How Women Entrepreneurs Leverage Job Autonomy Resources to Find Work–Life Balance. *Journal of Business Ethics*, 177(3). <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04735-1>
- Doss, B. D., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2009). Marital therapy, retreats, and books: The who, what, when, and why of relationship help-seeking. *Journal of Marital and Family Therapy*, 35(1). <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2008.00093.x>
- Elsara, M., Munawarah, M., Wahyuni, S., & Casiavera. (2022). Women Delay Marriage in Malay Land. *Journal Of Sumatera Sociological Indicators*, 1(2).
- Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality: An Introduction Vol. 1*. New York: Vintage.
- Gunarsa, S. (2004). *Psikologi praktis: anak, remaja dan keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Herdiana, I. (2019). Resiliensi Keluarga : Teori, Aplikasi dan Riset. *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi)*, 14(1). <https://doi.org/10.30587/psikosains.v14i1.889>
- Hizi, G. (2018). Gendered Self-Improvement: Autonomous Personhood and the Marriage Predicament of Young Women in Urban China. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 19(4), 298–315. <https://doi.org/10.1080/14442213.2018.1481881>
- Latifi, Y. N., & Udasmoro, W. (2020). The Big Other Gender, Patriarki, dan Wacana Agama dalam Karya Sastra Nawāl Al-Sādāwī. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 19(1). <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.1-20>
- Lestari, S. (2012). *Psikologi keluarga : penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Malhab, S. B., Sacre, H., Malaeb, D., Lahoud, N., Khachman, D., Azzi, J., ... Salameh, P. (2021). Factors Related to Autonomy Among Lebanese Women: A Web-based Cross-sectional Study. *BMC Women's Health*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12905-021-01501-3>
- Mallick, R., & Chouhan, P. (2022). Impact of Women's Autonomy and Health Care Practices on Nutritional Status of U5 Children in The Slums of English Bazar Municipality of Malda District, India. *GeoJournal*, 87(3). <https://doi.org/10.1007/s10708-020-10347-5>
- Mayangsari, W., Prasetyo, F. A., & Wulandari, K. (2022a). Otonomi Perempuan dalam Mengambil Keputusan Menikah Kembali Pasca Perceraian Akibat Pernikahan Dini. *Journal of Urban Sociology*, 5(1). <https://doi.org/10.30742/jus.v5i1.2062>
- Mayangsari, W., Prasetyo, F. A., & Wulandari, K. (2022b). Otonomi Perempuan dalam Mengambil Keputusan Menikah Kembali Pasca Perceraian Akibat Pernikahan Dini. *Journal of Urban Sociology*, 5(1). <https://doi.org/10.30742/jus.v5i1.2062>
- Morton, W. L., Levy, M. J., Chang, P.-K., Han-Seng, C., Epstein, I., Band, C., ... James, R. E. (1950). The Family Revolution in Modern China. *International Journal*, 5(4). <https://doi.org/10.2307/40197536>
- Napa, W., Granger, J., Kejkornkaew, S., & Phuagsachart, P. (2020). Family happiness among people in a Southeast Asian city: Grounded theory study. *Nursing and Health Sciences*, 22(2). <https://doi.org/10.1111/nhs.12688>
- Naqiyah, N. (2005). *Otonomi perempuan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Novita, I. (2022). Peran Substitusi Suami Ketika Istri Bekerja di Sektor Tertentu. *Jurnal Forum Analisis Statistik (FORMASI)*, 2(2). <https://doi.org/10.57059/formasi.v2i2.32>
- Nurliana, N. (2019). Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka. *Jurnal Al Himayah*, 3(1).
- Nurrachmawati, A., Wattie, A. M., Hakimi, Moh., & Utarini, A. (2018). Otonomi Perempuan dan Tradisi dalam Pengambilan Keputusan Pemilihan Tempat dan Penolong Persalinan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 12(2).
- Obasohan, P. E., Gana, P., Mustapha, M. A., Umar, A. E., Makada, A., & Obasohan, D. N. (2019). Decision Making Autonomy and Maternal Healthcare Utilization among Nigerian Women. *International Journal of Maternal and Child Health and AIDS (IJMA)*, 8(1). <https://doi.org/10.21106/ijma.264>
- Paramita, D. F., Thohirun, & Baroya, N. (2017). Hubungan antara Otonomi Perempuan dan Persepsi terhadap Pelayanan Konseling KB dengan Unmet Need KB pada Pasangan Usia Subur. *e-Jurnal Pustaka*

- Kesehatan, Vol. 5, (No. 2), Mei2017, V(2).*
- Pebrialisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender, 18*(2), 33–42. <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26183>
- Permatasari, D. B. A. (2017). Resistensi Tokoh-tokoh Perempuan Terhadap Patriarki dalam Novel Garis Perempuan karya Sanie B Kuncoro. *JENTERA: Jurnal Kajian Sastra, 6*(2), 94. <https://doi.org/10.26499/jentera.v6i2.439>
- Repi, A. A., & Maliombo, N. E. (2022). Karir atau Hubungan, Manakah Pilihanku? Pengambilan Keputusan Menikah Pada Wanita Karir. *Psychopreneur Journal, 6*(2), 60–75. <https://doi.org/10.37715/psy.v6i2.2687>
- Rizkianti, A., Afifah, T., Saptarini, I., & Rakhmadi, M. F. (2020). Women's Decision-making Autonomy in The Household and The Use of Maternal Health Services: An Indonesian Case Study. *Midwifery, 90*. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102816>
- Rontos, K., Roumeliotou, M., Salvati, L., & Syrmali, M.-E. (2019). Marriage or Cohabitation? A Survey of Students' Attitudes in Greece. *Demografía English Edition, 60*(5). <https://doi.org/10.21543/dee.2017.1>
- Rusta, A., & Hairunnas, H. (2022). Motivasi Politik Kepala Desa Perempuan Di Provinsi Jawa Timur. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9*(6). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.27731>
- Saaka, M. (2020). Women's Decision-making Autonomy and Its Relationship with Child Feeding Practices and Postnatal Growth. *Journal of Nutritional Science, 9*. <https://doi.org/10.1017/jns.2020.30>
- Santrock, J. W. (2021). *Essentials of Life-Span Development, 7th ed.* New York: McGraw-Hill.
- Sier, W. (2021). Daughters' dilemmas: the role of female university graduates in rural households in Hubei province, China. *Gender, Place and Culture, 28*(10). <https://doi.org/10.1080/0966369X.2020.1817873>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sushartami, W. (2002). Perempuan lajang: Meretas identitas di luar ikatan perkawinan. *Jurnal Perempuan, 22*, 29–39.
- Susilo, R. K. D. (2020). Pilihan Rasional Individu Menikah pada Usia Dini di Kabupaten Trenggalek. *Publico: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial, 2*(2), 34–46. <https://doi.org/10.51747/publicio.v2i2.603>
- Sutrisminah, E. (2022). Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung, 50*(127).
- Synthesia, P., & Hartono, D. (2023). Pengaruh Karakteristik Wilayah dan Otonomi Perempuan terhadap Praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak. *Amerta Nutrition, 7*(2). <https://doi.org/10.20473/amnt.v7i2.2023.230-239>
- Tokan, F. B., & Gai, A. (2020). Partisipasi Politik Perempuan (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone - Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Caraka Prabu, 4*(2), 213–234. <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298>
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974).
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. (2009).
- Vaaler, M. L., Ellison, C. G., & Powers, D. A. (2009). Religious influences on the risk of marital dissolution. *Journal of Marriage and Family, 71*(4). <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2009.00644.x>
- Wulandari, D., & Fauziah, N. (2019). Pengalaman Remaja Korban Broken Home (Studi Kualitatif Fenomenologis). *Jurnal EMPATI, 8*(1). <https://doi.org/10.14710/empati.2019.23567>
- Wuryandari, R. D. (2022). Perempuan Dan Penerapan Etika Feminis Dalam Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan, 17*(1). <https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.111>
- Yuliantri, E., Nasution, F. A., Nasution, M., & Sutiarnoto. (2021). Affirmative Action HAM dalam Pemberdayaan Perempuan di Papua. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.168>
- Zaluchu, F. (2022). Understanding The Interaction Between Stunting and Women's Autonomy. *Inovasi, 19*(2). <https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.646>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).



Kearifan Lokal dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Saat Kebencanaan: Refleksi Pengalaman Masyarakat Saat Terjadi COVID-19

Suryani ^{1*} Tyas Eko Raharjo ¹ Soetji Andari ¹

¹ Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

* Korespondensi: sryanibpks@gmail.com; Tlpn. 087838259208

Diterima: 8 Mei 2023; Disetujui: 20 September 2023; Diterbitkan: 29 November 2023

Abstrak: Selama pandemi COVID-19, situasi sulit melanda Indonesia dan dunia secara luas. Banyak negara yang terkena dampak gelombang virus ini, yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana kearifan lokal dapat digunakan untuk memberikan layanan sosial kepada masyarakat selama pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran kearifan lokal dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Masyarakat. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui kearifan lokal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Kearifan lokal yang dapat didayagunakan dalam mengatasi kelangsungan hidup pada saat pandemi COVID-19 meliputi pengetahuan lokal, budaya lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, proses sosial, dan solidaritas kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial saat pandemi COVID-19. Di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan pengetahuan sosial masih kental dengan tradisi jimpitan. Hasil dari kegiatan tersebut setelah terkumpul dapat dipergunakan untuk membantu warga masyarakat yang terdampak COVID-19. Sedangkan di Kabupaten Kulonprogo muncul istilah *jogo tonggo* istilah dalam bahasa jawa yang mengandung makna menjaga antartetangga. Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat, selalu ada semangat saling memberi dan menolong antara sesama tetangga. Selain hal tersebut masih ada tradisi-tradisi yang dapat digunakan sebagai alat dalam memberikan layanan bagi warga yakni sifat gotongroyong yang selalu ada di dua lokasi tersebut. Sifat gotongroyong yang sampai saat ini masih dipertahankan. Rekomendasi perlu adanya kerjasama di antara pemerintah setempat dengan warga dalam melestarikan budaya lokal maupun tradisi yang dianggap dapat memberikan pertolongan bagi warga masyarakat pada saat wabah COVID-19 menyebar.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Kesejahteraan Sosial, Pandemi COVID-19

*Abstract: The COVID-19 pandemic was a problem that shook the Indonesian region and even the world level. Several countries in the world have been hit by an outbreak of the COVID-19 virus, which has resulted in an unstable economy. Therefore, the problem in this research is how local wisdom can provide social welfare services during the COVID-19 pandemic. This study aims to find local wisdom in providing social welfare services for the community. The research location was carried out in Gunungkidul Regency and Kulonprogo Regency. The method used is a qualitative approach. Local wisdom that can be utilized in coping with survival during the COVID-19 pandemic includes local knowledge, local culture, local skills, local resources, social processes, and group solidarity. The research results show that local wisdom can benefit the community in providing social welfare services. In Gunungkidul Regency, based on social knowledge, the jimpitan tradition is still strong. After being collected, the results of these activities can be used to help community members affected by COVID-19. At the same time, *jogo tonggo* is a term in Javanese that means guarding between neighbors. So, in society, there is always mutual giving and helping among neighbors. In addition, there are still traditions that can be used to provide services for residents, namely the cooperation between the two locations. This characteristic until now must be maintained. Recommendations that there needs to be cooperation between the local government and residents in preserving local culture and traditions that can assist citizens when the COVID-19 outbreak spreads.*

Keywords: Local Wisdom, Social Welfare, COVID-19 Pandemic

1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 adalah wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini dapat dengan mudah menular melalui kontak langsung dengan individu yang terinfeksi atau melalui sentuhan dengan permukaan yang telah terkontaminasi. Penyebaran virus ini telah terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jenis virus ini memiliki kemampuan penularan yang sangat cepat di berbagai negara (Carolina et al., 2022). World Health Organization (WHO) telah mengumumkan angka resmi jumlah korban pandemi COVID-19 selama periode 2020-2021. Menurut data dari lembaga ini, sekitar 14,9 juta orang, atau dalam kisaran yang lebih luas yaitu antara 13,3 hingga 16,6 juta orang, telah meninggal dunia akibat pandemi. Angka-angka tersebut berasal dari kasus kematian yang secara langsung terkait dengan pandemi COVID-19 dan diduga dipengaruhi olehnya. Data ini dikumpulkan oleh WHO mulai dari tanggal 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2021 (Rahadian, 2022).

Di Indonesia, kasus pertama terpapar COVID-19 teridentifikasi pada Senin, 2 Maret 2020, melibatkan dua warga Depok, Jawa Barat. Sejak saat itu, kasus COVID-19 terus bertambah, bahkan mengalami lonjakan kasus di pertengahan tahun 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), merespons lonjakan kasus ini di banyak negara, mendorong setiap negara untuk serius dalam upaya pencegahan COVID-19, karena semua negara memiliki potensi terpapar virus ini.

Pemerintah Indonesia juga telah mengambil tindakan antisipasi dan langkah penanganan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 serta mengurangi dampak negatifnya. Upaya ini dicatat dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 13 Maret 2020. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, ditunjuk sebagai ketua gugus tugas ini. Keputusan Presiden tersebut memberi mandat kepada gugus tugas untuk: 1) melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan virus corona, 2) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan virus corona, 3) melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan virus corona, dan 4) menyediakan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan virus corona. Ketua gugus tugas ini berkewajiban melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden. Keputusan Presiden ini kemudian direvisi menjadi Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 (Nurmasari, 2020; Wardhana et al., 2021).

Selain pembentukan Gugus Tugas, pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 21 Maret 2020. PSBB bertujuan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 melalui pembatasan pergerakan orang dan barang antar provinsi, kabupaten, dan kota. PSBB juga mencakup penghentian sementara sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan berkerumun seperti kegiatan keagamaan dan penggunaan fasilitas umum (Susetio et al., 2021). Untuk memudahkan pelaksanaan langkah-langkah pembatasan sosial ini, diterbitkan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang memuat pedoman pelaksanaan PSBB. Kebijakan ini dipilih oleh pemerintah sebagai alternatif yang lebih sesuai daripada lockdown yang memerlukan isolasi setiap keluarga atau warga di rumah selama beberapa hari (Arina et al., 2022).

Penanganan COVID-19 di Gunungkidul melibatkan berbagai aspek, termasuk kearifan lokal dan kerjasama antara pemerintah daerah, komunitas, dan sektor kesehatan. Beberapa contoh tindakan yang dilakukan adalah penggunaan masker tradisional, edukasi melalui budaya lokal seperti tarian dan lagu tradisional, kerjasama dengan perajin lokal untuk produksi alat pelindung diri (APD), pembentukan posko kesehatan lokal, penyuluhan dalam bahasa lokal, dan mungkin juga pembatasan pergerakan sesuai dengan kearifan lokal. Semua ini mencerminkan bagaimana kearifan lokal dan budaya berkontribusi dalam penanganan COVID-19 di Gunungkidul dengan menggabungkan nilai-nilai tradisional dan kerjasama komunitas untuk melindungi kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah di

beberapa kecamatan mungkin menerapkan pembatasan pergerakan penduduk sesuai dengan kebijakan lokal guna mengendalikan penyebaran virus. Tindakan-tindakan ini mencerminkan peran kearifan lokal dan budaya dalam upaya penanganan COVID-19 di Gunungkidul, dengan menggabungkan nilai-nilai tradisional dan kerjasama komunitas untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Wabah COVID-19 dapat menular pada siapa saja baik anak, remaja, dewasa, maupun lanjut usia, yang penanganannya perlu melibatkan berbagai pihak di antaranya pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial, dan warga masyarakat peduli. Pada kenyataan di lapangan selama pandemi COVID-19, banyak kelompok warga masyarakat yang secara mandiri dan berswadaya ikut serta atau berperan dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban atau warga yang terdampak pandemi COVID-19. Hasil penjajagan seorang tokoh masyarakat di Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul Guyono (65 tahun) menyatakan, bahwa dalam kondisi merebaknya wabah COVID-19, warga masyarakat yang mau ikut berperan dalam penanganan korban COVID-19 dan bersedia memberikan layanan kesejahteraan sosial bagi mereka yang terdampak (Susantyo et al., 2023), hanyalah bermodal ketahanan baik secara fisik, psikis, mental psikologis, maupun secara sosial. Pernyataan lain dalam situasi mewabahnya pandemi COVID-19 yang mengancam seluruh warga, maka masyarakat yang peduli dan bersedia memberikan layanan bagi warga lain yang menjadi korban COVID-19 atau orang yang terdampak, adalah mereka yang berketahtaan sosial. Masyarakat berketahtaan sosial menurut Harun Sunarso adalah masyarakat yang aktif, mandiri, dan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai macam masalah. Masyarakat berketahtaan sosial (Irmayani et al., 2022) adalah masyarakat yang di antaranya mempunyai kemampuan menggali kearifan lokal dalam memelihara sumberdaya alam dan sumberdaya sosial (Irmayani et al., 2019).

Mengacu pendapat di atas dan tentu disesuaikan dengan konteks penelitian ini, masyarakat berketahtaan sosial adalah masyarakat yang memiliki kemampuan menghadapi berbagai macam permasalahan sosial sebagai dampak merebaknya pandemi COVID-19 dan mampu menggali dan mendayagunakan berbagai bentuk kearifan lokal yang dimiliki (Torrido, 2021). Pada era otonomi daerah saat ini sudah waktunya untuk senantiasa menggali dan mendayagunakan kearifan lokal dalam penanganan berbagai macam permasalahan sosial, termasuk penanganan masalah sosial dampak COVID-19. Langkah ini berdasarkan pengalaman masa sebelum otonomi daerah, dimana penanganan permasalahan sosial menggunakan model yang dikelola oleh pemerintah pusat secara seragam, tanpa mempertimbangkan karakteristik dan keunikan masyarakat setempat. Pengalaman ini telah memastikan bahwa pendekatan tersebut memicu konflik dan tidak mencapai kesuksesan yang diharapkan. Bagian pengantar Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999 dengan tegas dan jelas mengarahkan bahwa prinsip otonomi daerah adalah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan dan partisipasi Masyarakat (Mayer Hayrani DS, 2018). Keberhasilan yang diharapkan seharusnya bergantung pada pertumbuhan dan perkembangan inisiatif, prakarsa, dan kreativitas warga masyarakat (*bottom-up*), baik dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, merencanakan program kerja, melaksanakan kegiatan, maupun mengevaluasi hasil kegiatan (Anak Agung Sagung Alit Widyastuti & Mardiana, 2022).

Seiring dengan prinsip otonomi daerah, setiap wilayah di Indonesia dalam menangani masalah sosial, termasuk dampak pandemi COVID-19, seharusnya menggunakan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Kearifan lokal ini dikembangkan oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat, sehingga implementasinya tidak memerlukan banyak penyesuaian atau sosialisasi karena warga setempat telah memahaminya (Sholihatin et al., 2020). Oleh karena itu, penanganan masalah sosial oleh masyarakat setempat dimulai dengan identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan

program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan pengawasan, yang seharusnya berjalan alami sesuai dengan karakteristik dan keunikan warga setempat. Dengan demikian, upaya masyarakat dalam mengatasi dampak COVID-19 melalui pelayanan kesejahteraan sosial dapat berhasil dengan baik melalui pemanfaatan kearifan lokal di daerah setempat (Achmad Fathoer Choer et al., 2022).

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang program desa tangguh, di mana desa harus menciptakan inovasi dan menggunakan kearifan lokal untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Penanganan COVID-19 melalui desa tangguh ini efektif dan diterima baik oleh masyarakat pedesaan serta membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus (Budhy Santoso, 2023). Terdapat empat alasan yang melandasi betapa penting pendayagunaan kearifan lokal dalam upaya penanganan risiko bencana, yang tentu dapat diadopsi dalam meminimalisasi risiko bencana sosial seperti dampak pandemi COVID-19. Pertama, berbagai praktik dan strategi spesifik dalam kearifan lokal terbukti sangat berharga dalam menghadapi bencana, yang ternyata dapat ditransfer dan diadopsi oleh komunitas lain yang menghadapi situasi serupa. Kedua, pemanfaatan kearifan lokal ke dalam praktik dan kebijakan yang ada mampu mendorong partisipasi masyarakat yang terkena bencana sehingga mengambil peran utama dalam semua kegiatan untuk tujuan pengurangan risiko, yang dalam hal ini dampak sosial ekonomi COVID-19 (Lelisari et al., 2020). Ketiga, informasi yang terkandung dalam kearifan lokal dapat membantu meningkatkan pelaksanaan program dengan memberikan informasi yang berharga tentang konteks di daerah setempat. Keempat, cara penyebarluasan kearifan lokal yang bersifat non formal memberi contoh baik upaya pendidikan dalam hal pengurangan risiko bencana termasuk bencana sosial dampak COVID-19 (Hanif, 2021).

Penelitian ini pada dasarnya ingin melihat pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat pada saat terjadi kebencanaan. Sesuai dengan topik yang diajukan, maka penelitian ini pada intinya ingin melakukan refleksi pengalaman masyarakat saat terjadi pandemi COVID-19. Tindakan arif dari masyarakat yang berbentuk keswadayaan sosial selama menangani korban COVID-19, seperti melakukan pertolongan pertama, penyediaan tempat isolasi, pengadaan sembako, dan bantuan lain menjadi fokus dari kajian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keberadaan bentuk kearifan lokal yang digali dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial selama pandemi COVID-19 di daerah kajian. Pernyataan konsep dari permasalahan penelitian ini diformulasikan dalam bentuk dua pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat di daerah kajian memanfaatkan kearifan lokal dalam upaya meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial selama masa pandemi COVID-19.
2. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai bentuk kearifan lokal yang digunakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial selama masa pandemi COVID-19 di daerah kajian.

Hasil penelitian ini menggali berbagai bentuk, pengertian, proses, dan makna kearifan lokal yang dimanfaatkan masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial selama pandemi COVID-19 di lokasi kajian. Diharapkan, penelitian ini memberikan dua manfaat utama. Pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga/pihak berkompeten dalam menyusun dan menetapkan kebijakan penanganan dampak sosial pandemi COVID-19. Kedua, menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya sebagai referensi mengenai kearifan lokal dan dampak sosial pandemi COVID-19, yang tersaji dalam publikasi ilmiah.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif naratif. Tujuannya adalah untuk menyajikan deskripsi mendalam mengenai fenomena

pandemi COVID-19 melalui interpretasi yang mendalam terhadap narasi individu atau kelompok yang mengalami situasi terkait pandemi. Pendekatan ini menekankan pada penyusunan deskripsi rinci mengenai fenomena yang diobservasi. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metode kualitatif bertujuan untuk mengungkap secara menyeluruh fenomena yang diteliti, mengikuti konteksnya yang holistik dan mendalam, melalui pengumpulan data di lingkungan alami dan dengan memanfaatkan informan sebagai instrumen utama (Malla et al., 2020). Miles dan Huberman (2004) juga mempertegas kegunaan dari pendekatan ini, menunjukkan bahwa peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Studi ini bersifat deskriptif, yang, sesuai dengan Usman dan Akbar (2008), melibatkan penggambaran minimal tiga aspek: karakteristik pelaku, aktivitas atau peristiwa yang terjadi selama periode penelitian, serta situasi atau karakteristik tempat di mana penelitian dilaksanakan (Lefia & Raihana, 2023).

Lokasi pengumpulan data ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, yang meliputi pemilihan beberapa wilayah di mana dianggap masyarakat setempat masih memegang teguh dan mengaplikasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Alasan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo, yang didasarkan pada kriteria masyarakat yang masih lekat dan mendayagunakan nilai kearifan lokal dalam melaksanakan kegiatan keseharian adalah sebagai berikut:

1. Relevansi dengan Tujuan Penelitian: Lokasi ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat digunakan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial selama pandemi COVID-19. Dengan memilih lokasi yang memiliki kearifan lokal yang masih aktif digunakan, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik dan implementasi nilai-nilai tersebut.
2. Konteks Budaya yang Kaya: Lokasi dengan masyarakat yang masih mempraktikkan kearifan lokal cenderung memiliki warisan budaya yang kaya. Ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya memengaruhi cara masyarakat merespons dan mengatasi tantangan seperti pandemi COVID-19.
3. Potensi Solusi Inovatif: Masyarakat yang masih mendayagunakan nilai kearifan lokal telah mengembangkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi dampak pandemi. Penelitian ini dapat mengidentifikasi praktik-praktik ini dan berpotensi memberikan masukan yang berharga bagi upaya penanganan pandemi di tempat lain.
4. Keterlibatan Komunitas yang Aktif: Lokasi ini dapat melibatkan komunitas yang aktif dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai kearifan lokal. Keterlibatan komunitas ini dapat mendukung proses penelitian dengan memungkinkan akses yang lebih baik ke informasi dan informan kunci.

Dengan demikian, pemilihan lokasi penelitian yang sesuai dengan kriteria ini dapat memastikan bahwa penelitian akan memberikan wawasan yang mendalam dan relevan tentang bagaimana kearifan lokal berperan dalam upaya pelayanan kesejahteraan sosial selama pandemi COVID-19.

Sumber data pada penelitian ini berasal dari beberapa informan yang terdiri dari individu yang dianggap memiliki pemahaman yang baik dan bisa menyediakan informasi yang jelas dan langsung mengenai kearifan lokal masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial selama pandemi COVID-19. Serangkaian pertanyaan telah dirancang untuk menggali dan memahami secara holistik fokus kajian hingga mencapai jawaban yang diharapkan. Informan dalam studi ini meliputi warga umum, tokoh formal seperti ketua RT/RW, dukuh, dan lurah atau aparat desa, serta tokoh informal seperti pemuka masyarakat, tokoh agama, dan ketua atau pengurus organisasi kepemudaan dan kelompok seni budaya. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti akan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Penelitian ini berfokus pada pengungkapan kearifan lokal dalam pelayanan kesejahteraan sosial selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengintegrasikan tiga teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan penelaahan dokumentasi. Wawancara langsung dilakukan kepada informan terpilih untuk mendapatkan

perspektif mendalam mengenai bentuk dan nilai kearifan lokal. Teknik observasi melibatkan pencatatan langsung dari fenomena yang terkait dengan kearifan lokal, sementara penelaahan dokumentasi membantu dalam memperkaya data melalui pengumpulan dokumen relevan dari sumber cetak dan elektronik. Proses analisis mengikuti pendekatan deskriptif kualitatif, menguraikan data secara naratif berdasarkan perspektif responden dan mempertimbangkan latar belakang perilaku mereka. Langkah-langkah analitis ini, yang mengacu pada pandangan Miles, Huberman, dan Saldana (2014), mencakup reduksi data, display data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan, bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang holistik dan mendalam mengenai kearifan lokal yang terlibat.

Analisis informasi dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah mengungkap kearifan lokal masyarakat dalam menjalankan pelayanan kesejahteraan sosial di tengah pandemi COVID-19, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam teknik ini, data diurai menjadi narasi yang menggambarkan pendapat responden secara apa adanya, bersandar pada pertanyaan penelitian yang diajukan. Analisis ini juga mencakup pemahaman mendalam terhadap latar belakang perilaku responden, yang kemudian diolah melalui reduksi, triangulasi, penafsiran, dan verifikasi. Husaini Usman dan Purnomo Setiady (2017) menekankan bahwa penelitian kualitatif harus menggambarkan minimal tiga aspek: karakteristik individu yang terlibat, kejadian selama periode penelitian, dan konteks atau lingkungan tempat penelitian dilaksanakan(Usman & Akbar, 2017).

Data yang dikumpulkan termasuk pendapat, sikap, pandangan, dan catatan lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan telaah dokumen dikelompokkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Analisis lebih lanjut dilakukan dengan mengaitkan pernyataan dari masyarakat dengan hasil observasi dan telaah dokumen, memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam (Wijaya, 2018). Setiap data diberi makna melalui uraian dan penjelasan yang jelas, sesuai dengan kaidah metodologi kualitatif. Proses ini meliputi tiga langkah: reduksi data, display data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Hasil dan Pembahasan Penelitian

3.1. *Implementasi nilai kearifan lokal berdasarkan pengetahuan lokal*

Hasil penelitian ini menyoroti peran kearifan lokal dalam pelayanan kesejahteraan sosial selama masa bencana, yang saat ini dihadapi akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo. Kearifan lokal, yang mencakup identitas dan tradisi budaya daerah tersebut, memberikan solusi unik dan spesifik untuk mengatasi tantangan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi. Karakteristik khas ini tidak hanya menciptakan jati diri unik untuk daerah tersebut, tetapi juga membuka jalan untuk implementasi strategi pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih berdampak. Diskusi lebih lanjut akan menggali nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal berdasarkan berbagai dimensi seperti pengetahuan lokal, budaya lokal, keterampilan lokal, pemanfaatan sumber daya setempat, proses-proses sosial, dan solidaritas kelompok.

Pengetahuan lokal di masyarakat Gunungkidul mencakup keterampilan dan filosofi berbasis pengetahuan tradisional dan teknologi, termasuk kearifan lokal dalam penanganan COVID-19 (Diva Putra et al., 2020). Ini memunculkan konsep inisiatif dan teknologi lokal, yang tercermin dalam praktik sehari-hari seperti gotong royong dan jimpitan, yang merupakan pengumpulan dana untuk membantu anggota komunitas yang membutuhkan, terutama selama pandemi (Hidayat et al., 2021). Selain itu, ada kegiatan keagamaan yang

bertujuan untuk memberikan dukungan rohani kepada warga agar bisa menghadapi krisis dengan tenang dan semangat yang tidak luntur. Tradisi lain yang masih terjaga adalah rembug warga, yaitu musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama dengan mencari solusi yang disepakati bersama. Ini mencerminkan nilai kebersamaan dan kerjasama yang kental dalam masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

Relawan Kulonprogo dengan rasa kemanusiaan yang tinggi memilih hadir untuk mengikuti pelatihan pemulasaran jenazah terindikasi COVID-19. Tujuan diadakannya pelatihan tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi relawan dalam melakukan pamulasara jenazah penderita COVID-19(Sormin et al., 2020). Ketika melaksanakan tugas dilapangan para relawan tidak menimbulkan ekses yang negatif, namun demikian selain mementingkan kesehatan relawan juga diharapkan selalu memperhatikan tata cara pemulasara jenash secara kearifan lokal yang berlaku. Berikut fenomena kearifan lokal dalam pelayanan kesejahteraan sosial korban COVID-19(Mutmainnah et al., 2020).

Fenomena kearifan lokal dalam dimensi pengetahuan lokal menjadi *cultural power* dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Pengetahuan lokal ini juga untuk penanganan dalam pemecahan masalah dan penanganan masalah kebencanaan wabah penyakit, seperti COVID-19(Biddlestone et al., 2020). Pengetahuan lokal ternyata penting dalam kehidupan masyarakat sekarang ataupun yang akan datang. Thomas Lickona menyebutkan terdapat sepuluh kehancuran suatu bangsa disebabkan karena akar budaya mulai luntur dalam masyarakat, hal ini nilai-nilai kearifan lokal sudah tidak bisa menjadi pengetahuan lokal bagi masyarakat. Lunturnya nilai kearifan lokal tersebut seperti pada rendahnya tanggung jawab sebagai seseorang dan warga negara, menurunnya etos kerja, saling curiga dan kurang peduli pada sesama(Fitria, 2017).

Kearifan lokal masyarakat Kulonprogo dapat memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam mengatasi wabah COVID-19 dengan sebutan *jogo tonggo* sebagaimana yang dicanangka Gubernur Jawa Tengah. *Jogo tonggo* sejatinya mengandung nilai kearifan lokal dalam dimensi pengetahuan lokal (*local knowledge*), kecerdasan lokal (*local genius*), sekaligus kearifan lokal (*local wisdom*). Kearifan lokal tersebut dapat melahirkan solusi efektif dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan Masyarakat (Riantika & Hastuti, 2019). Ungkapan *jogo tonggo* tersebut ternyata terus dijaga dan dilakukan masyarakat kulonprogo tidak hanya berorientasi pada masa pandemi saja, namun lebih pada kehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat. *Jogo tonggo* ini sebenarnya memiliki makna yang luas yang dikemas dalam bahasa jawa *jogo* yang berarti menjaga dan *tonggo* mempunyai arti tetangga, sehingga bila di rangkai bermakna menjadi tetangga dari permasalahan yang dialami. Tetangga yang dimaksud tersebut bukan hanya hubungan strategis sesama manusia tetapi menjaga lingkungan, alam, dan hubungan dengan Tuhan, sehingga tercipta keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam semesta sebagai lingkungan (Hestiningsih et al., 2022).

3.2. Implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Masa COVID-19 melalui nilai kearifan lokal dan budaya lokal

Implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Masa COVID-19 melalui nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal adalah pendekatan yang mengintegrasikan tradisi, nilai, dan praktik budaya setempat dalam upaya penanganan pandemi. Ini mencakup penyampaian

informasi dan edukasi tentang COVID-19 dengan memanfaatkan bahasa dan simbol-simbol budaya, pelibatan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kesejahteraan, serta pemanfaatan pengetahuan tradisional dalam perawatan kesehatan. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong solidaritas sosial dalam masyarakat, menghormati adat istiadat dalam penanganan jenazah COVID-19, dan mendukung ekonomi lokal dengan produksi masker dan produk sanitasi berdasarkan warisan budaya. Dengan cara ini, implementasi pelayanan kesejahteraan sosial dapat lebih efektif dan sesuai dengan konteks budaya dan komunitas setempat.

Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk merancang program-program kesejahteraan sosial yang lebih sesuai dengan karakter dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Gunungkidul. Dengan memanfaatkan kearifan lokal dan budaya setempat, pelayanan kesejahteraan sosial dapat menjadi lebih relevan dan diterima oleh masyarakat, sehingga meningkatkan efektivitas dan dampak positifnya. Selain itu, implementasi ini juga membantu memperkuat identitas budaya dan kearifan lokal di Gunungkidul. Melalui program-program kesejahteraan sosial yang menghormati dan memanfaatkan nilai-nilai budaya setempat, masyarakat dapat merasa lebih terhubung dengan akar budaya mereka dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam upaya perbaikan kesejahteraan sosial di wilayah mereka. Dengan demikian, implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui nilai kearifan lokal dan budaya lokal di Gunungkidul memiliki potensi untuk menciptakan dampak yang positif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Masyarakat Gunungkidul memiliki banyak ragam budaya yang masih harus dijaga dan dilestarikan sampai saat ini. Salah satunya adalah *budaya rasulan* yang setiap tahun dirayakan di setiap wilayah Gunungkidul. Budaya tersebut diantaranya berupa tarian *janggrung* yang berada di wilayah Semanu, *Reog* dan *jathilan* hampir semua wilayah gunungkidul memiliki. Selain itu masih juga ada budaya yang setiap *rasulan* selalu dilaksanakan yakni wayang kulit yang diselenggarakan semalam suntuk. *Campsursari* juga merupakan budaya yang tidak ketinggalan dalam pelaksanaan *rasulan*.

Di era modernisasi dan globalisasi, budaya *rasulan* di Kabupaten Gunungkidul masih dipertahankan sampai saat ini. Budaya *rasulan* sendiri masih sangat akrab bagi masyarakat yang ada di Gunungkidul, salah satunya di Desa Paliyan, Planjan, Karangmojo, Tepus, Semanu, Playen dan di berbagai desa lainnya. *Rasulan* atau bersih desa merupakan wujud syukur dari masyarakat kepada Tuhan atas hasil panen yang mereka dapatkan. Dalam tradisi ini masyarakat biasanya banyak menggelar kegiatan kesenian atau pegejelan budaya seperti *reog*, *jathilan*, wayang kulit, dan *campsursari*. Budaya ini memberikan ikatan tersendiri bagi warga karena adanya ikatan persaudaraan dengan saling berkunjung, serta kuatnya kebersamaan antar warga. Banyak nilai yang dapat kita ambil diantaranya nilai kebersamaan, nilai gotong royong dan kesetiakawanan sosial. Hal ini dapat diperlihatkan pada saat pandemi COVID-19, disitu terjalin nilai kepedulian diantara sesama. Selain budaya, di wilayah Gunungkidul juga ada daerah wisata diantaranya Air Terjun Sri Gethuk serta Guo Pindul. Hal ini menyebabkan adanya daya jual dan pengelolaan yang baik membuat kedua tempat tersebut menjadi salah satu tujuan para wisatawan yang ada. Selain kedua tempat wisata tersebut yang mampu memberikan kekuatan bagi perekonomian di Kabupaten

Gunungkidul salah satu yang menjadi tujuan utamanya adalah daerah pantai. Apabila pemerintah dalam pengelolaannya baik administrasi maupun infrastruktur akan memberikan daya perekonomian yang cukup kuat.

Masyarakat Kulonproga memiliki tradisi budaya lokal dengan mengutamakan kerukunan, bahwa kerukunan menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Melakukan kerukunan dalam bermasyarakat bukan disalah artikan sebagai sikap *altruis* melawan sikap egois (Fran Magnis, 2001). Sikap kerukunan tersebut terlihat nyata dalam kehidupan bersama dalam melakukan hidup untuk saling meringankan beban setiap warga. Adanya saling tolong menolong untuk membantu dalam mendirikan rumah. Hidup kebersamaan dalam bermasyarakat bergotong royong untuk meringankan pekerjaan bersama. Lebih terlihat nyata pada saat terjadinya wabah COVID-19 tahun 2021, kehidupan masyarakat Kulonprogo dengan *sakyok saeko kapti* bersatu untuk membantu tetangga yang sedang terpapar COVID-19. Mereka telah mengakui bahwa tetangga dekat adalah saudara atau keluarga di masyarakat, sehingga masyarakat kulonprogo berprinsip tetangga dekat menjadi persaudaraan terpenting dalam kehidupan bermasyarakat setelah keluarga. Kehidupan bertetangga dapat diharapkan bantuan dalam berbagai kondisi terlebih jika mengalami kondisi darurat. Kehidupan tetangga dalam solidaritas desa di kulonprogo memiliki rasa emosional tinggi, karena masyarakat mengaku sebagai satu keluarga inti yang besar.

Pelayanan kesejahteraan sosial yang berjalan secara mandiri di Kulonprogo dilakukan secara spontan oleh masyarakat setempat, terutama di desa-desa. Hal tersebut tampak nyata pada saat warga terpapar COVID-19. Budaya rukun masih tetap nyata dapat dilakukan masyarakat dengan prinsip budaya yang mereka miliki adalah "*tonggo iku podho karo bapa biyung*" yang memiliki arti bahwa kehidupan bertetangga itu sama dengan hidup dalam keluarga sama dengan bapak dan ibu. Hal ini adalah masyarakat kulonprogo memiliki penghormatan yang tinggi terhadap keberadaan hidup bertetangga. Dengan demikian terjadilah relasi harmoni selayaknya hidup dalam keluarga sendiri.

3.3. Implementasi Kesejahteraan Sosial dan nilai kearifan lokal dalam mengatasi COVID-19

Implementasi kesejahteraan sosial dan nilai kearifan lokal dalam mengatasi COVID-19 adalah langkah yang berharga dalam memerangi pandemi ini. Dengan memadukan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial dan kebijakan kesehatan yang menghormati budaya setempat, masyarakat dapat lebih mudah memahami, menerima, dan mengikuti langkah-langkah pencegahan. Selain itu, melibatkan komunitas, pemimpin lokal, dan sumber daya budaya dalam upaya penanganan COVID-19 dapat memperkuat solidaritas sosial dan membantu menjaga warisan budaya, menjadikan pandemi ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kekayaan budaya masyarakat.

Masyarakat Gunungkidul memiliki keterampilan lokal yang luar biasa dalam pertanian, yang menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam keluarga mereka. Alat-alat tradisional seperti pacul, gathul, arit, dan bancol masih sangat diperlukan dalam pertanian mereka. Lahan pertanian di Gunungkidul mencakup sawah, tegalan, dan pekarangan, dengan sawah dan tegalan dianggap sebagai "*cepengan urip*" atau sumber kehidupan. Petani di sana menggunakan strategi dan pengetahuan lokal mereka untuk mengelola lahan mereka dengan baik demi memenuhi kebutuhan hidup. Mereka mempertimbangkan jenis tanaman yang tepat, alat pertanian yang digunakan, dan aspek

lainnya untuk mengoptimalkan hasil panen. Tegalan, sebagai lahan kering, tidak memerlukan penggenangan air seperti sawah, dan hampir semua petani di daerah ini memiliki lahan tegalan yang mereka terasering untuk menghindari erosi. Lahan ini terletak di luar pemukiman penduduk dan seringkali memberikan sumber makanan untuk ternak dan kebutuhan sehari-hari. Selama pandemi COVID-19, lahan tegalan ini menjadi sangat berharga karena memungkinkan masyarakat memenuhi sebagian besar kebutuhan mereka, termasuk sayuran yang sangat diperlukan, sehingga meringankan beban keluarga yang terkena dampak pandemi tersebut.

Pekarangan, serupa dengan tegalan, merupakan lahan kering, namun perbedaannya terletak pada adanya bangunan rumah di tengahnya sebagai tempat tinggal. Bangunan rumah ini menjadi ciri khas yang membedakan antara pekarangan dan tegalan (Stoler, 1978). Pekarangan yang biasanya terletak di belakang rumah digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pemeliharaan ternak dan penanaman sayuran seperti lombok, terong, bayam, dan sejenisnya, yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pepohonan seperti mangga, papaya, kelapa, pisang, dan pohon yang berguna sebagai pakan ternak seperti maoni dan munggur ditanam di samping rumah.

Di bidang peternakan, hampir setiap rumah di masyarakat Gunungkidul memelihara hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, itik, atau unggas lainnya. Kotoran hewan-hewan tersebut digunakan sebagai pupuk kandang yang sangat berguna untuk memupuk tanaman. Selain itu, hewan ternak juga dikembangbiakkan dan dijadikan tabungan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa pekarangan memiliki fungsi ekonomis yang signifikan bagi penduduknya. Pekarangan juga memiliki fungsi sosial yang penting, terutama dalam konteks berbagi dan peduli sesama warga di desa Gunungkidul. Masyarakat sering berbagi hasil panen atau lauk-pauk dengan tetangga mereka, dan praktik ini sangat membantu warga yang terdampak COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, di Gunungkidul, terdapat keterampilan lokal yang unik dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pelaksanaan upacara "ujub" saat menghormati arwah keluarga yang telah meninggal. Upacara ini dilakukan secara bersama-sama dengan tetangga, di mana warga membuat tempat sajian atau wadah makanan dari daun pisang dan daun kelapa yang dianyam. Hal ini menciptakan kerukunan dalam komunitas dan menjadi contoh nyata tentang kekayaan budaya dan tradisi lokal yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gunungkidul.

Pada masa pandemi COVID-19 warga juga melakukan kerukunan membantu tetangga yang terpapar dengan menyediakan fasilitas kebutuhan warga yang sedang menjalani isolasi secara mandiri. Bantuan penyediaan sarana tersebut dengan membuat tempat/wadah makanan dari bahan bambu dan kayu, sehingga membentuk menjadi alemari yang bisa untuk menaruh makanan dari para tetangga yang peduli mengirim kebutuhan makan warga terpapar. Pemanfaatan wadah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penyimpanan sembako atau *lumbung bantuan sembako* bagi warga terpapar. Tradisi dalam menyediakan sarana kegiatan masyarakat (*membuat takir, wadah nasi/kathokan, dan lumbung bantuan sembako*) tersebut merupakan keterampilan lokal yang diciptakan warga berdasar pada pemanfaatan bahan lokal yang telah tersedia di lingkungan sekitar.

3.4. Implementasi Kesejahteraan Sosial dan nilai kearifan dan sumber daya lokal dalam menangani COVID-19

Implementasi Kesejahteraan Sosial dan nilai kearifan lokal berdasarkan sumber daya lokal dalam menangani COVID-19 melibatkan pemanfaatan pengetahuan, tradisi, sumber daya alam, dan keterampilan yang tersedia di dalam komunitas untuk merespons pandemi ini. Ini mencakup edukasi COVID-19 yang disesuaikan dengan budaya lokal, produksi dan distribusi masker dan perlengkapan kesehatan dari sumber daya lokal, serta menggalang dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya dan sumber daya lokal, implementasi ini dapat lebih efektif dalam mengkomunikasikan pesan kesehatan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memperkuat solidaritas komunitas dalam menghadapi pandemi.

Modal utama masyarakat di Gunungkidul adalah sumber daya lokal seperti paguyuban, kelompok tani, Karang Taruna, dan kelompok pengajian. Sumber daya lokal ini sejatinya menjadi aset berharga dalam upaya pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera dan makmur. Potensi dan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh warga Gunungkidul dapat digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Sebagai contoh, selama pandemi, ketika sebagian masyarakat harus menjalani isolasi mandiri (isoman) dan tidak dapat beraktivitas seperti biasa, lembaga-lembaga sosial tersebut memainkan peran penting dalam menyediakan bantuan berupa paket sembako kepada keluarga yang terdampak. Ini terjadi atas dasar swadaya dan spontanitas warga setempat yang bersatu untuk mengumpulkan dana dan sembako guna membantu warga yang membutuhkan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam keluarga, diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan hasil alam dari lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu, penting untuk memberdayakan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi lokal yang dapat meningkatkan nilai ekonomis bagi warga setempat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dengan merujuk pada Undang-Undang ini, dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam keluarga, diperlukan pengembangan potensi lokal secara mandiri oleh masyarakat.

Saling menghormati terhadap tetangga adalah nilai penting dan wajib dalam perilaku masyarakat Kulonprogo. Tetangga dianggap sebagai keluarga yang selalu dapat memberikan perhatian, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan ungkapan yang menjadi prinsip hidup masyarakat, yaitu "Sing sopo ora seneng tetanggan kalebu wong kang ora becik," yang berarti bahwa mereka yang tidak suka hidup bertetangga adalah orang yang tidak baik. Nilai ini telah meresap dalam setiap individu dan mengatur interaksi sehari-hari. Namun, meskipun pentingnya tetangga diakui, masyarakat juga diajarkan untuk tetap bersikap baik kepada individu yang mungkin tidak baik dalam pergaulan tetangga. Warga tidak diizinkan untuk memusuhi tetangga mereka, sehingga muncul ungkapan yang mengajak masyarakat untuk selalu bersikap baik terhadap sesama, yaitu "Tangga kang ora becik atine ojo dicedaki, nanging ojo dimusuhi." Ungkapan ini memberi peluang bagi warga yang melakukan

tindakan yang kurang baik untuk berubah, sehingga diharapkan agar semua tetap saling berbuat kebaikan satu sama lain (Syahrul & Nurhafizah, 2022).

Beberapa ungkapan ini yang menjadi dasar bagi perilaku masyarakat merupakan sumber daya lokal yang berharga dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Selama pandemi COVID-19, nilai-nilai seperti hidup bertetangga yang baik menjadi kunci dalam penanganan kasus yang terinfeksi. Masyarakat Kulonprogo menerapkan isolasi mandiri dengan dukungan tetangga mereka. Mereka secara swadaya menyediakan kebutuhan bagi mereka yang terpapar COVID-19, seperti penyediaan paket sembako yang diatur oleh setiap tetangga secara bergilir. Berbagai organisasi sosial juga turut aktif dalam mengelola bantuan sembako bagi warga yang menjalani isolasi mandiri.

3.5. Implementasi kesejahteraan sosial dalam masyarakat melalui kearifan lokal di masa pandemi COVID-19

Implementasi kesejahteraan sosial dalam masyarakat melalui kearifan lokal selama pandemi COVID-19 melibatkan pemanfaatan budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai lokal sebagai aset utama dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi pandemi. Ini mencakup upaya seperti penggunaan masker dengan motif khas daerah, pemberdayaan komunitas lokal dalam mendistribusikan bantuan, pendekatan edukasi yang mengintegrasikan elemen budaya, pengembangan usaha lokal yang sesuai dengan tradisi setempat, konsultasi dengan pemimpin adat, penggalangan dana komunitas, dan pemanfaatan pengetahuan pengobatan tradisional jika relevan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya membantu masyarakat menghadapi dampak pandemi, tetapi juga memperkuat identitas budaya mereka serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara holistik.

Kepedulian warga masyarakat Gunungkidul terhadap sesama sangat tinggi, hal ini terbukti bahwa pada saat masa pandemi saling membantu. Kerukunan warga sangatlah dipertahankan demi terwujudnya kesejahteraan dalam keluarga. Apabila ada salah satu anggota warga masyarakat yang terdampak secara bergantian memberikan bantuan yang berupa paket sembako. Adanya sikap toleransi diantara warga masyarakat merupakan modal sosial dalam menjaga kerukunan dalam masyarakat. Saling harga menghargai dan tidak acuh tak acuh sesama manusia.

Pada saat COVID-19 yang telah menyebar ke masyarakat khususnya di Kabupaten Gunungkidul warga yang terdampak mendapat perhatian dari warga sekitar, dimana mereka memberikan kebutuhan sehari-hari yang berupa makanan atau paket sembako dan menerima bantuan yang berupa sembako dari warga sekitar. Mereka memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap anggota warga yang lain. Proses sosial lokal yang menjadi fokus kajian ini mengacu pendapat Sukari, dkk. (2016) yang menyatakan, proses sosial lokal berkait pola masyarakat suatu daerah dalam berinteraksi, berhubungan sosial, dan melakukan pengawasan sosial (Setiani et al., 2021).

Masyarakat Kabupaten Kulonprogo juga melakukan kegiatan tersebut yang merupakan kegiatan strategis karena melihat unsur dan tahapan dalam melakukan pertolongan atau memberikan bantuan bagi para penyandang masalah dalam hal ini para warga korban pandemi COVID-19. Oleh karena itu pemberi pertolongan semestinya mampu untuk melakukan fungsi dan perannya sebagai anggota masyarakat yang terlibat. Sebagai anggota masyarakat yang terpapar COVID-19 untuk segera sadar melakukan tindakan isolasi secara

mandiri, setelah mengetahui dirinya dan keluarga terpapar. Selanjutnya warga lainnya juga segera memberi bantuan segala sesuatu yang dibutuhnya pelaku isolasi mandiri. Terutama pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan keluarga untuk keseharian baik sembako dan kebutuhan sehari-hari. Warga setempat ternyata telah bergerak cepat melakukan pemberian bantuan bagi warganya yang terpapar COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri sebagai bentuk pelayanan kesejahteraan sosial dalam mengatasi wabah penyakit, seperti COVID-19. Masyarakat Kulonprogo telah memiliki budaya yang mengakar dengan kebersamaan. Masyarakat telah melakukan tindakan yang cepat dalam mengisolasi wilayah secara mandiri. Cara yang mereka lakukan memang secara kearifan lokal dapat dikatakan tindakan proses lokal seperti pada saat masyarakat melakukan tindakan preventif menurut pengetahuan mereka.

Masyarakat Kulonprogo mulai melakukan tindakan preventif dengan mengadakan portal untuk menutup lokasi umum, pemberlakuan jam malam untuk memutus penyebaran COVID-19. Warga diwajibkan memakai masker setiap keluar rumah, setiap gang masuk dan di depan rumah warga di sediakan tempat cuci tangan dan sabun. Warga juga mulai mendirikan pos penjagaan yang berfungsi pemberian pelayanan warga dalam kondisi darurat (Tri Ratnaningsih & Petty Andriani, 2022).

Tindakan masyarakat tersebut merupakan perwujudan dari nilai kearifan lokal yang terkait dalam aspek proses sosial lokal. Selanjutnya nilai yang berkembang di masyarakat kulonprogo menjadi tindakan mitigasi bencana dengan ungkapan yang lebih kental dengan “*jogo tonggo*” yang telah menjadi jaring pengaman sosial dan keamanan bahkan pada saat peneliti melakukan riset di lapangan, mendapati adanya warga yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem barter (Shodiq, 2021). Hal ini menunjukkan adanya sistem jaringan ketahanan pangan dan jaringan ekonomi sederhana secara lokal antara warga. Secara perlahan warga memiliki tradisi saling menolong tetangga pada saat kondisi sulit pemenuhan kebutuhan. Kondisi tersebut merupakan bentuk jaringan dalam membangun solidaritas antar warga yang terbungkus dalam tradisi *jogo tonggo*.

3.6. Implementasi nilai kearifan lokal berdasarkan solidaritas kelompok

Warga masyarakat Gunungkidul masih memiliki rasa kesetiakawanan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terimplementasi pada saat pandemi dimana warga saling membantu dan memberi. Ada ungkapan yang sering dilontarkan bahwa “*tonggo teparo*” itu merupakan saudara terdekat dalam kehidupannya (Latifah, 2021). Apabila sedang mengalami kesedihan atau permasalahan tetanggalah yang bias memberikan dukungan atau dorongan dengan tujuan agar memiliki rasa semangat dalam menjalani kehidupan.

Selain rasa kepedulian terhadap warga yang sedang mengalami musibah yakni terdampak pandemi, masyarakat Gunungkidul masih memiliki kesadaran untuk saling membantu diantara warga setempat. Disamping itu adanya sifat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya ketenangan dan ketentraman warga. Tenaga sukarela sering masih tertanam dalam masyarakat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang mengalami kesusahan atau permasalahan (Meiherayenti et al., 2022). Membantu yang sedang mengalami musibah merupakan bentuk solidaritas antarwarga. Bantuan tidak hanya berupa materi saja, akan tetapi yang berbentuk tenagapun bisa dikatakan dapat meringankan beban penderitaan warga yang terkena musibah. Bila dikaitkan dengan masa

pandemi mereka membantu dengan iklas bergotong royong mencari rumput untuk makan hewan ternaknya bagi yang memiliki hewan ternak tersebut (Muktiadji et al., 2021).

Masyarakat kulonprogo memaknai konsep solidaritas kelompok sebagai keselarasan sosial atau harmonisasi masyarakat sehingga terjadi adanya kerjasama diantara warga. Solidaritas kelompok didukung adanya nilai kerjasama, gotong royong, tolong menolong, kepedulian. Prinsip tersebut memiliki dasar dari hidup rukun dan saling menghormati menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat di masyarakat Jawa (Amrozi, 2021). Konsep yang di sampaikan Geetz tersebut ternyata terdapat pula pada kehidupan masyarakat Kulonprogo yang selalu mendasarkan pada hidup rukun dengan bergotongroyong. Sikap hidup *rukun* yang dilakukan masyarakat kulonprogo merupakan sikap untuk mempertahankan keharmonisan, tenteram, aman tanpa ada konflik(Tago, 2017).

Tindakan masyarakat dalam bergotong royong menjadi gerakan sosial yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya. Terutama pada saat terjadi pandemi COVID-19, masyarakat kulonprogo lebih peduli pada tetangga yang terpapar, supaya bisa melewati masa krisis wabah yang menimpa. Masyarakat telah melakukan tindakan kerukunan dengan bergotongroyong memberikan bantuan bahan makanan pada warga/tetangga yang membutuhkan. Warga telah mengumpulkan bahan sembako yang dikoordinir oleh ketua RT kemudian dibagikan warga yang terpapar COVID-19 (Noviyanti & Sudrajat, 2021). Pemberian pelayanan yang serupa bagi warga terpapar COVID-19 dan bantuan bagi warga kurang mampu dengan membuka layanan dapur umum. Dibukanya dapur umum bertujuan untuk memberikan bantuan layanan bersifat sementara bagi warga yang kehilangan mata pencaharian akibat covid.

4. Kesimpulan

Hasil dan pembahasan di atas mengindikasikan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang masih dilestarikan di lokasi penelitian dapat diimplementasikan secara efektif dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial selama pandemi COVID-19. Pertama, dalam konteks pengetahuan lokal, masyarakat Gunungkidul menunjukkan sifat gotong royong yang kuat, di mana warga secara bersama-sama memberikan bantuan kepada sesama yang terdampak pandemi. Tradisi seperti jimpitan, di mana warga mengumpulkan dana untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, juga tetap berlangsung. Di Kabupaten Kulonprogo, relawan-relawan berperan aktif dalam memberikan bantuan tanpa perintah resmi, mereka merespons dengan cepat setelah mendengar adanya warga yang terdampak COVID-19.

Kedua, dalam aspek budaya lokal, seperti upacara rasulan yang masih dilestarikan di Gunungkidul, terdapat nilai-nilai silaturahmi dan gotong royong yang kuat diantara warga, saudara, dan teman. Di wilayah Kulonprogo, tradisi jogo tonggo menekankan pentingnya tetangga saling membantu dan peduli satu sama lain ketika menghadapi masalah.

Ketiga, dalam hal keterampilan lokal, masyarakat Gunungkidul memiliki kemampuan bertani yang kuat, bahkan di pekarangan rumah mereka. Hal ini membantu mereka dalam memproduksi makanan sendiri selama pandemi COVID-19, sehingga mereka tidak terlalu tergantung pada pasokan dari luar. Di Kulonprogo, tradisi upacara ujub memiliki makna

dalam menghormati arwah yang telah tiada, dan upacara ini dilakukan secara bersama-sama untuk menjaga kerukunan.

Keempat, sumber daya lokal seperti paguyuban, kelompok tani, Karang Taruna, dan kelompok pengajian, diakui sebagai modal penting bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya ini menjadi potensi yang sangat berharga dalam mengatasi permasalahan selama pandemi COVID-19, baik dalam hal sumber daya manusia maupun alam. Lahan pertanian yang dimanfaatkan secara lokal dapat menghasilkan berbagai jenis tanaman untuk kebutuhan keluarga.

Kelima, proses sosial lokal menunjukkan bahwa kepedulian sesama anggota masyarakat tetap menjadi nilai utama, dengan warga saling membantu dalam situasi kesulitan. Kerukunan dan sikap toleransi sangat dihargai dalam kehidupan bersama masyarakat. Di Kulonprogo, tindakan preventif untuk mencegah penularan COVID-19 dilakukan dengan menutup portal jalan utama keluar dan masuk warga.

Keenam, solidaritas kelompok tercermin dalam sikap toleransi dan kesetiakawanan sosial di antara anggota masyarakat. Sikap ini menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis, baik di Gunungkidul maupun Kulonprogo.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada di lokasi penelitian berperan penting dalam upaya mengatasi permasalahan sosial selama pandemi COVID-19, dengan menonjolkan aspek-aspek seperti kepedulian sosial, budaya lokal, keterampilan tradisional, sumber daya lokal, proses sosial, dan solidaritas kelompok.

5. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, dapat disarankan beberapa langkah. Pertama, pemerintah daerah yang terkait sebaiknya mendorong program penanaman nilai tradisi kearifan lokal yang melibatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam konteks pemberian layanan kesejahteraan sosial. Kedua, perlu memberikan keteladanan kepada generasi muda, terutama anak-anak, agar mereka dapat mencintai dan menghargai budaya lokal serta tidak terpengaruh oleh budaya asing yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Penguatan nilai kearifan lokal sebaiknya dimulai sejak usia anak-anak dan remaja. Melibatkan anak-anak dan remaja dalam praktik kearifan lokal dapat menciptakan lingkungan di mana mereka dapat belajar tentang gotong royong dan saling membantu, yang pada gilirannya akan mengembangkan iklim kegotongroyongan yang lebih kuat. Selain itu, memberdayakan kelompok-kelompok atau paguyuban yang sudah ada dalam masyarakat juga merupakan langkah yang perlu dilakukan dalam mendukung pemeliharaan dan penguatan kearifan lokal.

Ucapan terimakasih: penulis mengucapkan terimakasih kepada Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo yang telah mendukung penelitian ini, perangkat Kalurahan Ngleri dan Kapanewon Pengasih, Kulonprogo serta warga masyarakat di dua lokasi yang telah memberikan informasi dan juga data-data yang relevan untuk mendukung tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Achmad Fathoer Choer, Shaqila Sendi Permata Cinta, & Shifa Septefany. (2022). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Menjamin Kesejahteraan Rakyat Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(3). <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.64>
- Amrozi, S. R. (2021). Keberagamaan Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz Dan Mark R. Woodward. *Fenomena*, 20(1). <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.46>
- Anak Agung Sagung Alit Widayastuti, & Mardiana, D. E. (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Pandemi Covid 19 Terhadap Bentuk Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Plano Buana*, 2(2). <https://doi.org/10.36456/jpb.v2i2.4446>
- Arina, V. C. E., Soputan, M., & Doodoh, M. (2022). Penerapan Hukum dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pandemi Covid 19 Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/413/2020. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(1).
- Biddlestone, M., Green, R., & Douglas, K. M. (2020). Cultural orientation, power, belief in conspiracy theories, and intentions to reduce the spread of COVID-19. *British Journal of Social Psychology*, 59(3). <https://doi.org/10.1111/bjso.12397>
- Budhy Santoso, dkk. (2023). Pelayanan Sosial Berbasis Aset Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pasca Covid-19 di Kabupaten Jember. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 4(1). <https://doi.org/10.30596/jisp.v4i1.13195>
- Carolina, N., Jelika, C. B., Putri, I. K. C., Afriani, A. B. A., & Lasmana, T. A. (2022). The Role of Public Health Workers in Facing the Challenges of Health Development Post-Covid-19 Pandemic : A Review. *Urecol Journal. Part C: Health Sciences*, 2(2).
- Fitria, N. (2017). Konsep Pendidikan Karakter Menurut Thomas Lickona dan Yusuf Qardhawi (Studi Komparatif tentang Metode, Strategi dan Konten). In *Tesis* (Vol. 34, Issue 11).
- Habibullah, H., Irmayani, N. R., Mujiyadi, B., Erwinskyah, R., & Nurhayu, N. (2022). The Role of Community Social Extension Workers to Promote Social Welfare Programs in Rural Indonesia. Proceedings of the 3rd International Conference on Rural Socio-Economic Transformation: A Transdisciplinary Approach for Promoting Sustainable, Resilience, and Just Rural Transitions in the Era of Climate Crisis, RUSET 2022, 10-11 August 2022, Bogor, Indo. <https://doi.org/10.4108/eai.10-8-2022.2338864>
- Hanif, M. (2021). Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Madiun Dalam Menyikapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(1). <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n1.p27-36.2021>
- Hestiningsih, R., Martini, M., Saraswati, L. D., Setyawan, H., Wuryanto, A., & Yuliawati, S. (2022). Edukasi Tim Jogo Tonggo dalam Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Semarang. *Journal of Public Health and Community Service*, 1(1). <https://doi.org/10.14710/jphcs.2022.14023>
- Irmayani, N. R., Suradi, Jayaputra, A., Mujiyadi, B., Nainggolan, T., Habibullah, Amalia, A. D., Indrajaya, Suhendi, A., Erwinskyah, R. G., As'adhanayadi, B., Iban, A., Oktafiani, I., Saleh, R., & Aruan, N. L. (2019). Pemetaan Sosial Menuju Desa Berketahanan Sosial Melalui Penyuluhan Sosial Masyarakat Sebagai Agen Perubahan. In *Puslitbangkesos Kemensos RI*.
- Irmayani, N. R., Habibullah, H., Mujiyadi, B., Nurhayu, N., & Erwinskyah, R. G. (2022). Utilization of ICT in Maintaining Social Resilience in Rural Indonesia. 9th International Conference on ICT for Smart Society: Recover Together, Recover Stronger and Smarter Smartization, Governance and Collaboration, ICISS 2022 - Proceeding. <https://doi.org/10.1109/ICISS55894.2022.9915132>

- Latifah, A. (2021). The Practice of Mbaranggawe Puputan : A Solution for Marriage Reception in Javanese Communities During the Covid - 19 Pandemic. *Veteran Law Review*, 4(2). <https://doi.org/10.35586/velrev.v4i2.2706>
- Lelisari, Imawanto, & Rukimin. (2020). Pengawasan Berbasis Rukun Tetangga (RT) Untuk Mengurangi Penyebaran Covid 19. *JPMB : Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter*, 3(1). <https://doi.org/10.36765/jpmb.v3i1.223>
- Mayer Hayrani DS. (2018). Pengaturan Pengawasan Pusat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1).
- Meiherayenti, Rusli, Z., & Mayarni. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kampar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4).
- Muktiadji, N., Rainanto, B. H., Cahyani, N., Herawati, H., Mulyana, M., & Noor, T. D. F. S. (2021). PKM Donasi Alat Pelindung Diri Bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas di Kota Bogor pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Abdimas Dediaksi Kesatuan*, 1(2). <https://doi.org/10.37641/jadkes.v1i2.479>
- Mutmainnah, M., Widodo, A. S., Dimyati, A., Dhiani, H. P., & Wardani, S. (2020). Aplikasi Social Responsibility: Kegiatan Bakti Sosial Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kukusan Rt 06 Rw 05 Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat 16425. *Dediaksi Pkm*, 1(3). <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v1i3.6682>
- Noviyanti, N., & Sudrajat, U. (2021). Gotong Royong sebagai Modal Sosial dalam Menghadapi Pandemi di Kota Surabaya. *Jantra.*, 16(1). <https://doi.org/10.52829/jantra.v16i1.120>
- Nurmasari, I. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perubahan Harga Saham dan Volume Transaksi (Studi Kasus Pada PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk.). *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 3(3). <https://doi.org/10.32493/skt.v3i3.5022>
- Riantika, F., & Hastuti. (2019). Kajian kearifan lokal dalam perspektif geografi manusia. *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 17(1).
- Setiani, M., Mugnianingsih, N. A., Ramadhan, S. A. R., & Aryanto, S. (2021). Sekolah Alam Berbasis Kearifan Lokal sebagai Langkah Konkret dalam Menghadapi Kesenjangan Digital selama Pandemi Covid-19. *Elementary Journal : Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 3(2). <https://doi.org/10.47178/elementary.v3i2.1114>
- Shodiq, M. F. (2021). "Jogo Tonggo" Efektivitas Kearifan Lokal; Solusi Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 8(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19412>
- Sholihatin, E., Kusnarto, K., & Warsiman, W. (2020). Harmonisasi Nilai-Nilai Bela Negara Dengan Sistem Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Untuk Meningkatkan Nasionalisme. *Public Administration Journal of Research*, 2(2). <https://doi.org/10.33005/paj.v2i2.43>
- Sormin, E., Harefa, N., Sitompul, F., Arodes, E. S., Cing, J. M., Tehupeior, A., Naibaho, L., Simatupang, N. I., Simanjuntak, F. N., Purba, L. S. L., Sumiyati, & Azzahra, S. F. (2020). Aksi Uki Perduli Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19. *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2(2). <https://doi.org/10.33541/cs.v2i2.2255>
- Susantyo, B., Habibullah, H., Irmayani, N. R., Erwinskyah, R. G., Nainggolan, T., Sugiyanto, S., Rahman, A., Arifin, J., As'adhanayadi, B., & Nurhayu, N. (2023). Social cash assistance for food security during a disaster: lesson learned from Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environment. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1180/1/012047>

- Susetio, W., Azis, R. A., Nurhayani, & Hikmawati, E. (2021). Pengaturan Hukum Dalam Keadaan Darurat Dimasa Pandemi Covid-19. *Abdimas*, 8(1).
- Syahrul, S., & Nurhafizah, N. (2022). Analisis Pola Asuh Demokratis terhadap Perkembangan Sosial dan Emosional Anak di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.1717>
- Tago, M. Z. (2017). Agama Dan Integrasi Sosial Dalam Pemikiran Clifford Geertz. *Kalam*, 7(1). <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.377>
- Torrido, A. (2021). Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19 melalui pendekatan kewirausahaan sosial. *Jurnal PKS*, 20(1).
- Tri Ratnaningsih, & Petty Andriani. (2022). Patient And Family Compliance In The Use Of Mask Through Health Education In The Dahlia Room Bangil Hospital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan*, 8(2). <https://doi.org/10.33023/jpm.v8i2.1009>
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2017). Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Ketiga. *Jakarta: Bumi Aksara Group*.
- Wardhana, A. F. G., Saleh, M., & Ilham Wibowo, A. (2021). Relasi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penetapan pembatasan sosial berskala besar. *Literasi Hukum*, 5(1).
- Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi). *Research Gate*, March.

Pustaka Pendukung :

- Rahadian, L. (2022). *WHO: Korban Meninggal Akibat Covid Capai 16,6 Juta Orang*. CNBC Indonesia.
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020. tentang *Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020. tentang *Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB)*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. *tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB)*.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).



Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Seboro Kabupaten Probolinggo

Nining Ailiyah¹ , Nur Chalimah¹ , M. Asif Nur Fauzi^{1*} , Mohammad Affan Wahyudi

¹, Stebi Syaikhona Kholil Sidogiri; Pasuruan; Jawa Timur; Indonesia

* Korespondensi: asif.elek24@gmail.com; Tel: +62 85784407378

Diterima: 7 Maret 2023; Disetujui: 26 September 2023; Diterbitkan: 29 November 2023

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh peningkatan angka kemiskinan yang disebabkan adanya pandemi COVID 19 di Desa Seboro Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa timur. Hal ini ditunjukkan dengan angka Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang naik dari tahun sebelumnya khususnya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Pemerintah berinisiatif memberikan bantuan yang berupa pangan non tunai kepada Keluarga yang berhak menerima manfaat (KPM) melalui data yang diajukan oleh pemerintah desa. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (KEMEN SOS) dengan tujuan dalam permasalahan ekonomi di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektifitas BPNT terhadap perekonomian masyarakat di Desa Seboro tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik Reduski Data (Data Reduction), penyajian data (display data), Penegasan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion Drawing and Verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BPNT di Desa Seboro sudah efektif dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan waktu penyalurannya. Keefektifan tersebut ditunjukkan dengan bantuan tersebut memberikan manfaat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di desa tersebut namun belum dapat memenuhi sepenuhnya perekonomian seperti sebelum masa pandemi.

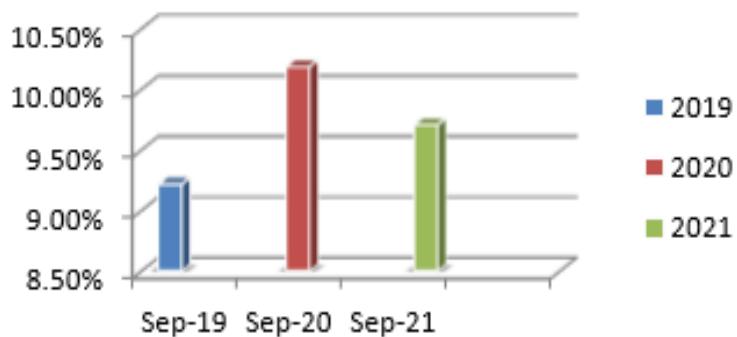
Kata kunci: Bantuan Pangan Non Tunai, Perekonomian Masyarakat, Pandemi COVID 19

Abstract: This research was motivated by the increase in poverty rates caused by the COVID 19 COVID 19 in Seboro Village, Probolinggo Regency, East Java Province. This is shown by the number of Beneficiary Groups (KPM) which increased from the previous year, especially in meeting basic daily needs. The government took the initiative to provide assistance in the form of non-cash food to families who are entitled to receive benefits (KPM) through data submitted by the village government. Non-Cash Food Assistance (BPNT) is distributed by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (KEMEN SOS) with the aim of addressing economic problems in society. The aim of this research is to examine the effectiveness of BPNT on the economy of the community in Seboro Village. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques use interview techniques, observation and documentation studies, while data analysis techniques use Data Reduction techniques, data presentation, confirmation of conclusions and verification (Conclusion Drawing and Verification). The research results show that the distribution of BPNT in Seboro Village has been effectively implemented according to the targets and distribution time. This effectiveness is demonstrated by the assistance providing benefits in improving the economy of the community in the village but it has not been able to fully fulfill the economy as before the COVID 19.

Keywords: Non-Cash Food Assistance, Community Economy, Covid 19 COVID 19

1. Pendahuluan

Dampak adanya COVID 19 ini manusia dituntut untuk *Sosial Distancing* (jaga jarak), *stay at home* (tetap di rumah), banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, itu sebabnya banyak dari kalangan masyarakat yang sangat menurun dalam perekonomian. Akibat diberlakukannya bekerja dan belajar dari rumah adalah hilangnya sumber mata pencaharian, masyarakat banyak mengalami kehilangan pendapatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. ~~Dari sini sangat~~ Terlihat jelas bahwa COVID 19 ini membuat tingkat kemiskinan menjadi naik. Sesuai yang dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) "Pada bulan September 2019, tingkat presentase kemiskinan serta perubahan angka perekonomian di Indonesia mencapai 9,22%, di bulan September 2020 lalu tingkat presentase kemiskinan di Indonesia naik menjadi 10,19%. Sedangkan di bulan September 2021 menjadi 9,71%. Berikut grafik perubahan presentase kemiskinan di Indonesia dari tahun 2019 sampai September 2021 sebagai berikut:



Gambar 1: Grafik Perubahan Presentase Kemiskinan di Indonesia Sebelum dan Setelah masa Pandemi (Sumber: BPS, 2019)

Sedangkan presentase pengangguran di Indonesia di bulan Agustus 2020 lalu melonjak hingga mencapai 9,77 juta orang/di presentasekan kenaikannya dari 5,23% menjadi 7.07%, perbandingan dengan tahun lalu(Indayani & Hartono, 2020). Jika ditinjau dari Undang - Undang No.11 tahun 2009 terkait Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhnya material, spiritual dan social warga Negara agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Haryanto & Fitri, 2019). Dalam pasal tersebut, sangat jelas bahwa inti utama kesejahteraan sosial terletak pada material, sehingga jika inti utama material sudah dipenuhi, maka akan mudah pula memenuhi berbagai aspek yang lainnya. Pemerintah juga terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan beberapa program perlindungan sosial (Habibullah, 2019) diberbagai sektor kehidupan masyarakat diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Nasution & Hutabarat, 2022).

Salah satu upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan membantu perekonomian masyarakat adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017. Dalam pasal 1 ayat (4), peraturan ini menjelaskan bahwa penyaluran Bantuan Sosial non tunai adalah penyaluran Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Sosial melalui bank penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial (Habibullah et al., 2022). Bantuan pangan non tunai yang selanjutnya di singkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan

Nining Ailiyah, M. Asif Nur Fauzi, Nur Chalimah, Mohammad Affan Wahyudi

Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Seboro Kabupaten Probolinggo di Masa Pandemi

pangan di e-warong yang bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (BRI, BTN, dan Mandiri) (Muhtar et al., 2022). Program BPNT ini pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa, dan 3 kota di wilayah Timur. Jumlah KPM yang akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai di Indonesia yaitu berjumlah 1,286.194 jiwa, dengan total bantuan yang diberikan senilai Rp 1,7 terliun (Djaenal et al., 2021).

Pada penyaluran pertama ini BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) ini didistribusikan kepada lebih dari 2.205 keluarga penerima manfaat di Surabaya dan Lamongan Jawa Timur yang di salurkan melalui agen agen branchless banking BNI atau yang di sebut Agen 46 BNI sebagai percontohan awal, di Desa Seboro Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo sendiri masyarakat yang mendapatkan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sebelum masa Pandemi sebanyak 132 orang, kemudian bertambah sebanyak 192 masyarakat yang mendapatkan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) ini di karenakan Pandemi. Yang mana setiap individu mendapatkan bantuan senilai Rp 200.000,- yang awalnya di berikan dengan menggunakan kartu khusus penerima BPNT yang di buatkan dan di danai oleh pemerintahan desa setempat, yang mana kartu ini bisa di gunakan sebagai alat pembayaran di toko-toko terdekat yang hanya untuk membeli pangan di Warung KUBE PKH/Pedagang Bahan Pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA namun bukan di supermarket atau swalayan-swalayan seperti Indomaret dan sebagainya, Kemudian BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) ini awalnya juga di salurkan dalam bentuk RASKIN yang kemudian berubah sebutan menjadi RASTRA yang sudah di sebutkan di atas.

Seiring berjalannya waktu, penyalurannya dalam bentuk NON TUNAI, seperti lauk pauk, beras sebesar Rp 200.000,-. Berdasarkan hasil kajian dokumentasi bidang pekerjaan di sebelum dan masa pandemi COVID 19 di Desa Semboro bahwa kondisi masyarakat di masa COVID 19 sebagai berikut :

Tabel 1. Data Pekerjaan Masyarakat Desa Seboro dari Jumlah Keseluruhan 1387 Jiwa Sebelum dan Setelah Masa Pandemi (Tahun 2019-Tahun 2021)

Sebelum Pandemi		Setelah Pandemi	
Pekerjaan	Percentase	Pekerjaan	Percentase
Petani	75%	Petani	75%
Swasta	10%	Swasta	5%
Wiraswasta	10%	Wiraswasta	8%
Guru	5%	Guru	5%
		Buruh	7%

Sumber: Pemerintah Desa Semboro Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dikaji bahwa adanya penurunan pada beberapa bidang pekerjaan yang disebabkan adanya COVID 19. Perubahan bidang pekerjaan masyarakat di Desa Seboro Probolinggo tersebut terutama pada segmen swasta dan wiraswasta. Faktor yang mempengaruhi perubahan bidang pekerjaan tersebut karena adanya penurunan jumlah omset yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan jumlah konsumen akibat pembatasan aktivitas masyarakat secara biasanya. Penurunan omset tersebut disampaikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Penurunan Jumlah Omset Yang Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja

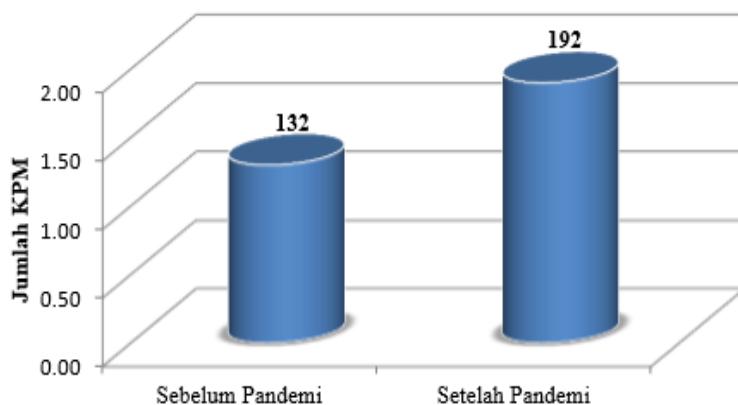
Nining Ailiyah, M. Asif Nur Fauzi, Nur Chalimah, Mohammad Affan Wahyudi

Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Seboro Kabupaten Probolinggo di Masa Pandemi

Sebelum Pandemi		Setelah Pandemi	
Pekerjaan	Penghasilan	Pekerjaan	Penghasilan
Petani	>Rp 2.000.000,-	Petani	>Rp 1.000.000,-
Swasta	>Rp 1.000.000,-	Swasta	<Rp 2.000.000
Wiraswasta	>Rp 2.000.000,-/bln	Wiraswasta	<Rp 1.000.000/hr
Guru	>Rp 500.000,-/bln	Guru	<Rp 500.000,-
		Buruh	<Rp 500.000,-

Sumber: Data Pemerintah Desa Seboro Kabupaten Probolinggo 2019

Hal ini menjadikan meningkatnya kelompok penerima manfaat (KPM) tingkat desa dalam pengajuannya. Hal ini sesuai dengan tabel dibawah ini:



Gambar 3: Angka kenaikan KPM Program BPNT Sebelum dan Setelah Masa Pandemi di Desa Seboro

Berdasarkan gambaran tabel tersebut menunjukkan bahwa pandemi COVID 19 menjadikan pelonjakan nilai penerima bantuan pangan nontunai menjadi meningkat terutama pada pelaku usaha yang mengalami kebangkrutan maupun buruh yang telah di PHK menjadi bagian dari KPM.

Berdasarkan data analisis diatas yang berkaitan tentang upaya pemerintah dalam membantu bahkan meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi, sehingga penulis ingin meneliti lebih dalam terkait "Efektivitas BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dalam meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat Desa Seboro di masa Pandemi". Sesuai dengan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaruh program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam tingkat perekonomian Desa Seboro di masa Pandemi? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan impact program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Seboro di masa Pandemi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan berbagai fenomena yang terjadi. Baik fenomena yang bernilai alamiah atau berupa rekayasa yang dibuat oleh manusia. Cara untuk memperoleh data data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya teknik Wawancara, foto maupun berbagai dokumen yang berhubungan dengan topic yang di teliti. Penelitian ini dilakukan di Dusun Krajan, Desa Seboro, Krejengan, Probolinggo. Penelitian ini ditempuh dalam rentang waktu 2 bulan, mulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai tanggal 1 Maret 2022.

Nining Ailiyah, M. Asif Nur Fauzi, Nur Chalimah, Mohammad Affan Wahyudi

Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Seboro Kabupaten Probolinggo di Masa Pandemi

Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya (Moleong, 2013) bahwa Analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data merupakan proses memilih dan memilih data penelitian yang telah dikumpulkan dari informan yang membidangi program bantuan pangan non tunai , penyajian data merupakan proses penyajian data yang telah disesuaikan dengan hasil dan pembahasan tentang Bantuan Pangan No Tunai, dan penarikan kesimpulan Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Moleong, 2013).

3. Hasil

Salah satu upaya pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat adalah adanya program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dimana program BPNT di Desa Seboro mulai dilaksanakan pada tahun 2017 yang mana program BPNT ini termasuk salah satu bansos yang diberikan oleh pemerintah sebagai upaya membantu perekonomian masyarakat baik sebelum masa pandemi maupun setelah masa pandemi. Jumlah KPM yang terdaftar di DTKS sebelum masa Pandemi adalah 132 KK, sedangkan setelah masa pandemi bertambah menjadi 192 dari jumlah keseluruhan 438 KK yang terdapat di Desa Seboro. Proses penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di lakukan di E-Warong yang bekerjasama dengan beberapa bank diantaranya BNI, BNI 46. Adanya program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), pemerintah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan dalam bentuk Non Tunai seharga Rp 200.000,- / bulan dalam bentuk beras 1 KG, telur ¼ KG, tempe 4 kotak, daging, ikan dan sayur yang dapat diambil cukup dengan menukarkan kartu sembako yang diberikan oleh pemerintah ke agen E-Warong terdekat. Sedangkan pengambilan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Desa Seboro, KPM cukup mengambil nya di kantor Desa Seboro yang sudah dipersiapkan oleh pihak kepemerintahan Desa yang sudah mengurusnya dari E-Warong terdekat, agar KPM mudah dalam pengambilan BPNT. Bagi KPM tidak boleh mewakilkan di saat penerimaan manfaat, mengecualikan darurat.

Penyaluran program BPNT ini dilakukan 1 kali dalam sebulan, yang mana waktu pelaksanaanya ditetapkan setiap tanggal 15 dalam setiap bulannya. Sedangkan kefektifan tercapainya suatu program dapat diukur sesuai dengan indikator dari kefektivitasan program tersebut. Untuk mengetahui serta menggambarkan keefektifan dari program BPNT pada masa pandemi di Desa Seboro yakni dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya:

3.1. Sasaran

Sasaran ialah sejauh mana program ini diberikan kepada mereka yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Dalam penjelasan sebelumnya sudah di jelaskan bahwa karakteristik KPM dari program BPNT di antaranya Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa (data DTKS), Calon penerima adalah mereka para masyarakat yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Seboro serta beberapa KPM mengatakan bahwa:

Kelompok penerima sasaran dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang ditetapkan sebagai penerima bantuan ini sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta dapat dikatakan tepat sasaran.

Penetapan sasaran program BPNT ini sesuai dengan informasi yang disampaikan informan kunci:

Masyarakat yang menerima bantuan ini sudah tepat sasaran, berikut hasil wawancaranya; "ya, kalau terkait siapa saja KPM dari BPNT ini, kami sudah menjamin KPM Desa Seboro sudah tepat sasaran/sesuai dengan prosedur dari pemerintah sesuai dengan yang di ajukan pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai: bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan

Nining Ailiyah, M. Asif Nur Fauzi, Nur Chalimah, Mohammad Affan Wahyudi

Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Seboro
Kabupaten Probolinggo di Masa Pandemi

secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Ketepatan sasaran yang dapat ditunjukkan atas pelaksanaan program BPNT yakni masyarakat miskin yang terdampak dengan adanya pandemi COVID 19.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Garis & Desfirani, 2021) bahwa Berbagai permasalahan dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanganan dampak Pandemi COVID-19. Ditemukan beberapa indikator permasalahan diantaranya yaitu : 1) Belum adanya aturan yang dipakai dalam penyaluran secara teknis BPNT tingkat desa di Desa Muktisari, 2) Kesulitan pendanaan dan sulit tanggap dalam pemutakhiran atau pengupdatean data 3) Pelaporan Pertanggungjawaban dari Agen yang cenderung lama.

3.2. Waktu

Kurun waktu yang dimaksud ialah pelaksanaan program ini yang dilakukan 1 kali dalam 1 bulan dengan ketetapan waktu pelaksanaan setiap tanggal 15 dalam setiap bulannya, sekalipun terkadang terdapat hambatan yang dihadapi oleh pihak pemerintah Desa Seboro seperti ketika terjadi keterlambatan pencairan dana yang tidak tepat waktu dari pemerintah atas, namun dengan cara menggunakan dana tolongan sehingga penyaluran BPNT di Desa Seboro tetap tepat waktu. Serta adanya bantuan ini dapat membantu KPM semenjak tanggal di berikannya hingga penyaluran pada bulan selanjutnya.

Adanya BPNT yang disalurkan 1 bulan sekali ini dapat sedikit membantu meringankan perekonomian keseharian selama pandemi, karena bantuan yang di salurkan secara non tunai yang berupa beberapa bahan pokok dapat disimpan di lemari pendingin hingga dapat di gunakan untuk beberapa hari, hingga penyaluran bulan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu L salah satu KPM BPNT Desa Seboro bahwa:

“Alhamdulillah, seneng sarah mon la depak bento penyaluran BPNT ndu”, soallah kan bisa abantu dek penegeluaran blenjeh gebey de“er ndu”, biasaah blenjeh gebey ngakan 1 hari minimal Rp.10.000,- mon lah BPNT keluar bisa ngirit ke pesse, paleng tidak ye bisa ngirit pesse sekitar 2 minggu, ye kan lumayan apa pole semenjak bedenah COVID 19 nyare pesse jen mlarat”. (Alhamdulillah, senang sekali ketika sudah sampai waktu penyaluran BPNT nak, karena bisa membantu ke pengeluaran belanja untuk makan nak, biasanya belanja untuk makan 1 hari minimal Rp.10.000,- jika BPNT sudah keluar bisa ngirit ke uang, paling tidak bisa irit uang sekitar untuk 2 minggu, yak an itu sudah lumayan terlebih semenjak adanya COVID 19 mencari uang(pekerjaan) semakin sulit).

Namun, untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan penuh, banyak dari masyarakat yang berpendapat bahwa bantuan ini tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari selama sebulan penuh. Hal ini seperti yang sempat di jelaskan oleh Ibu K, seorang buruh tani yang mengatakan bahwa:

“Gi senneng atas bedenah BPNT nekah, soalah gi membantu, gi sekalipun gun abantu skitar semingguan, Kadeng tak depak semingguh pon sobung. Gi tetep semangat a lakoan gebey olle pesse se e kagebei de“er, napah pole bedenah COVID 19, sekabbiknah jen larang, kelakoan tak senyaman sebelumnya bedenah COVID 19. Mon sebelumnya bedenah COVID 19 kan Alhamdulillah kelakuan gik nyaman, tak terlalu sossa kadih pon bedenah COVID 19” (Ya senang atas adanya BPNT ini, karena dapat membantu, ya sekalipun hanya membantu hanya untuk waktu semingguan, terkadang tidak sampai 1 minggu sudah habis. Ya harus tetap semangat bekerja untuk mendapatkan uang untuk makan, terlebih semenjak adanya COVID 19, semua barang semakin mahal. Pekerjaan tak senyaman seperti sebelum adanya COVID 19. Ketika sebelum adanya COVID 19 kan Alhamdulillah pekerjaan masih enak, tidak terlalu susah seperti setelah adanya COVID 19”(Terjemah dalam bahasa Indonesia).

Berdasarkan data hasil wawancara, observasi serta dokumentasi data, dapat memberikan penjelasan bahwa adanya bantuan ini sekalipun tidak dapat membantu perekonomian KPM seperti

Nining Ailiyah, M. Asif Nur Fauzi, Nur Chalimah, Mohammad Affan Wahyudi

Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Seboro Kabupaten Probolinggo di Masa Pandemi

sebelum masa pandemi, namun adanya BPNT ini dapat sedikit membantu meringankan perekonomian keseharian selama pandemi, karena bantuan yang di salurkan secara non tunai yang berupa beberapa bahan pokok dapat disimpan di lemari pendingin hingga dapat di gunakan untuk beberapa hari, hingga penyaluran bulan selanjutnya, juga besaran nominalnya tidak akan berkurang jika memang tidak di ambil terlebih dahulu.

3.3. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan langkah informative yang dilakukan untuk menginformasikan sesuatu hal kepada informan. Jika dikaitkan dengan penyaluran program BPNT ini sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi terkait bantuan yang akan diterima, waktu penyaluran, dan tempat pengambilan. proses sosialisasi di Desa Semboro terkait penyaluran program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) telah di lakukan di mana KPM sudah mengetahui informasi terkait tujuan, sasaran, jumlah nominal serta prosedur pengambilan dari program BPNT. Program sosialisasi dilakukan secara *door to door* serta melalui media chat group antara pemerintah Desa Semboro dengan ketua RT/RW guna menghindari pertemuan tatap muka dikarenakan adanya penyebaran COVID 19 saat itu.

3.4. Adaptasi

Adaptasi ialah kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwasanya adanya pandemi, masyarakat dituntut untuk dapat beradaptasi dalam menjalankan aktivitas keseharian. Sedangkan bentuk adaptasi yang harus dilakukan oleh masyarakat terkait penyaluran program BPNT ini ialah, KPM harus bisa menyisihkan waktu untuk mengambil dana bantuan, selain itu proses pengambilan dana bantuan harus sesuai protokol kesehatan, diantaranya tetap jaga jarak, memakai masker serta selalu membersihkan tangan setelah memegang barang barang.

Sehubungan dengan adanya COVID 19 ini, maka pemerintah mengimbau untuk tetap mengikuti peraturan protokol kesehatan agar mencegah penyebaran virus COVID 19 ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat Desa Seboro bahwa:

Himbauan dengan sangat agar KPM tetap meluangkan waktunya untuk mengambil berbagai bentuk bahan yang di berikan ketika penyaluran BPNT dengan tetap memakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak

Berdasarkan strategi adaptasi yang dilakukan oleh perangkat desa di atas menggambarkan bahwa adanya keselarasan dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan langkah pencegahan yang dilakukan terkait COVID 19.

4. Pembahasan

Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara disebut e-warong. Efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan suatu gambaran seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil dari diselenggarakannya suatu kegiatan atau program, yang dapat menyatakan sejauh mana capaian dari suatu tujuan serta ukuran berhasil atau tidaknya suatu kegiatan/program yang telah dilaksanakan dimana dalam hal ini ialah capaian program bantuan pangan non tunai (BPNT). Bantuan Pangan Non Tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh positif terhadap kemiskinan akan tetapi tidak signifikan secara statistic. (Gultom et al., 2020).

4.1 Efektivitas Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Desa Seboro di masa Pandemi

Menurut Steers (1985:46) yang dikutip dari (Djaenal et al., 2021) bahwa Efektivitas adalah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya untuk mencapai semua sasarannya. Sesuai

Nining Ailiyah, M. Asif Nur Fauzi, Nur Chalimah, Mohammad Affan Wahyudi

Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Seboro Kabupaten Probolinggo di Masa Pandemi

dengan pendapat dari Budiani dalam Pratiwi dan Nurcahyanto (2017: 3) dalam (Wulandari, 2021) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut:

4.1.1. Ketepatan Sasaran Program

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Semboro telah tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan penerima manfaat dari bantuan tersebut sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh pemerintah melalui data kemensos. Adanya COVID 19 yang melanda tahun 2019 tersebut menjadikan meningkatnya masyarakat miskin di Desa Seboro Probolinggo. Hal dipengaruhi beberapa faktor diantaranya PHK dan kebangkrutan wirausaha akibat pembatasan dalam aktivitas tersebut.

4.1.2. Sosialisasi Program

Kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program. Sehingga informasi terkait pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Penyaluran bantuan pangan non tunai ini dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat bahwa bentuk bantuan yang diterima bukanlah uang dan tidak sama dengan bantuan langsung tunai. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan bahwa sosialisasi yang dilakukan pada masa COVID 19 dilakukan secara *door to door* untuk mengurangi perkumpulan warga yang terjadi karena sosialisasi.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara *door to door* ini dirasa efektif karena warga merasa diperhatikan secara individu dibandingkan dengan dikumpulkan didalam suasana rapat. Penyampaian informasi yang transparan dilakukan oleh pemerintah Desa Seboro kepada kelompok penerima manfaat atas bantuan ini sangat diperhatikan. Hal ini sesuai dengan penelitian (Rahma, 2021) bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sosial kepada masyarakat penerima manfaat kategori cukup efektif ada sebanyak 44% atau 15 responden, hal ini dikarenakan di Kelurahan Gulak Galik masih hanya beberapa kali mengadakan sosialisasi kepada peserta program bantuan pangan non tunai (BPNT) selain itu beberapa peserta program juga tidak semua ikut saat kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Kemudian sosialisasi yang sering dilaksanakan hanya dilakukan oleh perwakilan petugas sosial masyarakat saat mengunjungi peserta. Sehingga membuat peserta program tidak memahami sepenuhnya tentang mekanisme pengaduan apabila terjadi permasalahan pada saat pelaksanaan (Rahma, 2021). Hal ini sesuai dengan yang disampaikan (Dini et al., 2018) bahwa lebih ditingkatkan lagi efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Gulak Galik dengan seringnya melakukan pembaharuan data penerima manfaat program serta pemberian pelayanan dan penginformasian program lebih maksimal.

4.1.3. Tujuan Program

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan adanya Bantuan pangan non tunai ini masyarakat merasa terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya sehari – hari dimasa COVID 19 covid 19 ini. Hal ini dirasakan oleh masyarakat Seboro Probolinggo bahwa kesesuaian bantuan pangan non tunai ini dirasa sangat membantu namun bagi sebagian kecil dari masyarakat bantuan tersebut belum dapat menutupi kebutuhan selama 1 bulan seperti sebelum COVID 19.

Persepsi yang diberikan masyarakat terkait dengan bantuan yang diterima tersebut merupakan bagian dari adaptasi dari kebiasaan mempergunakan uang dengan jumlah besar dan konsumsi yang berlebihan dengan adanya bantuan pangan sekitar 200.000 perbulan masyarakat seboro diharapkan mampu untuk bertahan dan kreatif dalam memanagement kebutuhan pokok tersebut.

4.1.4. Pemantauan Program

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa salah satu kendala yang dialami petugas sosial adalah mendeteksi tanggungan keluarga dalam satu atap di Desa Seboro Berdasarkan persepsi yang disampaikan terkait kecukupan bantuan pangan yang senilai 200.000 tersebut belum mencukupi selama sebulan dibandingkan dengan sebelum COVID 19 karena tanggungan 1 keluarga dalam rumah sangat besar sehingga persepsi tersebut menyebutkan bahwa sedikit membantu.

Ketidaksesuaian nilai bantuan yang diterima dengan jumlah keluarga yang mengkonsumsi seharusnya menjadi perhatian dan kebijaksanaan untuk pemerataan penerima manfaat bantuan pangan non tunai tersebut. hal ini sesuai dengan penelitian (Laurentcia & Yusran, 2021) bahwa berdasarkan hasil evaluasi program bantuan pangan non tunai di kecamatan nanggalo masih kurang optimal.

Dunn dalam (Ulumudin et al., 2018) menjelaskan kriteria kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan. Berdasarkan temuan di lapangan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan implementor menilai bahwa besaran manfaat yang diberikan setiap bulannya belum bisa mencukupi kebutuhan pangan KPM selama satu bulan. Sebab, besaran jumlah bantuan dari BPNT ini tidak disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga (Ulumudin et al., 2018). Hal ini ditunjang dengan penelitian (Dinarila Balqis et al., 2020). Dalam proses validasi di tahun 2019 masih terdapat data dari Pusat Data dan Informasi tentang Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga mengakibatkan data tersebut belum tepat sasaran terhadap calon peseta keluarga penerima manfaat.

Hal yang berbeda disampaikan (Fuady & Abadi, 2017) Program Bantuan Pangan Non Tunai memiliki faktor pendukung yaitu dengan pemerintah atau pelaksanaan kegiatan cukup tanggap akan kendala-kendala yang terjadi pada Keluarga Penerima Manfaat. Hasil penelitian (Eko Yudianto, 2019) adalah faktor penentu implementasi program BPNT di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo disebabkan oleh faktor sikap (disposisi) kurang berhasil dalam kualitas beras, sasaran rumah tangga penerima manfaat BPNT, jumlah beras yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat.

4.2 Impact Program BPNT terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di masa Pandemi

Pelaksanaan BPNT mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Program BPNT mulai dilaksanakan di Kota Padang pada tahun 2017, dimana kota Padang merupakan salah satu Pilot Project dari 44 kota terpilih di Indonesia. Pelaksanaan program BPNT di Desa Seboro kabupaten probolinggo merupakan langkah pemerintah untuk mengurangi beban KPM dalam kebutuhan pangan. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa program BPNT ini memberikan dampak kepada kehidupan perekonomian masyarakat dalam kaitannya dengan pangan keluarga. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bahwa mayoritas masyarakat merasa terbantu dengan adanya BPNT tersebut.

Temuan ini sesuai dengan pendapat Suharto (2012:62) dalam (Laurentcia & Yusran, 2021) tentang tujuan dari kebijakan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan keluarga, dimana dalam program ini diberikan melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Menurut Suharto (2012:62) bahwa salah satu tujuan kebijakan sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif (Fadlurrohim et al., 2020). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pemenuhan kebutuhan bukanlah kebutuhan pangan individu melainkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehingga ketidaksesuaian besaran bantuan yang diterima tetap dianggap kecil karena atas kecukupannya bernilai kurang.

5. Kesimpulan

Efektifitas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di masa COVID 19 yang dilaksanakan di Desa Seboro Kabupaten Probolinggo telah efektif dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan ketepatan sasaran penerima program BPNT sesuai dengan DTKS yang dimiliki pemerintah desa. Ketepatan dalam waktu penyaluran yang dilakukan selama 1 bulan sekali yakni setiap tanggal 15. Selain itu proses penyaluran pemerintah melakukan sosialisasi terintegrasi baik melalui *door to door* maupun melalui informasi digital. Tujuan sosialisasi terintegrasi ini adalah untuk memberikan bentuk bantuan yang diterima, kapan penyaluran serta lokasi penyaluran. Untuk membiasakan terhadap pencegahan virus COVID 19 pemerintah Desa Semboro mewajibkan untuk melakukan protocol kesehatan saat penyaluran bantuan tersebut semasa pandemi. Temuan dilapangan terkait program BPNT tersebut adalah masyarakat merasa bahagia karena telah dibantu dalam memenuhi kebutuhan pokok

Nining Ailiyah, M. Asif Nur Fauzi, Nur Chalimah, Mohammad Affan Wahyudi

Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Seboro Kabupaten Probolinggo di Masa Pandemi

masyarakat selama 1 bulan namun merasa tidak tercukupi bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama 1 bulan.

6. Saran

Berdasarkan temuan dilapangan bahwa masyarakat merasa bantuan BPNT yang diterima masyarakat dianggap kurang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Maka dapat disarankan kepada pemerintah desa untuk dapat melakukan beberapa hal diantaranya:

- a. Memberikan edukasi dan wawasan kepada pengelola bantuan yang diterima sehingga pemenuhan kebutuhan selama 1 bulan dapat tercukupi
- b. Memberikan kontrol kepada KPM pasca menerima bantuan untuk melakukan *need assessment* kepada tolak ukur kecukupan bantuan yang akan diterima berikutnya
- c. Pemerintah desa harus melakukan *upgrading* data penerima bantuan sebagai acuan pengajuan penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai sesuai dengan data yang telah diperbarui.

Ucapan terimakasih: Kami sampaikan terima kasih kepada informan, pengurus desa serta Stebi Syaikhona Kholil yang telah memberikan peluang waktu penelitian tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini dapat diselesaikan secara optimal. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada tim atas penyelesaian penelitian ini. Kami juga menyampaikan terimakasih dan harapan kepada pengelola jurnal sosio-konsepsia untuk dapat publikasi dan berkontribusi dalam menambah khazanah keilmuan di bidang kesejahteraan sosial bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Dinarila Balqis, A. S., Iskatinah, I., & Hariadi, W. (2020). Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Berdasarkan Permensos Ri No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1). <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.133>
- Dini, A. R., Nurmala, Y., & Halim, A. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(13).
- Djaenal, R., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Eko Yudianto, Y. (2019). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo*.
- Fadlurrohim, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi). *Share : Social Work Journal*, 9(2). <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.20326>
- Fuady, R. L., & Abadi, A. M. (2017). Penentuan Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dengan Menggunakan Fuzzy Multiple Atribute Descission Making. *Seminar Matematika Dan Pendidikan Matematika*.
- Garis, R. R., & Desfirani, L. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(1).
- Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. V. (2020). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) DAN Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(01).
- Habibullah, H. (2019). Inklusi Keuangan dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. *Sosio Informa*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1657>
- Habibullah, Jayaputra, A., Pudjianto, B., & Muhtar. (2022). Inclusive Finance in Sembako Program : An Overview From Proper Governance Perspective. *ASEAN Social Work Journal*, 10(2), 24–34.
- Haryanto, R., & Fitri, M. (2019). Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Duri di Tengah Social Distancing Pandemi Covid 19. *Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(3), 133–146.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi covid-19. *Jurnal Perspektif*, 18(2), 201–208.
- Laurentcia, S., & Yusran, R. (2021). *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan Nining Ailiyah, M. Asif Nur Fauzi, Nur Chalimah, Mohammad Affan Wahyudi*
- Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Seboro Kabupaten Probolinggo di Masa Pandemi

- di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. 4(1), 7–17.
- Moleong, J. L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. 32–36.
- Muhtar, M., Pudjianto, B., & Habibullah, H. (2022). Social approach to stunting prevention in Blora, Central Java, Indonesia. *Simulacra*. <https://doi.org/10.21107/sml.v5i2.15909>
- Nasution, R. A. H., & Hutabarat, D. T. R. Y. H. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menekan Angka Kemiskinan Dan Pengangguran Di Masa Pandemi. *Jurnal Keadilan*, 2(2 Juli).
- Rahma, A. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik Oleh (Anisa Rahma Dini, Yunisca Nurmala, Abdul Halim)*.
- Ulumudin, A., Nugroho, K. S., & Yusuf, M. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Wulandari, R. M. D. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Karangduwur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).



Spiritual Resilience: Analisis Faktor Yang Meningkatkan Kesejahteraan Mental Ibu Rumah Tangga di Cirebon

Meli Fauziah^{1*} , Vera Octavia¹ 

1 Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN Sunan Gunung Djati, Jawa Barat

* Korespondensi: melifauziah@uinsgd.ac.id ; Tel: 082128564618

Diterima: 28 Juni 2023; Disetujui: 27 November 2023; Diterbitkan: 29 November 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat spiritual para ibu rumah tangga dan memverifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketahanan spiritual di Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni *mix method*, kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif. Subjek penelitiannya yaitu para ibu rumah tangga berjumlah 36 orang dengan kategori miskin di Wilayah Kabupaten Cirebon. Data kualitatif diperoleh melalui *in-depth interview*, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari penyebaran angket yang disusun dengan mengacu pada *Spiritual Transcendence Scale* dari Piedmont. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat spiritualitas para ibu rumah tangga tersebut sebesar 4,52 yang berada pada kategori tingkat spiritualitas yang tinggi. Hasil analisis faktor ketahanan spiritualitas menunjukkan bahwa yakin pada kematian sebanyak 94,4%, perasaan tenang dan bahagia setelah melakukan ritual ibadah sebanyak 86,1 %, keyakinan akan kehadiran Tuhan sebanyak 77,8%, yakin bahwa Tuhan selalu ada untuk menolong hambaNya sebanyak 77,8%, sisanya faktor lain dapat meningkatkan kesejahteraan mental para Ibu rumah tangga. Tingkat ketahanan spiritual yang tinggi terbukti mampu menjadikan mental seorang ibu rumah tangga sejahtera sehingga ketahanan keluarga terjaga. Temuan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan khususnya para penyedia layanan sosial untuk melakukan pendekatan dari aspek spiritual bagi kesehatan mental seseorang.

Abstrak: This study aims to determine the level of spirituality and to analyze the factors that increase the spiritual resilience of housewives in Cirebon Regency. The method used in this study is the mix method, a combination of qualitative and quantitative methods. The research subjects are 36 low-income housewives from the Cirebon district are the study's participants. In depth-interviews were used to gather qualitative information, and distribution of a questionnaire built using the Piedmont Spiritual Transcendence Scale provided quantitative information. The result showed that the average spirituality level of housewives was 4,52 which was in the category of high spirituality level. According to the analysis of the spirituality resilience factors, the faith in death was 94,4 %, the satisfaction from participating in religious rituals was 86,1 %, the belief in God presence was 77,8%, the belief that God always helps his creation was 77,8%, and the rest of the other factor can help the household mother's mental well-being. It has been demonstrated that having high level of spiritual resilience can improve a mental housewives' health and activate family resilience. The findings of this research can advance knowledge in society and highlight the necessity for social service provider to treat mental health. From a spiritual perspective.

Kata kunci: Spiritual Resilience, Piedmont, Ibu Rumah Tangga, Cirebon

1. Pendahuluan

Budaya patriarki yang berkembang di Indonesia telah menempatkan posisi sosial kaum perempuan lebih rendah daripada kaum laki-laki. Persepsi kolektif masyarakat seringkali melihat perempuan sebagai objek dan menempatkan laki-laki pada posisi yang istimewa. Sistem patriarki sesungguhnya telah memberi beban ganda bagi seorang wanita yang telah menikah yakni menjadi isteri, menjadi ibu, menjalankan peran reproduksi, sebagai anggota masyarakat bahkan tak jarang diantaranya ada yang ikut membantu suami mencari nafkah (Rosalina and Hapsari 2012). Sebagai seorang isteri, perempuan dituntut untuk melayani suami. Sebagai seorang ibu, perempuan bertanggungjawab terhadap pendidikan, pengasuhan anak dan tumbuh kembang anak-anaknya. Hal tersebut seringkali membuat seorang wanita yang memilih mendedikasikan seluruh waktunya untuk keluarga atau ibu rumah tangga kerap kali merasa stress.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat stress seorang ibu rumah tangga lebih besar dibandingkan dengan ibu yang bekerja (Rosalina and Hapsari 2012). Rutinitas dan aktifitas yang sama selama 24 jam telah menguras emosi para ibu rumah tangga. Faktanya saat semua kegiatan dilakukan di rumah, tidak hanya menyebabkan gangguan fisik yang berasal dari tumpukan emosi serta faktor kejiwaan, tetapi juga menimbulkan guncangan pada diri seseorang, karena lingkungan sosial mempengaruhi pikiran negatif, kecemasan dan lain sebagainya. (Sunarti 2020)

Ketidakpedulian dan sikap abai suami terhadap perasaan lelah isteri seringkali memicu terjadinya pertengkaran dalam keluarga. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga serba kekurangan makin menambah beban fisik dan mental seorang isteri. Bahkan ada kasus seorang ibu rumah tangga di Brebes tega membunuh anak kandungnya karena tekanan ekonomi dan kurangnya perhatian suami (Putri 2022). Jika perasaan-perasaan negative seperti perasaan sedih, marah, khawatir, dan mengalami depresi serta stress yang dibiarkan berlarut-larut maka akan meruntuhkan ketahanan keluarga.

Data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2021 terdapat 98.088 kasus perceraian di Jawa Barat. Kasus perceraian di Jawa Barat paling banyak ditemukan di Indramayu, dengan jumlah kasus 8.026 kasus, Kabupaten Bandung sebanyak 7.888 kasus perceraian dan diikuti Cirebon sebanyak 7.112 kasus (Maulana n.d.). Faktanya, banyak gugatan perceraian diajukan oleh pihak perempuan. Terutama perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga dari tingkat ekonomi menengah kebawah atau miskin. Ini menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung mengedepankan perasaan saat menghadapi masalah rumah tangga. Seorang perempuan dapat mengalami penurunan kesehatan fisik dan mental sebagai akibat dari tekanan emosional yang dialaminya. Ketidakberdayaan perempuan dalam menghadapi konflik internal dan eksternal dari lingkungannya lebih jauh akan memberi dampak negatif tidak hanya pada dirinya tetapi berdampak pada anggota keluarga lainnya. Jika seorang perempuan tidak dapat mengendalikan dan mengatasi perasaannya, hal itu dapat runtuhan ketahanan keluarga dan menyebakan perceraian. Tatanan sosial masyarakat menjadi rapuh akibat terjadinya perceraian. Banyak kasus dalam keluarga, seperti perceraian, KDRT, kenakalan remaja, dan penyalahgunaan narkoba, berasal dari keluarga (Zakaria et al. 2020).

Penting bagi suatu keluarga memiliki ketahanan ekonomi, ketahanan spiritual, ketahanan fisik dan ketahanan psikologis (Hibana 2020). Karena kehidupan harmonis, damai, dan religius dapat tercapai jika keluarga memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Ketahanan keluarga yakni kemampuan keluarga tersebut dalam mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapinya (Sunarti, 2020). Sebuah keluarga akan memiliki ketahanan, jika keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimiliki keluarga (Tenri Awaru 2021). Sebaliknya, kekacauan akan terjadi jika setiap anggota keluarga tidak mampu menjalankan perannya dengan baik. Khususnya seorang ibu mempunyai kedudukan dan peran yang signifikan dalam menjaga ketahanan keluarga. (William, J Goode dalam Tenri Awaru 2021).

Jika perempuan ditempatkan sebagai madrasah pertama dan utama dari seorang anak, seharusnya seorang perempuan mempunyai ketahanan yang lebih dibandingkan anggota keluarga lainnya. Ketahanan keluarga dapat diibaratkan sebagai sebuah rumah. Diperlukan semua komponen untuk membangun rumah, salah satunya yakni pondasi. Komponen dasar yang akan menopang struktur bangunan secara keseluruhan. Begitupun dengan ketahanan keluarga diperlukan nilai, tujuan serta sumber daya manusia yang handal untuk membangunnya (Sunarti 2020). Oleh karena itu, penting bagi seorang ibu rumah tangga memiliki ketahanan, khususnya ketahanan spiritual. Ketahanan spiritual merupakan bagian terpenting dalam membentuk kesehatan dan kesejahteraan seseorang (Piedmont 2001) Dengan demikian, konsep kepasrahan sangat penting untuk membangun ketahanan diri, keluarga, dan komunitas. Menurut Walsh (2016), *spiritual beliefs and religious of individual and families are the core of all families coping and adaptation.* kepercayaan spiritual dan keyakinan religius setiap individu dan keluarga adalah inti dari semua jenis adaptasi dan coping keluarga.

Terdapat fenomena menarik di Kabupaten Cirebon terkait dengan maraknya gugatan perceraian dan kasus kejahatan yang bersumber dari ketidak harmonisan keluarga. Ibu rumah tangga di Kabupaten Cirebon masih dapat hidup normal dan bertahan menjalani kehidupannya meskipun memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Berdasarkan hasil observasi penulis sebelum dan selama

melakukan penelitian, para ibu rumah tangga tersebut terbukti mampu beradaptasi dengan kesulitan, tekanan hidup, sehingga secara fisik dan mental mereka tetap sehat dan mampu bertahan dalam pernikahannya meskipun kondisi suami tidak berpenghasilan. Kemampuan bertahan dengan kesulitan itu yang disebut dengan ketahanan keluarga (Manning 2019). Menurut Ulfie (Nursani, Ulfiana, and Hidayati, 2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa keluarga yang memiliki ketahanan spiritual yang baik, maka dia akan mampu beradaptasi dengan setiap perubahan dengan baik, akan mampu mengatasi setiap persoalan atau pun kesulitan hidup, akan mampu menyelesaikan konflik, baik dalam dirinya maupun lingkungannya, dan akan mampu berdamai dengan situasi yang menekan sekalipun. Kehidupan spiritual yang baik akan membangun masyarakat yang kuat secara spiritual dalam menghadapi masa sulit (Faigin and Pargament 2011)

Ketahanan spiritual merupakan salah satu pilar penting yang harus dimiliki oleh suatu keluarga diantara ketahanan lainnya yakni ketahanan ekonomi, ketahanan fisik, ketahanan social dan ketahanan psikologis (Sunarti et al. 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Arwati dkk yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat spiritual keluarga pasien maka semakin rendah mengalami potensi kecemasan (Arwati, Manangkot, and Yanti 2020). Hasil penelitian Faigin and Pargament (2011) pada wanita usia dewasa dan menjelang usia senja menyatakan bahwa manusia menanggung banyak peristiwa kehidupan yang seringkali menimbulkan frustasi. Faktor yang membuat manusia dapat berkembang atau gagal dalam menghadapi kesulitan hidup yaitu ketahanan spiritual.

Kajian tentang spiritual & ketahanan keluarga dilakukan pula oleh Crawford pada para remaja usia 13 sampai 17 tahun. Variabel diukur menggunakan *cross sectional associations* dengan menggunakan beberapa alat ukur dan tahapan pengukuran yakni VIA Inventory dari Hebrew untuk mengukur ketahanan pemuda, dan *The Life Orientation Test Revised* (LOT) untuk mengukur tingkat optimisme pemuda. Kemudian mengukur spiritualitas dengan beberapa tahapan yakni menggunakan alat ukur *The Faith Maturity Scale* (FMS), *the Duke University Religious Indeks* (DUREL) & *the Spiritual Transcendence Scale* (STS) dari Piedmont. Kesimpulannya yaitu bahwa remaja yang memiliki tingkat spiritual & kekuatan interpersonal yang tinggi memiliki kesejahteraan dan kehidupan sosial yang baik, sementara remaja yang memiliki tingkat spiritual yang rendah, dengan tingkat intelektual yang tinggi memiliki kehidupan interpersonal yang rendah. Artinya, spiritual memberikan kebahagiaan dalam diri remaja untuk berhubungan dengan lingkungannya. Temuan lainnya yakni bahwa remaja dengan tingkat spiritual yang tinggi memiliki tingkat kepuasan hidup yang tinggi pula, emosi yang positif serta perilaku sosial yang baik (Crawford, Wright, and Masten 2006)

Berbagai kajian tentang spiritualitas telah membuktikan bahwa ada hubungan antara tingkat spiritual seseorang dengan kesejahteraan mental seseorang (Manning et al. 2019), dengan subjek lansia, pasien dan pemuda. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat spiritual para ibu rumah tangga di wilayah Kabupaten Cirebon? Dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mental ibu rumah tangga? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat ketahanan spiritual ibu rumah tangga dan memverifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mental ibu rumah tangga di Kabupaten Cirebon.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed methods*, yakni penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif (Creswell 2010). Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif untuk mengukur tingkat spiritualitas para ibu rumah tangga. Kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif untuk mendekripsikan data yang belum dapat dijelaskan oleh data kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah para ibu rumah tangga yang berasal dari beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Cirebon yakni Kecamatan Kedawung, Plered, Ciledug, Tengah Tani, dan Greded. Pemilihan wilayah tersebut mengacu pada data BPS Kabupaten Cirebon tahun 2021 sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi (Wahyudi Sugeng 2021).

Pengambilan sampel informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling purposive*, yakni berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Peneliti memilih kriteria yaitu: 1) Ibu rumah tangga dari keluarga yang tergolong miskin (tingkat ekonomi rendah), karena para ibu rumah tangga tersebut dianggap mempunyai tekanan hidup yang cukup berat. 2) Ibu rumah tangga dengan status menikah; 3) Ibu rumah tangga yang mampu membaca dan menulis, hal ini diperlukan dalam pengisian angket. Berdasarkan pada kategori umur dari Depkes RI, maka rentang umur ibu rumah tangga yang dijadikan subjek penelitian dalam penelitian ini umur dibagi dalam 4 kategori yakni umur di bawah 35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun, dan umur lebih dari 56 tahun.

Langkah pertama penelitian ini yaitu uji coba kuesioner kepada 10 orang responden guna menguji validitas dan reliabilitas. Diperoleh hasil nilai koefisien korelasi setiap item pernyataan lebih besar dari 0,3 dan dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dalam angket tersebut valid. Nilai koefisien *alpha* cronbach sebesar 0,942, nilai ini lebih besar dari 0,70 sehingga dapat dinyatakan bahwa angket tersebut reliabel dan layak dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data untuk mengukur tingkat spiritualitas subjek dalam penelitian ini akan menggunakan angket, kemudian dianalisis menggunakan *Spiritual Transcendence Scale* (STS) yang dikembangkan oleh Piedmont (2001). Dengan kisi-kisi yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kisi-kisi Angket *Spiritual Transcendence Scale*

Definisi Operasional	Aspek	Skala	Nomor Item
<i>Spiritual Transcendence</i> yaitu suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu untuk melihat dunia dari perspektif yang luas dan berbeda secara objektif. Perspektif transendensi merupakan suatu pandangan dasar yang menyeluruh dan komprehensif tentang alam semesta. (Piedmont, 2001)	<i>Prayer fulfillment</i> (pengalaman ibadah)	Interval	1-8
	<i>Wholeness of Humanity</i>	Interval	9-11
	<i>Greater Purposes</i> (keterhubungan universal)	Interval	12-14
	<i>Universal Connectedness</i> (tujuan yang lebih besar)	Interval	15-19
	<i>Closeness to the deceased</i> (kedekatan dengan kematian)	Interval	20-24

Angket yang disusun dalam penelitian ini terdiri dari 24 item pernyataan (dapat dilihat pada Tabel 2), dengan sistem *scoring*nya menggunakan skala likert yang terdiri dari lima alternatif jawaban yaitu sangat tidak setuju = 1, tidak setuju = 2, ragu-ragu = 3, setuju = 4 dan sangat setuju = 5.

Tabel 2. Angket Penelitian

Aspek	Pernyataan	STS	SS	S	R	TS
Ibadah	1. Saya merasa tenang setelah beribadah					

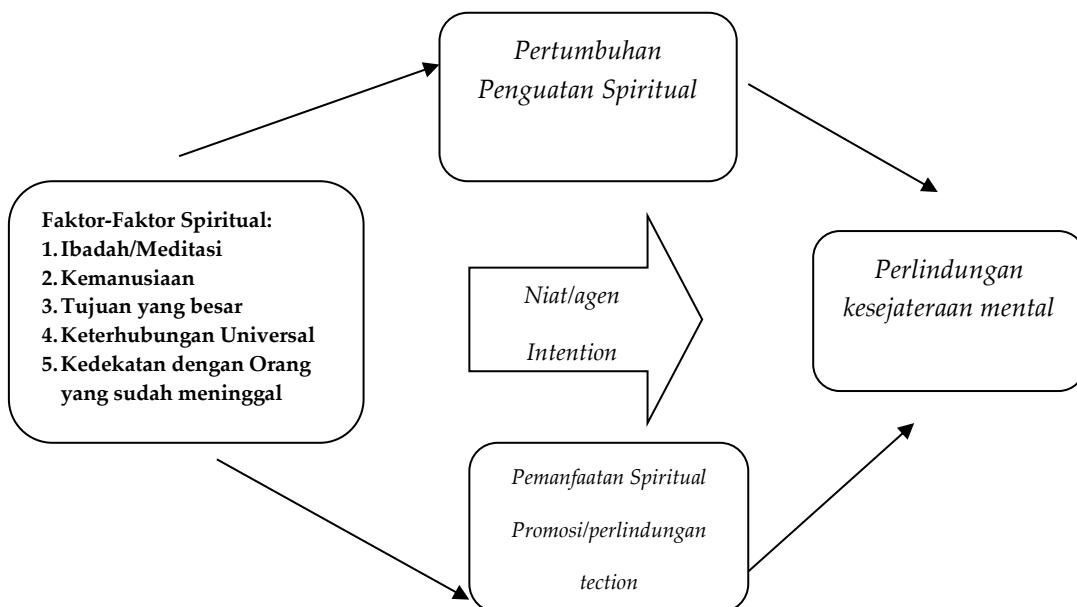
	2. Saya merasakan kebahagiaan dan kenikmatan dalam beribadah.
	3. Saya menemukan kekuatan diri setelah beribadah.
	4. Saya yakin Tuhan itu ada untuk membantu hambaNya
	5. Dengan beribadah hidup terasa lebih bermakna
	6. Saya tidak pernah melalaikan ibadah karena urusan dunia.
	7. Saya memiliki keinginan untuk dekat dengan Tuhan.
	8. Kedekatan dengan Tuhan membuat saya tidak mersa kesepian.
Kemanusiaan yang Menyeluruh	9. Saya yakin fitrah manusia pada hakikatnya baik
	10. Saya yakin semua orang bersaudara
	11. Saya selalu ingin membantu dan berbagi terhadap sesama.
Keterhubungan Universal	12. Saya tidak bergaul baik dengan semua orang
	13. Saya yakin bahwa apa yang saya lakukan saat ini akan berpengaruh pada anak cucu saya kelak
	14. Saya yakin bahwa segala sesuatu yang ada dan terjadi di dunia saling berkaitan.
Tujuan yang Lebih Besar	15. Saya yakin Tuhan menciptakan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia.
	16. Tujuan hidup saya lebih terarah dengan mengenal Tuhan
	17. Saya yakin bahwa setiap perbuatan akan diperhitungkan dan mendapat ganjarannya
	18. Saya yakin bahwa takdir apapun dari Tuhan adalah yang terbaik untuk saya
	19. Saya merasa bahagia dan bersyukur dengan kehidupan yang saya miliki
Kedekatan dengan kematian	20. Saya yakin hidup kedepan akan lebih baik
	21. Saya merasa memiliki ikatan batin dengan keluarga yang telah meninggal
	22. Saya yakin ada kehidupan setelah mati

23. Kematian keluarga mempengaruhi cara pandang saya tentang kehidupan

24. Saya yakin semua pasti mati

Dari skor jawaban masing-masing subjek terhadap pernyataan dalam angket tersebut akan digunakan untuk menentukan kategorisasi tingkat spiritualitas seseorang; apakah rendah, sedang, atau tinggi. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka menunjukkan tingkat spiritualitas subjek tinggi. Sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh, maka menunjukkan rendahnya tingkat spiritualitas subjek.

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) kepada 36 orang ibu rumah tangga. Setelah data dikumpulkan, tahap berikutnya direduksi sesuai dengan kebutuhan penelitian dan dianalisa kembali untuk akhirnya ditarik kesimpulan. Adapun *frame work* penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Framework Ketahanan Spiritual dalam membangun kesejahteraan mental

3. Hasil

3.1. Karakteristik Responden

Setelah melalui verifikasi data lapangan maka diperoleh profil atau karakteristik 36 orang ibu rumah tangga yang menjadi responden dalam penelitian ini, yang meliputi karakteristik responden berdasarkan umur, tingkat pendidikan dan jumlah anak. Sebagaimana disajikan dalam Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Persentase
------	-----------	------------

Meli Fauziah, Vera Octavia

Spiritual Resilience: Analisis Faktor Yang Meningkatkan Kesejahteraan Mental Ibu Rumah Tangga di Cirebon

Di bawah 35	13	36,1
36 – 45	10	27,8
46 – 55	9	25
56 ke atas	4	11,1

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa mayoritas responden berusia di bawah 35 tahun, yaitu sebanyak 13 orang atau sekitar 36,1%, ada 10 orang atau sekitar 27,8% berusia 36-45 tahun, ada sebanyak 9 orang atau sekitar 25% berusia 46-55 tahun dan ada 4 orang atau sekitar 11,1% berusia di atas 56 tahun.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
Tidak Sekolah	3	8.33
SD	8	22.22
SMP	10	27.78
SMA/SMK	13	36.11
D3	1	2.78
S1	1	2.78

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa mayoritas responden berpendidikan SMA/SMK, yaitu sebanyak 13 orang atau sekitar 36%, ada 10 orang atau sekitar 28% berpendidikan SMP, ada sebanyak 8 orang atau sekitar 22% berpendidikan SD, ada sebanyak 3 orang atau sekitar 8% yang tidak bersekolah dan hanya 1 orang yang berpendidikan D3 dan S1.

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Anak

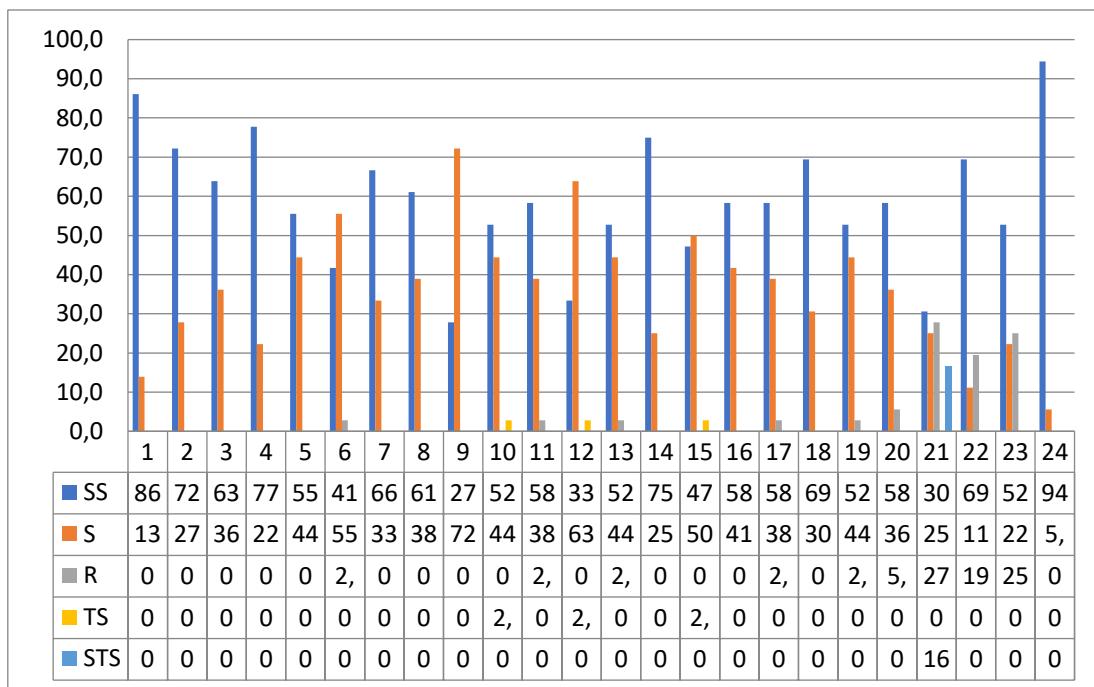
Jumlah Anak	Frekuensi	Persentase
1	4	11,1
2	14	38,9
3	11	30,6
> 3	7	19,4

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki 2 orang anak, yaitu ada sebanyak 14 orang atau sekitar 38,9%, kemudian ada 11 orang atau sekitar 30,6% yang memiliki 3 orang anak, sisanya hanya ada 4 orang yang memiliki 1 orang anak dan ada 7 orang yang memiliki lebih dari 3 orang anak atau sekitar 19,4%.

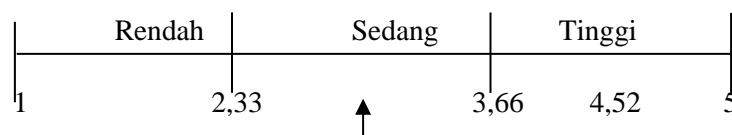
3.2. Analisis Data Kuantitatif

Setelah data angket dengan dua puluh empat pernyataan terkumpul dan diolah dengan menggunakan bantuan *software* statistik, diperoleh hasil rekapitulasi jawaban para ibu rumah tangga di wilayah Kabupaten Cirebon yang disajikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Distribusi Jawaban Responden

Untuk melihat tingkat spiritualitas para ibu rumah tangga berdasarkan nilai dari rata-rata skor masing-masing dengan menggunakan garis kontinum. Di mana diketahui bahwa skor terendah dari pilihan jawaban dalam angket adalah 1, skor tertingginya adalah 5, maka selisih skor tertinggi dan terendah adalah 4, sehingga didapatkan lebar skalanya sebesar 0,8, maka didapatkan bentuk garis kontinum dengan 3 kategori yang bisa digunakan untuk menentukan kategori/klasifikasi tingkat spiritualitas ibu rumah tangga secara rata-rata skor dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Garis Kontinum

Berdasarkan gambar di atas terlihat kebanyakan ibu rumah tangga menjawab sangat setuju dan setuju, hanya pada item ke-21, 22, dan 23 saja ada yang menjawab ragu-ragu yang hampir seimbang dengan sangat setuju dan setuju dan hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai rata-rata dari skor total jawaban responden adalah sebesar 4,52, dimana nilai rata-rata tersebut berada di antara interval nilai

Meli Fauziah, Vera Octavia

Spiritual Resilience: Analisis Faktor Yang Meningkatkan Kesejahteraan Mental Ibu Rumah Tangga di Cirebon

3,66 dan 5, yang artinya tingkat spiritualitas 36 orang ibu rumah tangga di wilayah Kabupaten Cirebon tersebut termasuk tinggi.

3.3. 3.3 Hasil Analisis Data Deskriptif

Mengacu pada hasil analisis data kuantitatif menunjukkan bahwa sebanyak 94,4% faktor yang mempengaruhi tingkat spiritualitas para ibu rumah tangga adalah keyakinan akan kematian. Sebagaimana diutarakan oleh ibu Heni Sumsilah (48 tahun) "Saya sadar kematian pasti terjadi, apalagi pada saat Corona, setiap hari ada saja orang yang meninggal seolah kematian itu sangat dekat. Maka dari itu saya merasa perlu memperbaiki ibadah saya, untuk bekal akhirat nanti". (Hasil wawancara, 20 Mei 2021). Faktor kedua yakni perasaan tenang setelah beribadah sebanyak 86,1%. Seperti yang disampaikan oleh Saria, "Namanya hidup pasti selalu aja ada masalah. Apalagi kalo suami lagi gak ada kerjaan bikin kepala pusing. Anak minta jajan, gak ada uang. Yaa...saya cuma bisa mengadu sama Allah, dengan begitu saya merasa lebih tenang dan lebih bersemangat lagi menjalani hidup. Karena saya masih diberi kenikmatan untuk bisa ibadah" (Hasil Wawancara , 24 Mei 2021)

Sumiati mengemukakan hal yang serupa bahwa

Saya merasa stress dan tertekan oleh beban hidup saat ini, semua aktifitas dibatasi. Cari kerja sulit, suami kadang nganggur. Sebagai ibu rumah tangga sebisa mungkin saya muter otak gimana caranya bertahan hidup. Stress klo dipikirkan tapi saya berusaha pasrah dan berdoa semoga Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga" (Hasil Wawancara, 8 Juni 2021).

Begitupun yang disampaikan oleh ibu Herni Sumsilah (48 tahun),

Disaat saya mengalami banyak masalah, saya selalu mengadu kepada Allah, karena di situ saya merasakan ketenangan, dan bisa berpikir lebih baik." (Hasil Wawancara, 6 Mei 2021)

Spiritualitas merupakan alat untuk mempromosikan dan mempertahankan ketahanan di akhir kehidupan dalam lima domain utama; ketergantungan pada hubungan, transformasi spiritual, coping spiritual, kekuatan keyakinan dan komitmen terhadap nilai-nilai dan praktik spiritual.

Selain itu, sebanyak 77,8 % berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada untuk membantu menyelesaikan setiap persoalan hidup yang dihadapi. Ketahanan spiritual adalah kemampuan untuk seseorang bertahan melewati kesulitan, stress serta trauma dengan menggunakan sumber daya spiritual, baik dari internal dalam dirinya maupun eksternal dari lingkungannya melalui seperangkat keyakinan, prinsip atau nilai yang dia yakini.

Karena keyakinan pada Tuhan, maka mereka merasa mampu melewati semua kesulitan hidup. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nana (40 th), "Saat usaha suami sepi, bahkan kadang modal habis untuk makan. Dan besok tidak bisa lagi berjualan. Pinjam ke saudara pun udah malu karena terlalu sering. Rasanya mau nangis..,tetapi dalam hati saya selalu punya keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menolong hambaNya. Pasti suatu saat entah kapan keadaan akan berubah." (Hasil wawancara, 21 Mei 2021)

Bagi ibu rumah tangga yang murni mengandalkan sepenuhnya penghasilan dari suami yang pekerjaanya serabutan tentu sangat minim untuk mencukupi semua kebutuhan hidup. Beban ekonomi tersebut makin menambah beban hidup mereka. Seperti yang dikeluhkan oleh Ibu Sri Hijriyati (usia 46 tahun), "Sebagai seorang ibu rumah tangga, saya sering menangis karena merasa hidup begitu sulit dan tidak nyaman. Namun saya pasrahkan segala persoalan hidup pada Allah SWT." (Hasil Wawancara, 3 Mei 2021)

Lebih lanjut Ibu Nana (40 tahun) menceritakan bahwa :

Pada saat pandemi, kehidupan ekonomi keluarga berada pada titik terendah. Sebelum pandemi ekonomi keluarganya sudah sulit, karena pasar tempat suami berjualan mengalami kebakaran sehingga harus pindah ke kios sementara. Pandemi semakin membuat kondisi ekonomi keluarga terpuruk, karena tidak ada pemasukan sama sekali. Bahkan suami harus meminjam uang ke

saudara. Tetapi saya tetap yakin pada Allah bahwa Dia akan memberi jalan keluar setiap masalah" (Hasil Wawancara, 5 Mei 2021)

Tentu saja tidak mudah bagi mereka untuk beradaptasi dengan semua perubahan yang serba cepat terjadi. Toth dalam Craven dan Himle (1996) menyatakan perubahan dalam kehidupan dan krisis yang dihadapi tersebut merupakan pengalaman spiritual yang bersifat fisikal emosional. Untuk dapat bertahan di tengah situasi pandemi, diperlukan imunitas dari dalam yakni ketahanan spiritual.

Adapun Ibu Heni Sumsilah (48 tahun),

Saat saya stress, saya selalu melihat ke bawah karena di situ banyak orang yang hidupnya lebih susah dan lebih berat beban hidupnya daripada saya, maka saya harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. (Hasil Wawancara, 8 Mei 2021)

Faigin and Pargament (2011) mengatakan bahwa "*reliance on spirituality also provides consolation and comfort throughout life and hopes for recovery during times of illness*" (ketergantungan pada spiritualitas memberikan penghiburan dan kenyamanan sepanjang hidup dan harapan untuk pulih selama masa sakit). Pemenuhan kebutuhan spiritualitas memberi kekuatan pikiran dan tindakan pada individu. K.Reivich (2002) menegaskan bahwa resiliensi tidak hanya berguna dalam mengatasi permasalahan, stress atau traumatis yang mereka rasakan. Akan tetapi hal positif lainnya, yaitu, orang yang resiliensi akan mendapatkan pengalaman hidup yang lebih banyak dan lebih bermakna dalam hidup.

Ketahanan spiritual adalah kemampuan untuk seseorang bertahan melewati kesulitan, stress serta trauma dengan menggunakan sumber daya spiritual, baik dari internal dalam dirinya maupun eksternal dari lingkungannya melalui seperangkat keyakinan, prinsip atau nilai yang dia yakini.

Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Annisa Nurahmah (27 tahun):

Seiring bertambahnya usia, saya merasakan perkembangan spiritual saya semakin mendalam, karena bantuan dan bimbingan suami, saya semakin merasa dekat dengan-Nya. (Hasil wawancara, 25 Mei 2021)

Peran orang terdekat, dalam hal ini suami sangat membantu para Ibu Rumah Tangga menjalani dinamika spiritualitas dalam dirinya (*spiritual journey*). Pengalaman individu sering digambarkan sebagai perjalanan spiritual yang melibatkan pencarian seumur hidup akan makna dan arah. Perjalanan fisik bersifat dinamis karena melintasi ruang dan waktu. Demikian pula perjalanan spiritual terjadi sepanjang perjalanan hidup seseorang, di seluruh tahap perkembangan fisik atau emosional apapun yang terjadi. Hal itu melibatkan berbagai dimensi pengalaman spiritual yang berubah.

Menurut Wagnild dan Collins dalam (Manning et al. 2019) seiring bertambahnya usia individu, ketahanan yang lebih besar dapat mengarah kepada usia yang lebih bermakna dan memuaskan. Dengan kata lain seseorang yang memiliki ketahanan spiritual yang baik di masa tua akan mampu menjadikan hidupnya penuh makna.

Makna hidup diperoleh melalui suatu perjalanan panjang yang senantiasa sarat dengan pengalaman-pengalaman pahit. Contohnya kehilangan seseorang yang dicintai (orang tua, suami atau pun anak) ataupun merasa ditinggalkan, seringkali menimbulkan luka atau trauma yang mendalam. Kematian keluarga dan orang-orang di sekitar baik yang terjadi secara mendadak ataupun beruntun sangat mengguncangkan batin. Kesedihan, ketakutan, kehilangan dan kekhawatiran menghantui jiwa setiap orang.

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat spiritualitas para Ibu Rumah Tangga di wilayah Kabupaten Cirebon berada pada level yang tinggi, hal tersebut ditandai dengan kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan kesulitan dan mampu mengatasi serta melewati tekanan-tekanan hidup. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa sebanyak 94,4% faktor utama yang meningkatkan ketahanan spiritual para ibu rumah tangga tersebut yaitu keyakinan bahwa segala yang hidup pasti akan mati, faktor kedua yakni sebanyak 86,1 % para ibu rumah tangga merasakan ketenangan setelah beribadah. Faktor ketiga, sebanyak 77,8 % responden yakin akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Faktor keempat, sebanyak 77,8% responden menyatakan bahwa Tuhan akan senantiasa ada untuk menolong mereka keluar dari kesusahan dan persoalan hidup yang mereka hadapi. Dan faktor lainnya

Meli Fauziah, Vera Octavia

Spiritual Resilience: Analisis Faktor Yang Meningkatkan Kesejahteraan Mental Ibu Rumah Tangga di Cirebon

yakni diantaranya tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan Tuhan sebesar 75%, menemukan kekuatan diri setelah beribadah, sebanyak 63,9%, dengan beribadah, hidup ini terasa lebih bermakna, sebanyak 55,6%.

Tidak pernah melalaikan ritual ibadah karena urusan dunia, sebanyak 41,7%, memiliki keinginan untuk dekat dengan Tuhan, sebanyak 66,7%, kedekatan dengan Tuhan membuat tidak merasa kesepian, sebanyak 61,1%, percaya fitrah manusia itu baik, sebanyak 27,8%, keyakinan bahwa semua pemeluk agama bersaudara, sebanyak 52,8%, keinginan untuk selalu membantu dan berbagi terhadap sesama, sebanyak 58,3%, bergaul baik dengan semua orang, sebanyak 33,3%, yakin akan hukum sebab akibat atas suatu perbuatan, sebanyak 52,8%, yakin Tuhan menciptakan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia, sebanyak 75%, yakin bahwa segala sesuatu yang ada dan terjadi di dunia ini saling berkaitan, sebanyak 47,2%, yakin bahwa tujuan hidup akan lebih terarah dengan mengenal Tuhan, sebanyak 58,3%, yakin bahwa setiap perbuatan akan diperhitungkan dan mendapatkan ganjarannya, sebanyak 58,3%, yakin bahwa takdir apa pun dari Tuhan adalah yang terbaik, sebanyak 69,4%, merasa bahagia dan bersyukur dengan kehidupan dimiliki, sebanyak 52,8%, yakin hidup ke depan akan lebih baik, sebanyak 58,3%, merasa memiliki ikatan batin dengan seseorang yang telah meninggal, sebanyak 30,6%, yakin ada kehidupan setelah mati, sebanyak 69,4% respond, dan yakin bahwa kematian keluarga mempengaruhi cara pandang tentang kehidupan saat ini, sebanyak 52,8% responden.

4. Pembahasan

4.1. Tingkat Spiritualitas Para Ibu Rumah Tangga di Kabupaten Cirebon

Manning (2019) menyatakan bahwa spiritualitas merupakan sumber penting untuk mengelola kesulitan. Berdasarkan analisis data kuantitatif di atas menunjukkan bahwa dari 24 item *questionare*, faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat spiritualitas para Ibu Rumah Tangga di Kabupaten Cirebon adalah mengingat akan kematian, menjalankan ritual ibadah, karena mereka berkeyakinan bahwa dengan banyak ibadah, maka jiwa mereka terasa tenang dalam menghadapi semua persoalan hidup.

Foy, Drescher, dan Watson (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa spiritualitas merupakan bagian penting dari kehidupan bagi sebagian besar individu. Semakin tinggi tingkat spiritual seseorang maka orang tersebut akan memiliki ketahanan fisik dan mental yang baik (Nelson-Becker and Thomas 2020). Tingkat spiritual seseorang terbukti memberi dampak pada aspek psikologis dan fisik seseorang. Begitupun para ibu rumah tangga yang hidup dalam budaya patriarki seringkali menjalani peran ganda yang mengkondisikan mereka pada rutinitas dan aktifitas yang melelahkan. Sehingga berujung pada kondisi stress bahkan depresi.

Ketahanan spiritual yang tinggi pada diri seorang ibu, tidak hanya imunitas bagi kesehatan mentalnya tetapi juga berimbas pada ketahanan keluarga secara keseluruhan. Ketahanan spiritual yang tinggi membuat para ibu rumah tangga mampu memandang kehidupan dan menyikapi segala yang terjadi dalam hidup mereka dengan cara yang sederhana, tanpa bereaksi secara berlebihan dan berlarut dalam kesedihan yang mendalam, bahkan mereka selalu optimis dalam memandang hidup meski dalam keterbatasan. Jiwa ibu yang sehat akan menjadi pondasi keluarga sejahtera. Selain itu, tingkat pendidikan, besarnya penghasilan keluarga dan banyaknya jumlah anak bukan faktor utama yang mampu meningkatkan ketahanan spiritual mereka.

Faigin dan Pargament (2011) mengatakan, “*Reliance on spirituality also provides consolation and comfort throughout life and hopes for recovery during times of illness*”. Bahwa ketergantungan pada spiritualitas memberikan penghiburan dan kenyamanan sepanjang hidup dan harapan untuk pulih selama masa sakit. Pemenuhan kebutuhan spiritualitas memberi kekuatan pikiran dan tindakan pada individu. Begitupun menurut Reivich bahwa resiliensi tidak hanya berguna dalam mengatasi permasalahan, stress atau traumatis yang mereka rasakan. Akan tetapi hal positif lainnya, yaitu, orang yang resiliensi akan mendapatkan pengalaman hidup yang lebih banyak dan lebih bermakna dalam hidup (Reivich and Shatte 2002).

Jadi ketahanan spiritual merupakan salah satu bagian yang penting dalam membentuk kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Faktor yang lainnya yakni, faktor usia, peran keluarga, krisis, dan perubahan mampu meningkatkan ketahanan spiritual seorang individu. Banyak peristiwa yang terjadi seiring bertambahnya usia, tidak hanya memberikan pengalaman batin, tetapi juga telah mampu menguatkan jiwa mereka sehingga terbentuk suatu ketahanan dari dalam (imunitas) terhadap tekanan. Berdasarkan hasil analisis faktor ketahanan spiritual menggunakan skala Piedmont membuktikan bahwa keyakinan pada kematian, ritual ibadah, keyakinan pada Tuhan dan rasa bersyukur mampu meningkatkan kesejahteraan mental seseorang,

4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi tingkat Ketahanan Spiritual Para Ibu Rumah Tangga

Manusia sebagai makhluk spiritual hakikatnya memiliki keyakinan dalam dirinya terhadap hal transenden di luar dirinya. Keyakinan itulah yang memberi kekuatan dari dalam pada diri seorang individu untuk bisa melewati setiap persoalan dan berbagai problematika kehidupan. Ketahanan spiritualitas merupakan bagian penting dari kehidupan bagi sebagian besar individu .

Resiliensi adalah kemampuan manusia untuk menghadapi, mengatasi, menjadi kuat ketika menghadapi rintangan dan hambatan. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menjadi resilien, dan setiap orang mampu belajar bagaimana menghadapi rintangan dan hambatan dalam hidupnya sehingga nantinya menjadi resilien (Grotberg, 2003). Ungar (2008) dalam perspektifnya menyimpulkan bahwa 1) ketahanan adalah kapasitas individu untuk menavigasi jalan mereka menuju sumber daya yang menopang kesejahteraan, 2) ketahanan adalah kapasitas ekologi fisik dan sosial individu untuk menyediakan sumber daya ini, 3) ketahanan adalah kapasitas individu, keluarga dan komunitasnya. Peneliti berasumsi bahwa ketahanan tercipta dari kemampuan seorang individu dalam mengatasi masalah dalam dirinya dan dari lingkungan sekitarnya akan memberi dampak dan pengaruh kepada ketahanan yang lebih luas, yakni keluarga.

Menurut Reivich dan Shatte (2002) *“Resilience is the ability to persevere and adopt when the things go awry.”* Artinya Resiliensi merupakan suatu kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi ketika ada sesuatu hal yang berat. Individu dituntut untuk cepat dalam melakukan penyesuaian ketika mengalami masalah atau mendapat tekanan dalam hidupnya.

4.2.1 Keyakinan pada Kematian

Sebanyak 94,4 % responden meyakini akan kematian. Keyakinan yang positif tentang kematian membawa dampak pada cara berfikir seseorang dalam menyikapi semua peristiwa kehidupan yang mereka alami. Dengan yakin pada kematian, manusia memiliki arah tujuan hidup yang tidak terbatas pada sesuatu yang bersifat materi. Bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan dunia, sifatnya sementara. Begitupun kesulitan, kesedihan, kesakitan, tidak akan abadi. Perubahan dalam kehidupan dan krisis yang dihadapi tersebut merupakan pengalaman spiritual yang bersifat fisikal emosional (Toth dalam Craven dan Himle , 1996).

Keyakinan pada kematian memberi kekuatan dan kecerdasan pada seseorang untuk menyikapi hidup dengan bijaksana. Begitupun dengan para ibu rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan, mereka dapat tegar menjalani kehidupan karena meyakini kehidupan yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Kehidupan dunia hanyalah sarana untuk mencari bekal untuk kehidupan yang abadi. Mereka lebih mampu menerima perubahan, mengatasi rasa putus asa, dan mengembangkan ketahanan mental dalam menghadapi cobaan. Keyakinan tersebut telah menjadikan jiwa dan fisiknya sejahtera (Roberto et al. 2020)

Selain itu, keyakinan tentang kematian dapat menginspirasi seseorang untuk mengembangkan diri secara pribadi dan spiritual. Kesadaran akan ketidakkekalan hidup dapat mendorong seseorang untuk mencari pertumbuhan pribadi, kebaikan dan kedamian dalam diri mereka sendiri. Pada saat kondisi terpuruk, keyakinan pada kematian dapat menjadi penghiburan spiritual yang membantu seseorang mengatasi rasa ketidakberdayaan menghadapi problematika kehidupan.

Namun tentunya, perjalanan spiritual setiap orang berbeda. Begitupun dampaknya pada kesejahteraan mental dapat bervariasi. Beberapa orang mungkin menemukan kenyamanan dan ketenangan dalam keyakinan mereka, sementara yang lain mungkin menghadapi tantangan bahkan menganggap kematian adalah suatu penyelesaian instan dari sebuah masalah.

4.2.2 Perasaan tenang dan nikmat setelah beribadah

Sebanyak 86,1% responden menyatakan bahwa mereka merasakan ketenangan setelah beribadah. Sebagai makhluk spiritual, manusia perlu sarana komunikasi dengan Tuhannya yakni melalui ibadah. Ritual ibadah merupakan implementasi bagi keyakinan yang memberikan panduan dan cara bagaimana manusia mengenal Tuhannya. Jejak pendapat tahunan Gallup secara konsisten menunjukkan bahwa lebih dari 90% populasi AS melaporkan kepercayaan kepada Tuhan, dan sekitar 70% melaporkan afiliasi dengan komunitas agama dan menghadiri layanan keagamaan (Foy et al. 2011).

Seseorang dapat menemukan tujuan hidup yang lebih besar dan memberikan makna pada segala sesuatu yang dilakukan melalui ibadah. Melayani suami, mengasuh dan mendidik anak-anak, bertahan dalam pernikahan merupakan bagian dari ibadah. Ada perasaan kepuasaan, keberatian, dan motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ibadah dapat memberikan ketenangan pikiran dan mengurangi stress. Ketika seseorang beribadah, fokusnya beralih dari masalah sehari-hari ke dalam koneksi spiritual dan refleksi diri. Hal ini membantu mengurangi kegelisahan, kekhawatiran dan tekanan yang mungkin dirasakan. Sehingga muncul harapan dan optimisme setelah beribadah, karena dengan ibadah memperkuat keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar diri sendiri yang peduli dan mendukung keberhasilan seseorang dalam menghadapi tantangan hidup.

Ibadah melibatkan praktik-praktik ritual dan rutinitas tertentu seperti berdoa, meditasi atau membaca kitab suci. Ketahanan spiritual merupakan sebuah proses di mana kunci utama dari spiritualitas yakni struktur kepercayaan, praktik spiritual spiritualitas digunakan sebagai alat dan mekanisme untuk melindungi, meningkatkan kesejahteraan dan beberapa untuk menghasilkan pertumbuhan spiritual, semuanya bekerja sama untuk menciptakan pengalaman yang menghasilkan ketahanan spiritual. Proses ini menghasilkan kemampuan untuk menanggung kesulitan selama perjalanan hidup dan mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri dalam melakukannya seiring bertambahnya usia. Melakukan aktifitas ini secara teratur dapat mengembangkan disiplin diri dan menumbuhkan kebiasaan yang positif. Hal ini dapat memberikan struktur dan stabilitas dalam kehidupan sehari-hari, yang berdampak pada kesejahteraan mental.

Selain itu, saat beribadah merupakan momen-momen refleksi, meditasi yang memungkinkan seseorang menenangkan pikiran dan menghadirkan rasa damai dalam diri. Tentu hal ini dapat mengurangi kecemasan, meningkatkan konsentrasi, dan mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam. Sependapat dengan butir analisis Piedmont bahwa ibadah dapat memberikan ketenangan dan penghiburan bagi seseorang yang sudah pada fase menikmati interaksi manusia dengan Tuhannya melalui ritual ibadah.

4.2.3 Keyakinan Kehadiran Tuhan dalam Hidup

Sebanyak 77,8% responden yakin akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Keyakinan tersebut menjadi penghiburan dan dukungan emosional yang kuat bagi ibu rumah tangga. Mereka yang merasa dekat dengan Tuhan merasa didukung dan dicintai dalam situasi sulit atau penuh tekanan. Keyakinan ini dapat memberikan kedamaian, kepercayaan, dan harapan yang membantu mengatasi stress, kecemasan dan depresi. Hal tersebut menciptakan keseimbangan mental dan emosional yang lebih baik. Doa, meditasi, dan praktik spiritual lainnya yang terkait dengan kehadiran Tuhan dapat membantu seseorang mengembangkan ketenangan pikiran.

Mengandalkan Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup dapat memberikan keyakinan akan pertolongan dan keajaiban yang diluar logika manusia. Hal ini bermakna bahwa ada konsep kepasrahan terhadap kehendak yang trasenden dari situasi sulit. Ini dapat membantu mengatasi perasaan putus asa, merangsang pikiran positif, memberikan harapan, dan mengembangkan sikap

optimis dalam menghadapi ujian hidup yang semuanya berdampak positif bagi kesejahteraan mental. Namun pengalaman kehadiran Tuhan dan dampaknya bagi kesejahteraan mental dapat bervariasi antara individu, tergantung pada keyakinan, pengalaman pribadi dan konteks spiritual masing-masing.

4.2.4 Keyakinan Tuhan akan senantiasa ada untuk menolong HambaNya

Sebanyak 77,8 % responden menjawab bahwa mereka yakin Tuhan akan senantiasa ada untuk menolong keluar dari kesusahan dan persoalan hidup yang mereka hadapi. Bagi ibu rumah tangga yang sehari-hari berkeutang dengan tugas-tugas rumah tangga, sehingga membuatnya tersisipasi dan kurang berinteraksi dengan orang lain di luar rumah. Keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menolong hambaNya membuatnya merasa terkoneksi dan percaya merasa tidak sendirian. Hal itu tentunya dapat membantu mereka dalam mengatasi rintangan dan melihatnya sebagai ujian yang dapat mereka lalui dengan dukungan Tuhan.

Selain itu keyakinannya dapat memberinya kekuatan dan membantunya meredakan pikiran negatif, kecemasan serta stress yang berlebihan karena mereka percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah mereka dan memberikan jalan keluar dengan cara Nya. Keyakinan yang kokoh dapat menjadi pondasi yang kokoh untuk membangun ketahanan spiritual, tetapi penting untuk menggabungkannya dengan praktik spiritual, refleksi pribadi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

4.2.5 Faktor lainnya

Selain faktor-faktor di atas, berdasarkan hasil analisis skala spiritual Piedmont terdapat indikator rasa syukur (sebesar 52,8%) terbukti memberi dampak bagi kesejahteraan mental seorang ibu rumah tangga. Melakukan praktik bersyukur secara rutin dapat meningkatkan perasaan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Ibu rumah tangga yang merasa bersyukur cenderung bisa menghargai dan menghormati anggota keluarga mereka. Sehingga hal ini dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat dan meningkatkan kualitas hubungan keluarga.

Secara personal rasa syukur dapat menjadi alat yang efektif dalam melawan kecemasan dan depresi. Karena para ibu rumah tangga dapat melihat hal-hal positif dalam hidup dan mampu menghargai sisi terbaik dari diri mereka sendiri dan situasi yang dihadapi. Sehingga mereka mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu dengan bahagia.

Dari semua uraian tentang analisis faktor-faktor ketahanan spiritual terbukti bahwa pendekatan spiritual dapat meningkatkan kesejahteraan mental ibu rumah tangga. Manning menemukan bahwa terdapat hubungan antara spiritualitas dan ketahanan serta pentingnya peran spiritualitas dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Manning dalam penelitiannya yang berjudul *spiritual resilience: understanding the protection and promotion of well being in the later life*, menyatakan bahwa spiritualitas adalah sumber penting dalam mengelola kesulitan. Penggunaan spiritualitas oleh peserta merupakan alat untuk mempromosikan dan mempertahankan ketahanan di akhir kehidupan dalam lima domain utama, yaitu; ketergantungan pada hubungan, transformasi spiritual, coping spiritual, kekuatan keyakinan dan komitmen terhadap nilai-nilai dan praktik spiritual (Manning et al. 2019).

Keluarga yang memiliki ketahanan spiritual yang baik, maka dia akan mampu beradaptasi dengan setiap perubahan dengan baik, akan mampu mengatasi setiap persoalan atau pun kesulitan hidup, akan mampu menyelesaikan konflik, baik dalam dirinya maupun lingkungannya, dan akan mampu berdamai dengan situasi yang menekan sekalipun. Selaras dengan hasil penelitian Nursani, bahwa dukungan spiritual yang tinggi dapat membangkitkan ketahanan yang tinggi. Dan terdapat hubungan yang sangat kuat antara dukungan spiritualitas keluarga terhadap resiliensi pasien. Stress yang dihadapi bukan hanya oleh pasien tetapi juga keluarga pasien. Pasien yang memiliki dukungan keluarga yang tinggi dapat menjaga kekompakan keluarga selama krisis dan mencapai tahap perkembangan keluarga (Nursani et al. 2015). Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat spiritual seseorang ditentukan oleh keyakinan-keyakinannya pada Tuhan dan praktik spiritual yang dilakukan. Peneliti melihat pengalaman spiritual yang didapat para ibu rumah tangga di wilayah

Cirebon di dapat melalui pengalaman transformatif yaitu melalui krisis dan kesulitan hidup yang dialaminya. Tingkat ketahanan spiritual yang tinggi terbukti tidak hanya mensejahterakan mentalnya tetapi membuat ketahanan keluarga tetap terjaga.

5. Kesimpulan

Menjadi ibu rumah tangga merupakan pilihan hidup. Sangat penting bagi seorang ibu rumah tangga memiliki ketahanan spiritual yang tinggi. Karena tingkat ketahanan spiritual seseorang memberi dampak bagi kesejahteraan mentalnya. Kehidupan berumah tangga sesungguhnya sarat akan ujian. Krisis ekonomi, konflik dengan pasangan, orangtua dan anak akan dapat diatasi ketika seorang ibu rumah tangga mempunyai ketahanan spiritual yang baik. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif didapatkan bahwa tingkat spiritualitas para ibu rumah tangga sebanyak 36 orang di Wilayah Kabupaten Cirebon termasuk dalam kategori tinggi. Tingkat spiritual yang tinggi membuat mereka memiliki daya tahan terhadap kesulitan, sehat secara mental, dan tidak mudah menyerah pada keadaan.

Secara keseluruhan hasil penelitian ini memperkuat analisis Piedmont tentang faktor-faktor spiritualitas. Penelitian ini memberi kontribusi yang berharga dalam meningkatkan kesejahteraan mental ibu rumah tangga. Memberikan informasi bagi masyarakat, profesional kesehatan mental, konselor dan penyedia layanan social untuk memahami dan mengakomodasi aspek spiritual sebagai pendekatan terhadap kesejahteraan mental ibu rumah tangga. Kelemahan penelitian ini informan kurang terbuka dalam menyampaikan pengalaman spiritualnya. Tingkat pendidikan yang rendah, membuat responden menjawab setiap pertanyaan wawancara secara singkat. Dan perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang peran agama dan praktik keagamaan dalam membangun ketahanan spiritual seseorang dalam konteks yang lain.

Saran

Bagi ibu rumah tangga sebagai jantungnya keluarga agar selalu meningkatkan ketahanan spiritualnya melalui bimbingan layanan keagamaan dan menjalankan praktik spiritual.

Bagi para akademisi lainnya untuk mengkaji lebih jauh tentang pengaruh ketahanan spiritual dalam konteks yang lebih bervariasi.

Ucapan Terimakasih

Peneliti menegucapkan terimakasih kepada para informan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara, Dekan FISIP yang telah bersedia memberikan dukungan dan LP2M yang sudah mendanai penelitian ini.

Referensi

- Arwati, I. Gusti Agung Dian Sundari, Meril Valentine Manangkot, and Ni Luh Putu Eva Yanti. 2020. "Hubungan Tingkat Spiritualitas Dengan Tingkat Kecemasan Pada Keluarga Pasien." *Community of Publishing in Nursing (COPING)* 8(April):47–54.
- Crawford, Emily, Margaret O. Doughert Wright, and Ann S. Masten. 2006. "Resilience and Spirituality in Youth." Pp. 341–54 in *The Handbook of Spiritual Development in Childhood and Adolescence*, edited by P. L. B. , E.C. Roehlkepartain, P.E. King, L. Wagener. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Inc.
- Creswell, J. W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Fachrina, Sri Meyenti, Maihasni. 2017. "Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Perceraian Melalui Lembaga Bp4 Dan Mediasi Pengadilan Agama." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan PKM Sosial, Ekonomi Dan Humaniora* 7(2):275–85.
- Faigin, Carol Ann, and Kenneth I. Pargament. 2011. "Strengthened by the Spirit: Religion, Spirituality,

- and Resilience Through Adulthood and Aging." Pp. 163–80 in *Resilience in Aging*. New York: Springer.
- Foy, David W., Kent D. Drescher, and Patricia J. Watson. 2011. "Religious and Spiritual Factors in Resilience." *Resilience and Mental Health: Challenges Across the Lifespan* (January):90–102. doi: 10.1017/CBO9780511994791.008.
- Hibana. 2020. "Meningkatkan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Corona."
- Hitiyahubessy, Arthur Ardiansa. 2015. "Resiliensi Perempuan Korban Konflik Ambon." *Prediksi: Kajian Ilmiah Psikologi* 4(1):19–32.
- K.Reivich, A. Shatte. 2002. *The Resilience Factor: 7 Essential Skills for Overcoming Life's Inevitable Obstacle*. Resilience. New York: Broadways Books.
- Manning, Lydia. 2019. "Spiritual Resilience: Understanding the Protection and Promotion of Well-Being in the Later Life." *J Relig Spiritual Aging*. doi: 10.1080/15528030.2018.1532859.
- Manning, Lydia, Morgan Ferris, Carla Narvaez Rosario, Molly Prues, and Lauren Bouchard. 2019. "Spiritual Resilience: Understanding the Protection and Promotion of Well-Being in the Later Life." *Journal of Religion, Spirituality and Aging* 31(2):168–86. doi: 10.1080/15528030.2018.1532859.
- Maulana, Yudha. n.d. "Angka Perceraian Di Jabar Capai 55.876 Kasus, Melonjak Saat PSBB." *Detic.News*.
- Nelson-Becker, Holly, and Michael Thomas. 2020. "Religious/Spiritual Struggles and Spiritual Resilience in Marginalised Older Adults." *Religions* 11(9):1–17. doi: 10.3390/rel11090431.
- Nursani, Ikhwan, Elida Ulfiana, and Laily Hidayati. 2015. "Correlation between Spiritual Support and Family Resiliency in Patient on Hemodialysis." *The Proceeding of 6th International Nursing Conference* 105–10.
- Piedmont, Raphl L. 2001. "Spiritual Transcendence and the Scientific Study of Spirituality." *Journal of Rehabilitation* 67(1):4–14.
- Putri, Diva Luviana. 2022. "8 Fakta Ibu Membunuh Anak Kandung Di Brebes, Suami Menganggur, Depresi Hingga Ingin Selamatkan Anak." *Compas*, April, 1.
- Reivich, Karen, and Andrew Shatte. 2002. *The Resilience Factor: 7 Essential Skills for Overcoming Life's Inevitable Obstacles*. New York: Broadway Books.
- Roberto, Anka, Alicia Sellon, Sabrina T. Cherry, Josalin Hunter-Jones, and Heidi Winslow. 2020. "Impact of Spirituality on Resilience and Coping during the COVID-19 Crisis: A Mixed-Method Approach Investigating the Impact on Women ." *Health Care for Women International* 41(11–12):1313–34. doi: 10.1080/07399332.2020.1832097.
- Rosalina, Amitya Betty, and Iriani Indri Hapsari. 2012. "Gambaran Oping Stress Pada Ibu Rumah Tangga Yang Tidak Bekerja." *JPPP - Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi* 3(1):18–23. doi: 10.21009/jppp.031.04.
- Sunarti, Euis. 2020. *Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19*.
- Sunarti, Euis, Hidayat Syarif, Ratna Megawangi, and Hardinsyah. 2003. "Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga." *Media Gizi & Keluarga* 27(1):1–11.
- Tenri Awaru, A. Octamay. 2021. *Sosiologi Keluarga*. 1st ed. edited by M. P. Dr.Bahri. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Wahyudi Sugeng, Ubaid Yahya. 2021. *Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2021*. 1st ed. edited by M. J. Faatin Ana, Widjayanti. Cirebon: BPS Kabupaten Cirebon.
- Walsh, Froma. 2016. *Strengthening Family Resilience*. 3rd ed. USA: The Guilford Press.
- Zakaria, Siti Marziah, Noremy Md Akhir, Muhammad Izzat Ebrahim, Hawa Rahmat, and Suzana Mohd Hoesn. 2020. "Dual-Role Women in Selangor: Work-Family Conflict and Its Impact on Emotional Well-Being." *Internasional Journal Psychosocial Rehabilitation* 24(04).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).



Peran Pelopor Perdamaian dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jawa Barat

Soni Akhmad Nulhaqim¹ , Wandi Adiansah¹ , Nadila Auludya Rahma Putri¹ , Maulana Irfan²

¹ Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

² Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Padjadjaran

* Korespondensi: soni.nulhaqim@unpad.ac.id ; Telp: +62 813-2231-2268

Diterima: 13 Juli 2023; Disetujui: 20 Oktober 2023; Diterbitkan: tanggal: 29 November 2023

Abstrak: Potensi konflik dan frekuensi konflik di Provinsi Jawa Barat cukup tinggi. Tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) merupakan salah satu pihak yang mempunyai peranan dan tugas penting dalam upaya penanganan konflik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran Pordam dalam penanganan konflik sosial di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa observasi non partisipatif, *indepth interview*, dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pordam Provinsi Jawa Barat dalam penanganan konflik sosial meliputi upaya pencegahan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan pasca konflik. Upaya pencegahan konflik dilakukan melalui pembentukan dan penguatan Pordam, pemetaan daerah rawan konflik sosial, dan sosialisasi pencegahan konflik ke sekolah-sekolah. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar, Pordam berperan sebagai relawan yang memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan psikososial dalam kondisi kedaruratan bagi korban konflik sosial dan pengungsi. Dalam pemulihan pasca konflik Pordam berperan dalam upaya mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis di masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi dan rehabilitasi.

Kata Kunci: Pelopor Perdamaian, Konflik Sosial.

Abstract: The potential for conflict and frequency of conflict in West Java Province is quite high. Peace Pioneers (Pordam) is one of the parties who has an important role and task in efforts to handle this conflict. The aim of this research is to describe Pordam's role in handling social conflict in West Java Province. The research design in this study uses a qualitative research approach and descriptive research methods. Data sources consist of primary data and secondary data. Primary data was obtained through data collection techniques in the form of non-participatory observation, in-depth interviews, and Focus Group Discussions (FGD). Meanwhile, secondary data was obtained through documentation studies. Data processing and analysis is carried out through the stages of data reduction, data display, drawing conclusions and verification. The research results show that the role of the West Java Province Pordam in handling social conflict includes prevention efforts, fulfilling basic needs, and post-conflict recovery. Efforts to prevent conflict are carried out through the formation and strengthening of Pordam, mapping areas prone to social conflict, and socializing conflict prevention to schools. In fulfilling basic needs, Pordam acts as a volunteer who meets the needs of food, clothing and psychosocial services in emergency conditions for victims of social conflict and refugees. In post-conflict recovery, Pordam plays a role in efforts to restore the situation and repair disharmonious relations in society due to conflict through reconciliation and rehabilitation activities.

Keywords: Pioneer of Peace, Social Conflict.

1. Pendahuluan

Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia, dapat menjadi sebuah aset bagi negara. Disisi lain keberagaman tersebut dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, yang mendukung masyarakat untuk bersatu dan saling menghargai. Namun keberagaman tersebut dapat menjadi peluang terjadinya sebuah konflik. Hal ini dapat terjadi ketika dalam hubungan bermasyarakat terdapat perbedaan pendapat maupun tujuan. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Susan dalam St. Aisyah (2014) yang menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk konflik (*homo conflictus*), artinya bahwa manusia selalu terlibat dalam berbagai perbedaan, konflik, dan persaingan, baik secara sukarela maupun terpaksa. Konflik yang terjadi pun dapat bersifat konflik horizontal serta vertikal, seperti konflik dalam bidang politik, konflik dalam perebutan berbagai sumber daya ekonomi, konflik dalam bidang sosial dan budaya diantara kelompok masyarakat, konflik dan sengketa perebutan sumber daya alam, konflik yang terjadi didalam atau pun antar keluarga, konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), hingga konflik antar kelompok yang ada di masyarakat (Nulhaqim, dkk, 2020).

Konflik merupakan sebuah dinamika sosial yang akan selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Gibson dalam Muspawi (2014) menyebutkan bahwa dalam hubungan tidak hanya dapat menciptakan sebuah kerja sama, melainkan dapat menimbulkan sebuah konflik. Kondisi ini dapat terjadi ketika masing-masing komponen organisasi atau masyarakat memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda, sehingga tidak dapat bekerja sama satu sama lain. Sementara itu, konflik sosial didefinisikan sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (Permensos Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial).

Berdasarkan penjelasan diatas konflik akan berdampak negatif bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Ketika terjadi konflik, maka akan timbul ketegangan diantara kedua belah pihak yang terlibat. Terlebih dengan keberagaman yang dimiliki Indonesia, ketika sebuah konflik tidak segera diatasi dengan baik akan memicu disintegrasi bangsa. Dari rentang tahun 2018 hingga 2019 terjadi 71 kasus konflik sosial di hampir seluruh provinsi Indonesia, konflik-konflik ini disebabkan oleh masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Triyono, 2020). Disamping itu dilansir dari Data Statistik Potensi Desa (Podes) tahun 2018 menunjukan bahwa dari toal 84.000 desa yang ada di Indonesia, sebanyak 3,75% atau sekitar 3,150 desa ditetapkan sebagai desa rawan konflik (Pertiwi, 2020).

Mengingat bahwa keberagaman yang dimiliki Indonesia dapat menimbulkan berbagai bentuk konflik, dan mengancam terjadinya disintegrasi bangsa, maka pemerintah berupaya untuk merespon hal tersebut dengan berbagai tindakan. Salah satu pihak yang ikut andil dalam merespon konflik sosial adalah Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Republik Indonesia. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) membentuk sebuah satuan unit berupa relawan Pelopor Perdamaian (Pordam). Pembentukan Pelopor Perdamaian (Pordam) ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya di provinsi Jawa Barat. Hadirnya Pelopor Perdamaian (Pordam) menjadi perpanjangan tangan pemerintah khususnya Kementerian Sosial dalam merespon berbagai bentuk konflik sosial yang terjadi.

Relawan Pelopor Perdamaian (Pordam) diharapkan dapat membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dengan membantu melakukan berbagai upaya pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pasca konflik. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki Tenaga Pelopor Perdamaian. Sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2010, Tenaga Pelopor Perdamaian di Provinsi Jawa Barat ini telah melakukan berbagai upaya penanganan terhadap berbagai kasus konflik yang terjadi di provinsi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Peran Pelopor Perdamaian dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari upaya pencegahan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan pasca konflik?”.

1.1 Tinjauan Literatur

1.1.1 Konflik Sosial

Konflik merupakan hasil dari perilaku sebagai bagian integral kehidupan manusia sehingga konflik tidak lepas dari dinamika kehidupan sosial (Thakore, 2013). Konflik secara bahasa latin “con” yang memiliki arti bersama dan “figere” yang memiliki arti benturan atau tabrakan sehingga konflik dalam kehidupan sosial yaitu terjadinya ketidaksesuaian pendapat, keinginan, dan kepentingan antara dua pihak atau lebih (Sudarnoto, 2015). Fisher (2000) mengemukakan bahwa definisi konflik berbeda dengan kekerasan. Kekerasan mencakup berbagai tindakan, perkataan, dan sikap yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Di sisi lain, konflik dapat terjadi ketika tujuan dari dua pihak atau lebih tidak sejalan. (Fisher, 2000). Konflik seringkali dikonotasikan sebagai hal negatif akibat perbedaan interpretasi fakta dan perspektif yang tidak sepaham antara pihak atau kelompok yang berkonflik (Mas’udi, 2015; Wahyudi, 2015).

Pada hakikatnya, konflik merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat. Adanya perbedaan karakteristik dan cara pandang masyarakat yang tidak dikelola dengan baik dapat berpotensi menimbulkan disintegrasi seperti kondisi saling menuduh, saling menyalahkan, dan saling melakukan tindakan agresif satu sama lain (Fauzia & Silalahi, 2021). Konflik sosial merupakan gambaran dari adanya tindak perselisihan, ketegangan, serta pertentangan yang muncul dalam kehidupan masyarakat yang diakibatkan adanya perbedaan pendapat, pemahaman, kepentingan, golongan, budaya dan lain sebagainya (Irwandi & Chotim, 2017).

Konflik yang tidak dikelola dengan seksama akan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terlibat termasuk masyarakat karena dapat menimbulkan banyak korban seperti nyawa, harta, dan situasi yang tidak aman (Nulhaqim, dkk, 2017). Diperlukan penanganan secara komprehensif dan keterlibatan berbagai pihak dalam mengatasi adanya konflik yang terjadi. Konflik dapat diselesaikan dengan menggunakan upaya resolusi konflik yang berarti sebuah proses informal maupun formal bagi pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi perdamaian atas perselisihan yang mereka alami (Shonk, 2021 dalam Putri, 2022).

1.1.2 Penanganan Konflik Sosial

Berdasarkan Permenkes Nomor 26 Tahun 2017 Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pascakonflik.

Pencegahan konflik sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik Sosial dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan dasar yaitu merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik sosial dan pengungsi pada saat kondisi kedaruratan yang meliputi kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan psikososial. Sementara itu, pemulihan pascakonflik sosial didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

1.1.3 Tenaga Pelopor Perdamaian

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial, Tenaga Pelopor Perdamaian merupakan relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk penanganan konflik sosial. Penanganan konflik sosial ini meliputi upaya pencegahan konflik sosial, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pasca konflik sosial. Tenaga Pelopor Perdamaian dibentuk dengan tujuan untuk membantu dalam proses koordinasi, mediasi, informasi dan komunikasi dalam menangani konflik sosial.

Tenaga Pelopor Perdamaian memiliki status sebagai relawan dalam bidang penanganan konflik sosial. Tenaga Pelopor Perdamaian ini telah diberikan pelatihan khusus berupa pelatihan manajemen konflik sosial, pelatihan logistik, pelatihan pendampingan psikososial, pelatihan konseling, dan

bimbingan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial. Tenaga Pelopor Perdamaian dibentuk oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tanggal 21 September 2010 (Kemensos RI, 2020). Setelah berjalan selama satu dekade dalam menjalankan tugas penanganan konflik sosial di Indonesia, pada tanggal 1 Desember 2020, Tenaga Pelopor Perdamaian ini dikukuhkan kembali oleh Direktorat PSKBS di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung (Sukarta, 2020). Pengukuhan ini bertujuan untuk memperkuat peran serta semangat para Tenaga Pelopor Perdamaian dalam menangani berbagai konflik sosial yang terjadi di wilayah Indonesia. Saat ini, Tenaga Pelopor Perdamaian memiliki anggota sebanyak ± 1.500 orang relawan yang tersebar di hampir seluruh provinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia (Hidayat, 2020).

Pada hakikatnya, konflik merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat. Adanya perbedaan karakteristik dan cara pandang masyarakat yang tidak dikelola dengan baik dapat berpotensi menimbulkan disintegrasi seperti kondisi saling menuduh, saling menyalahkan, dan saling melakukan tindakan agresif satu sama lain (Fauzia & Silalahi, 2021). Konflik sosial merupakan gambaran dari adanya tindak perselisihan, ketegangan, serta pertentangan yang muncul dalam kehidupan masyarakat yang diakibatkan adanya perbedaan pendapat, pemahaman, kepentingan, golongan, budaya dan lain sebagainya (Irwandi & Chotim, 2017).

Konflik yang tidak dikelola dengan seksama akan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terlibat termasuk masyarakat karena dapat menimbulkan banyak korban seperti nyawa, harta, dan situasi yang tidak aman (Nulhaqim, dkk, 2017). Diperlukan penanganan secara komprehensif dan keterlibatan berbagai pihak dalam mengatasi adanya konflik yang terjadi. Konflik dapat diselesaikan dengan menggunakan upaya resolusi konflik yang berarti sebuah proses informal maupun formal bagi pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi perdamaian atas perselisihan yang mereka alami (Shonk, 2021 dalam Putri, 2022).

1.1.4 Penanganan Konflik Sosial

Berdasarkan Permenkes Nomor 26 Tahun 2017 Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pascakonflik.

Pencegahan konflik sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik Sosial dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan dasar yaitu merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik sosial dan pengungsi pada saat kondisi kedaruratan yang meliputi kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan psikososial. Sementara itu, pemulihan pascakonflik sosial didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

1.1.5 Tenaga Pelopor Perdamaian

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial, Tenaga Pelopor Perdamaian merupakan relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk penanganan konflik sosial. Penanganan konflik sosial ini meliputi upaya pencegahan konflik sosial, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pasca konflik sosial. Tenaga Pelopor Perdamaian dibentuk dengan tujuan untuk membantu dalam proses koordinasi, mediasi, informasi dan komunikasi dalam menangani konflik sosial.

Tenaga Pelopor Perdamaian merupakan relawan terlatih yang telah diberikan pelatihan khusus berupa pelatihan manajemen konflik sosial, pelatihan logistik, pelatihan pendampingan psikososial, pelatihan konseling, dan bimbingan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial. Tenaga Pelopor Perdamaian pertama kali dibentuk oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Republik Indonesia

pada tanggal 21 September 2010 (Kemensos RI, 2020). Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2020, Pelopor Perdamaian kembali dikukuhkan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung (Sukarta, 2020). Pengukuhan ini bertujuan untuk memperkuat peran serta semangat para Tenaga Pelopor Perdamaian dalam menangani berbagai konflik sosial yang terjadi di wilayah Indonesia. Saat ini, Pelopor Perdamaian memiliki anggota sebanyak ± 1.500 orang relawan yang tersebar di hampir seluruh provinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia (Hidayat, 2020).

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai "Peran Pelopor Perdamaian dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jawa Barat" bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pelopor Perdamaian dalam penanganan konflik sosial di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari upaya pencegahan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan pasca konflik. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa observasi non partisipatif, *indepth interview*, dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Informan utama dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 orang Anggota Forum Komunikasi Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi mulai dari dokumen dan laporan Forum Komunikasi Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat, artikel jurnal hingga berita-berita yang relevan dari berbagai media. Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Lokasi penelitian yaitu mencakup wilayah kerja Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat yaitu seluruh Kabupaten/kota yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu selama empat bulan penelitian yaitu dimulai pada bulan Mei dan berakhir pada bulan Agustus tahun 2023.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Konflik Sosial di Provinsi Jawa Barat

Dilansir dari laman resmi BPS menunjukkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi terpadat kedua di Pulau Jawa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.379 jiwa/km² (Kusnandar, 2022). Kondisi padatnya penduduk di Jawa Barat ini berpotensi menimbulkan berbagai bentuk konflik sosial. Open Data Jabar (2022) telah merilis data jumlah potensi konflik di Jawa Barat, berdasarkan data tersebut pada tahun 2022 potensi konflik di Jawa Barat telah mengalami peningkatan sebesar 35,2% yaitu terdapat 787 potensi konflik, dari 510 potensi konflik pada tahun 2021. Selain itu untuk nilai rata-rata jumlah potensi konflik tiap tahun dalam kurun waktu 6 tahun terakhir sebesar 350,33, dengan total keseluruhan 2.102 potensi konflik. Adapun jumlah potensi konflik terbesar pada tahun 2022 terdapat di daerah Kota Bandung dengan jumlah 137, dan Kabupaten Ciamis dengan jumlah 68.

Beberapa konflik yang pernah ditangani oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat, pertama yaitu konflik akibat adanya aliran sesat dan konflik antar organisasi masyarakat. Konflik akibat adanya aliran sesat misalnya yaitu konflik yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu. Pondok Pesantren Al-Zaytun yang diduga menyebarkan aliran sesat serta diduga melakukan berbagai tindak pidana terhadap santrinya menjadi kontroversi dikalangan masyarakat Indramayu memicu terjadinya konflik. Salah satunya yaitu dengan adanya protes yang dilakukan oleh Forum Indramayu Menggugat (FIM) yang mengerahkan 3.000 massa untuk melakukan unjuk rasa menuntut agar Pondok Pesantren Al-Zaytun ditutup serta berbagai kasus yang terdapat di pondok pesantren tersebut segera diusut (Amris, 2023).

Selanjutnya, konflik akibat aliran sesat yang juga pernah ditangani oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat yaitu konflik aliran sesat Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara). Pada tanggal 3 Februari 2016, Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa Gafatar adalah kelompok yang menyimpang karena menganut ajaran Millah Abraham, yang menyatukan ajaran agama Islam, Nasrani, dan Yahudi (UINJkt, 2016). Para pengikut Gafatar yang berasal dari berbagai

wilayah di Indonesia termasuk dari Provinsi Jawa Barat pindah ke Kalimantan Barat dengan alasan hijrah dengan diiming-imingi akan mendapatkan kehidupan yang layak dan kecukupan secara finansial oleh para pengurus Gafatar. Namun setelah berada di Kalimantan Barat, mereka seolah diperbudak dengan dipekerjakan sebagai petani untuk melakukan berbagai aktivitas pertanian di lahan milik Gafatar tanpa diberi upah sama sekali. Menghadapi kondisi tersebut, banyak diantara pengikut Gafatar tersebut berusaha untuk pulang ke daerah asal mereka masing-masing (Sudiono & Panggabean, 2016). Dalam proses pemulangan pengikut Gafatar ini, Tenaga Pelopor Perdamaian juga turut terlibat secara langsung.

Kasus konflik lain yang juga pernah ditangani oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat yaitu konflik antar Ormas (Organisasi Masyarakat) yang sering terjadi di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat. Seperti halnya konflik yang terjadi diantara Ormas Pemuda Banten dengan Pemuda Pancasila di daerah Dayeuh Kolot, konflik yang melibatkan serikat petani Pasundan dan Perhutani terkait lahan garapan dan perairan di Tasikmalaya, Ciamis dan Garut, serta membantu dalam menangani konflik yang terjadi diantara ormas AMS (Angkatan Muda Siliwangi) terkait perebutan lahan parkir di daerah Dayeuh Kolot serta Bandung Selatan. Tidak hanya itu pelopor perdamaian Provinsi Jawa Barat pun ikut andil dalam menangani konflik aliran sesat NII di Garut. Disamping itu pula pelopor perdamaian Provinsi Jawa Barat pun ikut andil dalam tugas memulangkan warga Jawa Barat yang terdampak pada konflik yang terjadi di Papua.

Berdasarkan data mengenai konflik yang pernah ditangani oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat yang telah dijelaskan, Tabel 1 berikut ini merupakan rangkuman dari data konflik tersebut.

Tabel 1. Konflik yang Pernah Ditangani oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat

No.	Jenis Konflik	Kasus Konflik	Tahun Kejadian	Lokasi Kejadian
1.	Aliran sesat	Kasus konflik antara pengurus Pondok Pesantren Al-Zaytun dengan Forum Indramayu Menggugat (FIM) atas dugaan aliran sesat.	2023	Kabupaten Indramayu
2.	Aliran sesat	Konflik aliran sesat Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)	2016	Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Barat
3.	Konflik antar Ormas	Konflik antar Ormas, seperti: <ul style="list-style-type: none"> a. Konflik antara Pemuda Banten dengan Pemuda Pancasila (Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung) b. Konflik antara Serikat Petani Pasundan dan Perhutani (Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut) c. Konflik diantara Ormas AMS (Angkatan Muda Siliwangi) terkait perebutan lahan parkir (Dayeuh Kolot serta Bandung Selatan). 	2016 - 2023	Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat
4.	Aliran sesat	Kasus Negara Islam Indonesia (NII)	2022	Kabupaten Garut
5.	Konflik suku	Konflik dan kerusuhan di Wamena, Papua	2019	Wamena, Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.

3.2 Gambaran Umum Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial, Tenaga Pelopor Perdamaian merupakan relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk Penanganan konflik sosial. Penanganan konflik sosial ini meliputi upaya pencegahan konflik sosial, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pasca konflik sosial. Tujuan dibentuknya Tenaga Pelopor Perdamaian yaitu sebagai sumber daya di masyarakat yang dapat membantu pemerintah dalam menangani konflik yang terjadi di masyarakat.

Tenaga Pelopor Perdamaian ini merupakan relawan terlatih yang telah diberikan pelatihan khusus berupa pelatihan manajemen konflik sosial, pelatihan logistik, pelatihan pendampingan psikososial, pelatihan konseling, dan bimbingan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial. Tenaga Pelopor Perdamaian pertama kali dibentuk oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tanggal 21 September 2010 (Kemensos RI, 2020). Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2020, Pelopor Perdamaian kembali dikukuhkan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung (Sukarta, 2020). Pengukuhan ini bertujuan untuk memperkuat peran serta semangat para Tenaga Pelopor Perdamaian dalam membantu merespon serta menyelesaikan kasus-kasus konflik sosial di Indonesia. Saat ini, jumlah Pelopor Perdamaian yaitu sebanyak ± 1.500 orang relawan yang tersebar di hampir seluruh provinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia (Hidayat, 2020).

Salah satu wilayah yang memiliki Tenaga Pelopor Perdamaian yaitu Provinsi Jawa Barat. Tenaga Pelopor Perdamaian di Provinsi Jawa Barat terdapat di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan di beberapa Dinas Sosial Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dari Forum Komunikasi Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2023 ini baru terdapat di 14 Kabupaten dan 2 Kota saja di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah relawan sebanyak 51 orang. Tabel 1 berikut ini menunjukkan jumlah dan persebaran Tenaga Pelopor Perdamaian di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2. Jumlah dan Persebaran Tenaga Pelopor Perdamaian di Provinsi Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah PORDAM
1.	Kabupaten Bogor	1
2.	Kabupaten Karawang	1
3.	Kabupaten Sukabumi	3
4.	Kabupaten Cianjur	3
5.	Kabupaten Purwakarta	2
6.	Kabupaten Bandung Barat	2
7.	Kabupaten Bandung	6
8.	Kabupaten Garut	6
9.	Kabupaten Tasikmalaya	4
10.	Kabupaten Ciamis	5
11.	Kabupaten Sumedang	4
12..	Kabupaten Majalengka	4
13.	Kabupaten Indramayu	2
14.	Kabupaten Cirebon	2
15.	Kota Cimahi	1
16.	Kota Depok	5
Jumlah		51

Sumber: Forum Komunikasi Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat, 2023.

Keterlibatan masyarakat menjadi pelopor perdamaian di Jawa Barat masih bersifat rekomendasi dari anggota yang sebelumnya sudah tergabung. Berdasarkan penuturan ketua pelopor perdamaian hal ini dilakukan karena untuk menjadi seorang relawan pelopor perdamaian diperlukan sebuah komitmen yang kuat. Meskipun demikian orang yang direkomendasikan perlu melalui serangkaian penilaian dan memenuhi persyaratan diantaranya, berketuhanan yang maha esa, minimal berusia 18 tahun, serta memperoleh pembinaan. Dalam prosesnya terdapat hal-hal yang dapat memutuskan status kerelawanan pelopor perdamaian, diantaranya meninggal dunia, mengundurkan diri, serta terlibat dalam konflik sosial.

3.3 Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jawa Barat oleh Tenaga Pelopor Perdamaian

Pelopor perdamaian merupakan organisasi resmi yang telah disahkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam tugasnya pelopor perdamaian merupakan *support system* bagi Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam upaya penanganan konflik sosial. Kedudukan pelopor perdamaian sebagai *support system* ini menjadikan pelopor perdamaian tidak memiliki kebijakan tersendiri dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini memiliki arti bahwa pelopor perdamaian akan bergerak melakukan tugas ketika sudah menerima arahan dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu dalam memberikan penanganan konflik sosial, pelopor perdamaian hanya akan bertindak sesuai dengan kebijakan dan arahan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian pelopor perdamaian harus memiliki kemampuan untuk membaca dan memahami arah dari kebijakan yang diberikan oleh pemangku kepentingan baik pada level Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun pada level nasional.

Dalam penanganan konflik sosial, Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat melakukan tiga upaya penanganan konflik yang terdiri dari pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pasca konflik. Berikut ini merupakan penjelasan dari ketiga upaya penanganan konflik sosial yang dilakukan oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat tersebut.

3.4 Pencegahan Konflik

Upaya-upaya pencegahan konflik sosial yang dilakukan oleh Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Sesuai dengan Permensos Nomor 26 Tahun 2017 Penanganan Konflik Sosial, pencegahan konflik sosial yang dilakukan oleh Tenaga Pelopor Perdamaian bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik sosial dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan konflik sosial yang dilakukan oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat tersebut yaitu:

1. Pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian.

Kegiatan ini salah satunya yaitu dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020, dimana Pelopor Perdamaian kembali dikukuhkan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung (Sukarta, 2020). Pengukuhan ini bertujuan untuk memperkuat peran serta semangat para Tenaga Pelopor Perdamaian dalam menangani berbagai konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Penguatan tenaga pelopor perdamaian ini dilakukan dalam bentuk pelatihan kedisiplinan (kesamaptaan), teknik komunikasi, asesmen, teknik pelaporan, serta peningkatan jejaring. Pelatihan ini berguna bagi peningkatan kemampuan tenaga pelopor perdamaian dalam membantu menangani konflik sosial dan menciptakan lingkungan masyarakat yang harmoni.

2. Pemetaan daerah rawan konflik sosial.

Kementerian Sosial khususnya tim dari PSKBS Linjamsos membuat dashboard terkait peta rawan konflik sosial, dimana dalam prosesnya melibatkan keikutsertaan dari pihak pelopor perdamaian. Adapun kriteria daerah tersebut dikatakan rawan terjadi konflik sosial, ketika di daerah tersebut pernah terjadi konflik sosial. Anggota pelopor perdamaian dapat melakukan pelaporan terkait daerah yang terjadi konflik sosial. Dalam hal ini pelaporan tersebut bersifat *real time*, yang artinya anggota pelopor perdamaian dapat terus melaporkan perkembangan dari konflik sosial sampai selesai. Adapun data yang dilaporkan adalah terkait jenis konflik, pihak-pihak yang terlibat,

dampak dari konflik sosial, serta penanganan dari konflik sosial apakah secara kekeluargaan atau memerlukan bantuan dari aparat penegak hukum.

Dalam pemetaaan daerah rawan konflik sosial ini, Pelopor Perdamaian bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat untuk mengidentifikasi daerah-daerah rawan konflik. Melalui kegiatan pemetaan ini, Pelopor Perdamaian dan *stakeholder* terkait dapat mengetahui daerah mana saja yang perlu diwaspadai terjadi konflik. Pelopor Perdamaian juga dapat mengantisipasi berbagai potensi konflik pada setiap daerah rawan konflik terutama pada waktu-waktu tertentu.

3. Sosialisasi pencegahan konflik ke sekolah-sekolah.

Dalam rangka melakukan pencegahan konflik, Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat juga telah melakukan sosialisasi pencegahan konflik ke beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sosialisasi ini dilakukan untuk mengimbau agar para siswa tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu konflik seperti tawuran antar pelajar dan bullying.

Program keserasian sosial ini merupakan program yang dibentuk sebagai upaya pencegahan konflik sosial di masyarakat. Adapun dengan adanya program keserasian sosial ini agar meningkatkan semangat gotong royong pada masyarakat. Untuk memperoleh program keserasian sosial ini, pemerintah daerah setempat perlu mengajukan kepada Kementerian Sosial, sehingga daerah tersebut perlu mengajukan proposal yang berisikan forum kepengurusan program serta bentuk kegiatan yang akan dilakukan ketika memperoleh program keserasian sosial ini. Disamping itu daerah yang memperoleh program keserasian sosial akan memiliki ciri berupa papan yang menunjukan bahwa daerah tersebut turut serta dalam program keserasian sosial. Daerah yang bersangkutan pun akan memperoleh bantuan pelatihan dalam bidang ekonomi produktif. Salah satu bentuk kegiatan dari program keserasian sosial ini adalah dibangunnya jalan penghubung antara satu kampung dengan kampung lain di daerah Ciparay, dibangunnya tribun untuk menjalin solidaritas sesama masyarakat dalam hal olahraga di daerah Cicalengka, dibangunnya aula/ balai pelatihan kerja di daerah Soreang, serta dibangunnya pipanisasi sepanjang 3km untuk mendistribusikan kebutuhan air bagi banyak lahan seperti pertanian, perkebunan di daerah Cicalengka.

Berdasarkan penjelasan mengenai upaya pencegahan konflik sosial yang dilakukan oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat tersebut, peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian yang dilakukan secara nasional dan melalui kegiatan sosialisasi pencegahan konflik ke sekolah-sekolah. Sementara itu, kegiatan berupa pemetaan daerah rawan konflik sosial merupakan bentuk sistem peringatan dini konflik sosial yang dibangun oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat dengan berbagai pihak terkait.

3.5 Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dalam menangani konflik sosial pelopor perdamaian memiliki alur tersendiri dengan memanfaatkan manajemen kasus. Manajemen kasus yang diterapkan oleh pelopor perdamaian Jawa Barat diantara *planning*, *organizing*, serta tindak lanjut (kontrol). Pada prosesnya ketika pelopor perdamaian mendapatkan laporan terjadi konflik dan sudah memperoleh arahan untuk ikut serta, pelopor perdamaian akan melakukan *assessment*. *Assessment* ini dilakukan guna melihat apakah konflik yang terjadi ini perlu melibatkan aparat penegak hukum, dan untuk melihat kondisi yang ditimbulkan dari konflik ini. Pada tahap *planning* ini pelopor perdamaian akan mengupayakan bentuk penanganan konflik secara kekeluargaan, namun jika tidak bisa melalui kekeluargaan pelopor perdamaian akan berupaya bekerja sama dengan aparat hukum lainnya. Saat melakukan penanganan konflik, tidak jarang sudah terdapat aparat penegak hukum, sehingga dalam hal ini pelopor perdamaian akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penanganan sesuai dengan peran masing-masing. Hal ini dilakukan karena kembali lagi pelopor perdamaian hanya sebagai *support system* yang tidak memiliki kebijakan hukum tersendiri, sehingga pelopor perdamaian hanya memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan dan bergerak sesuai intruksi dari Dinas Sosial.

Pada prosesnya pelopor perdamaian tidak hanya bekerja sama dengan aparat penegak hukum, melainkan bekerja sama dengan berbagai pihak lainnya yang dapat membantu dalam menangani konflik yang terjadi. Pelopor perdamaian pun melakukan koordinasi dengan pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota masing-masing untuk mendiskusikan terkait konflik sosial yang terjadi. Hal ini karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memiliki peran dalam penanganan konflik sosial, sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi untuk menyamakan persepsi dalam upaya penanganan konflik sosial sehingga tidak terjadi tumpang tindih diantara kedua belah pihak. Bentuk kerjasama lain juga dilakukan oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat dengan berbagai *Non Governmental Organization* (NGO) salah satunya yaitu *Save the Children*. Kerja sama ini dilakukan karena tidak jarang konflik sosial yang terjadi melibatkan anak-anak, sehingga diperlukan keterlibatan ahli untuk memberikan penanganan yang tepat bagi anak-anak. *Save the Children* ini merupakan salah satu NGO yang berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan anak. Salah satunya yaitu anak yang berhadapan dengan konflik atau anak-anak yang menjadi penyintas/terdampak konflik.

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sesuai dengan sesuai dengan Permensos Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Sosial, peran Tenaga Pelopor Perdamaian dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar yaitu berkedudukan sebagai relawan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan psikososial dalam kondisi kedaruratan bagi korban konflik sosial dan pengungsi. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini Pelopor Perdamaian bekerjasama dengan tenaga relawan lain seperti Tagana (Taruna Siaga Bencana), Karang Taruna setempat, dsb. Salah satu contoh bentuk pemenuhan kebutuhan dasar yaitu ketika Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat ditugaskan untuk menjemput warga Jawa Barat eks-Gafatar di Kalimantan Barat. Pada saat itu terdapat 439 warga Jawa Barat eks-Gafatar yang berhasil dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing yang terdiri dari Bandung, Depok, Bekasi, Tasikmalaya, Bogor, Cirebon, Kuningan dan Garut (Gandapurnama, 2016). Selain melakukan penjemputan, Pelopor Perdamaian juga berupaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan dan sandang serta memberikan pelayanan psikososial kepada para korban konflik dan pengungsi tersebut. Pelayanan psikososial diberikan melalui konsultasi, konseling, pemulihan trauma dan pendampingan serta rujukan.

Dalam dunia relawan mengenal istilah *one command, one rule and one corps*, artinya satu komando, satu aturan, dan satu kesatuan. Istilah itu yang dijadikan pedoman oleh pelopor perdamaian dan relawan lainnya dalam menjalankan tugas saat terjadinya konflik sosial. Kembali lagi pelopor perdamaian bersifat *support system* yang artinya pelopor perdamaian harus mampu menganalisis kebutuhan di lapangan itu seperti apa, sehingga dapat dengan baik memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga peran pelopor perdamaian dalam penanganan konflik sosial sebatas manajerial dalam artian memanage kekurangan yang ada di lapangan serta membantu mensupport sistem yang sudah ada.

3.6 Pemulihan Pasca Konflik

Sesuai dengan Permensos Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Sosial, dalam pemulihan pasca konflik Tenaga Pelopor Perdamaian berperan dalam upaya mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi dan rehabilitasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial yang dimaksud dengan rekonsiliasi yaitu kesepakatan yang ditempuh melalui perundingan dan hasilnya menjadi komitmen bersama untuk mengakhiri perselisihan. Rekonsiliasi merupakan bentuk pengakuan terhadap peristiwa masa lalu dan berusaha untuk melupakannya dengan membina hubungan baru yang lebih baik. Rekonsiliasi dilakukan dengan syarat para pihak bersedia berdamai, komunikasi/duduk bersama, saling introspeksi diri terhadap kesalahan masalah lalu dengan membuka sejarah yang ada serta orientasi ke masa depan. Salah satu bentuk rekonsiliasi yang dilakukan Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat yaitu rekonsiliasi yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik antar organisasi masyarakat.

Selanjutnya, pemulihan pasca konflik juga dilakukan melalui upaya rehabilitasi. Rehabilitasi yang dilakukan merupakan rehabilitasi sosial yang dimaksudkan sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat yaitu upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan terhadap warga eks-Gafatar agar dapat kembali berfungsi secara sosial di masyarakat pasca kepulangan mereka dari Kalimantan Barat.

Pada tahapan ini tentunya pelopor perdamaian kembali lagi perlu untuk melakukan analisis yang tepat sehingga bentuk dari rekonsiliasi yang diterapkan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini diperlukan agar kembali tercipta lingkungan yang harmoni dan terbebas dari konflik sosial. Pada prosesnya pelopor perdamaian akan melakukan *assessment* untuk memudahkan dalam memilih bentuk rekonsiliasi yang tepat. Dalam tahapan ini tidak jarang pelopor perdamaian mengalami kesulitan, sehingga pelopor perdamaian berupaya untuk mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak yang dapat bekerjasama dalam tahap pemulihan pasca konflik sosial ini. Seperti halnya bekerja sama dengan berbagai pihak dari *Non Governmental Organization* (NGO), atau pihak-pihak yang memiliki kecakapan dalam membantu menganalisis bentuk rekonsiliasi yang tepat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Peran Pelopor Perdamaian dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jawa Barat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting dari penelitian ini yaitu: 1) Pencegahan konflik yang dilakukan oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian, pemetaan daerah rawan konflik sosial, dan sosialisasi pencegahan konflik ke sekolah-sekolah. 2) Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan psikososial korban konflik sosial dan pengungsi dalam kondisi darurat. 3) Pemulihan pasca konflik dilakukan melalui rekonsiliasi dan rehabilitasi sosial untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik sosial.

5. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, saran yang dapat diberikan oleh tim penulis yaitu agar pelaksanaan penanganan konflik sosial dapat dilakukan secara lebih efektif, Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat perlu melakukan kolaborasi pentehelix dalam upaya penanganan konflik dengan beberapa stakeholder terkait mulai dari sektor pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta/private sektor, dan media.

Ucapan Terima Kasih: Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kegiatan penelitian dan penulisan artikel ini yaitu kepada Ketua Forum Komunikasi Pelopor Perdamaian Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan dukungan data yang dibutuhkan dalam penelitian dan penulisan artikel serta kepada Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Padjadjaran dan Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran yang telah memberikan dukungan administratif.

Daftar Pustaka

- Amris. (2023, 14 Juni). FIM Minta Ponpes Al Zaytun Indramayu Ditutup, Diduga Sesat. Retrieved from <https://radarmukomo.disway.id/read/660031/fim-minta-ponpes-al-zaytun-indramayu-ditutup-diduga-sesat/15>
- Fauzia, M. E., & Silalahi, E. B. (2021). Manajemen Konflik Warga Sukoharjo dalam Menyelamatkan Lingkungan Terhadap Pencemaran Udara Dan Air. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 73–79. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5635>
- Fisher, S., Abdi, D. I., Ludin, J., Smith, R., Williams, S., & Williams, S. (2001). Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: The British Council.

- Hidayat, F. (2020, Desember 1). Mensos Kukuhkan Relawan Pelopor Perdamaian Indonesia. Retrieved Desember 13, 2021, from Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/nasional/704861/mensos-kukuhkan-relawanpelopor-perdamaian-indonesia>
- Irwandi & Chotim. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). JISPO: Jurnal Ilmu Sosia Dan Ilmu Politik, volume 7:(2), 1-20. DOI: 10.15575/jp.v7i2.2414
- Kemensos RI. (2020, 1 Desember). Perkuat Persatuan, Kemensos Kukuhkan Keberadaan Pelopor Perdamaian. Retrieved from <https://kemensos.go.id/perkuat-persatuan-kemensos-kukuhkan-keberadaan-pelopor-perdamaian>
- Kusnandar, Viva Budy. (2022, 8 Agustus). Ini 10 Wilayah Paling Padat Penduduk di Indonesia. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/08/ini-10-wilayah-paling-padat-penduduk-di-indonesia>
- Mas'udi. 2015. Akar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik: Core Perubahan Sosial dalam Pandangan Karl Marx dan George Simmel. FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, 3(1), 177-200. DOI: 10.21043/fikrah.v3i1.1832.
- Muspawi, M. (2014). Manajemen konflik (upaya penyelesaian konflik dalam organisasi). Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, 16(2), 41-4. <https://www.neliti.com/id/publications/43447/manajemen-konflik-upaya-penyelesaian-konflik-dalam-organisasi>
- Nulhaqim, S. A., Irfan, M., Diana, H., & Jatnika, D. C. (2017). Konflik Sosial di Kampung Nelayan (Studi Kasus di Pantai Utara Kota Cirebon, Jawa Barat). Jurnal Sosio Konsepsia, 6(2), 197-209. doi:10.33007/ska.v6i2.677
- Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., Hidayat, E. N., & Adiansah, W. (2022). Peran Pelopor Perdamaian Provinsi Dki Jakarta Dalam Penanganan Konflik Sosial. Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional, 42-49. DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.41868
- Open Data Jabar. (2022). Jumlah Potensi Konflik Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Retrieved from <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-potensi-konflik-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Pertiwi, Suryani. (2020, 2 Desember). Kemensos: 3.150 Desa di Indonesia Rawan Konflik Sosial. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/humaniora/365709/kemensos-3150-desa-di-indonesia-rawan-konflik-sosial>
- St Aisyah, B. M. (2014). Konflik sosial dalam hubungan antar umat beragama. Jurnal Dakwah Tabligh, 15(2), 189-208. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/348>
- Sudiono, A., Panggabean, L. (2016, 22 Januari). Kenapa Banyak Anggota Gafatar Hijrah Ke Kalimantan?. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/nasional/343664/kenapa-banyak-anggota-gafatar-hijrah-ke-kalimantan>
- Sudarnoto, Wisnu. (2015). Konflik dan Resolusi. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. 2(1), 1-16. DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2236
- Sukarta, A. W. (2020, Desember 1). Mensos Kukuhkan Pelopor Perdamaian Indonesia. Retrieved Desember 13, 2021, from Antara News: <https://www.antaranews.com/berita/1870284/mensos-kukuhkan-pelopor-perdamaian-indonesia>
- Thakore, D. (2013). Conflict and Conflict Management. Business and Management, 8(6), 7-16. DOI:10.9790/487X-0860716
- Troyono, A. (2020, 1 Desember). Redam Konflik Sosial, Kemensos Kukuhkan Eksistensi Pelopor Perdamaian. Retrieved from <https://kemensos.go.id/redam-konflik-sosial-kemensos-kukuhkan-eksistensi-pelopor-perdamaian>
- UIN Jakarta. (2016, 4 Februari). Inilah Alasan MUI Sesatkan Gafatar. Retrieved from <https://www.uinjkt.ac.id/inilah-alasan-mui-sesatkan-gafatar/#:~:text=Gafatar%20tambahnya%20juga%20sesat%20karena,%2C%2080%9D%20ujar%20Ma'ruf>
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan. Publiciana, 8(1), 38-52. DOI: 10.36563/publiciana.v8i1.45
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).



Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Objek Wisata dengan Memanfaatkan Modal Sosial

Dia Meirina Suri^{1*}  , **Moris Adidi Yogia²**  , **Cifebrima Suyastri³** 

¹ Universitas Islam Riau, Program Studi Administrasi Publik, Provinsi Riau, Indonesia

² Universitas Islam Riau, Program Studi Ilmu Administrasi, Provinsi Riau, Indonesia

³ Eotvos Lorand University, Faculty of Social Sciences Doctoral School of Sociology
Departement International Studies, Hungary

* Korespondensi: diameirinasuri@soc.uir.ac.id ; +628126835735

Diterima: 13 Februari 2023; Disetujui: 29 Agustus 2023; Diterbitkan: 29 November 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata dengan pemanfaatan modal sosial dalam pengembangan objek wisata. Pandemi Covid 19 yang terjadi memberikan pengaruh terhadap objek wisata, jumlah wisatawan yang berkunjung turun secara drastis, hal ini menyebabkan kondisi perekonomian masyarakat sekitar menjadi menurun. Kondisi tersebut menuntut adanya pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat lebih aktif dan partisipatif dalam mengelola objek wisata. Pengembangan objek wisata berbasiskan pemberdayaan masyarakat akan memberikan pengaruh bagi peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat disekitar objek wisata tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana masyarakat memanfaatkan modal sosial yang ada untuk pengembangan objek wisata.. Metode yang digunakan adalah kualitatif interpretatif, dalam pengumpulan informasi digunakan data primer yang didapatkan melalui observasi, dan wawancara mendalam. Untuk mendapatkan hasil yang valid dan kredibel digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan modal sosial memiliki kontribusi dalam pengembangan objek wisata, modal sosial dalam bentuk jaringan yang dibangun secara online maupun offline oleh masyarakat sekitar objek wisata, komunikasi dengan stakeholder dan pihak swasta, adanya kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat serta keterbukaan untuk pengembangan objek wisata. Direkomendasikan untuk pengembangan objek wisata dapat memanfaatkan modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata.

Kata kunci: Pemberdayaan; Modal Sosial; Jaringan; Komunikasi

Abstract: This study aims to analyze community empowerment around tourist objects by utilizing social capital in developing tourist objects. The Covid 19 pandemic that occurred had an impact on tourist attractions, the number of tourists visiting dropped drastically, this caused the economic conditions of the surrounding community to decline. This condition requires community empowerment so that people are more active and participatory in managing tourist objects. The development of tourism objects based on community empowerment will have an impact on increasing the income and economy of the people around these tourist objects. The problem is how the community utilizes existing social capital for the development of tourist attractions. The method used is interpretive qualitative, in gathering information using primary data obtained through observation and in-depth interviews. To obtain valid and credible results, triangulation techniques are used. The results of the study show that community empowerment by utilizing social capital contributes to the development of tourist attractions, social capital in the form of networks built online and offline by the community around the tourist attraction, communication with stakeholders and the private sector, the existence of trust built by the community and openness to tourist attraction development.

Keywords: Empowerment; Social Capital; Network; Communication

1. Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat berbasiskan modal sosial menjadi alternatif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam pembangunan berkelanjutan, modal sosial menjadi hal penting mengingat konsep pembangunan yang bersifat *bottom-up* dengan adanya pemberdayaan masyarakat (Susanti, 2020). Pemanfaatan modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat sudah sering dilakukan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat termasuk dalam pengembangan objek wisata. Indonesia memiliki objek wisata yang sangat berpotensi untuk dikembangkan, permasalahan utama dalam pengembangan objek wisata adalah dukungan dari pemerintah dalam pengelolaannya, karena banyaknya objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan. Alternatif pengembangan objek wisata adalah dengan pemberdayaan masyarakat disekitar objek wisata dengan memanfaatkan modal sosial. Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh negara yang ada di dunia termasuk Indonesia memberikan pengaruh terhadap seluruh kegiatan masyarakat. Salah satu sektor yang merasakan dampak dari pandemi ini adalah objek wisata. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata menurun sehingga memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat disekitar objek wisata. Situasi ini membuat masyarakat yang mengelola objek harus mampu untuk mendatangkan kembali pengunjung dengan memanfaatkan modal sosial berupa komunikasi serta jaringan yang dimiliki untuk pengembangan objek wisata tersebut.

Pengembangan pariwisata memiliki peranan penting sebagai penggerak perekonomian masyarakat dan apabila dikelola dengan baik akan memberikan pendapatan bagi pemerintah setempat dari retribusi yang dihasilkan. Pengembangan objek wisata dari segi sosial akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Dengan potensi yang dimiliki oleh objek wisata, maka partisipasi masyarakat sekitar sangat dibutuhkan dalam pengembangan objek wisata itu sendiri seperti berkontribusi dalam kegiatan pembangunan begitu juga dalam menjaga kelestarian objek wisata tersebut, karena dengan pembangunan dan terjadinya objek wisata akan meningkatkan minat dari wisatawan untuk datang berkunjung. Oleh sebab itu pemanfaatan modal sosial sangat penting dilakukan. Modal sosial memiliki peranan dalam pengembangan objek wisata, objek wisata merupakan sarana yang cukup efektif dalam pengembangan perekonomian, permasalahan yang sering terjadi adalah kekurangan modal dalam proses pengembangannya.

Pembangunan berbasis masyarakat dapat dikatakan berhasil dilakukan dilihat dari modal komunitas, modal sumberdaya alam, modal ekonomi produktif dan modal sosial. Salah satu pembangunan berbasis masyarakat yang dilakukan adalah pengembangan objek wisata, pengembangan berbasis masyarakat ini disebut juga dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi pilihan untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat melalui pengelolaan objek wisata menggunakan modal sosial. Pemanfaatan modal sosial dilakukan karena keterbatasan pemerintah dalam mengembangkan objek wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Cara yang bisa diterapkan dalam pengembangan objek wisata adalah dengan pemanfaatan modal sosial, (Utami, 2020). Objek wisata yang dikembangkan akan mendatangkan wisatawan yang akan memberikan pengaruh bagi peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat disekitar objek wisata tersebut, (Upadani, 2017). Pengembangan yang lambat oleh pemerintah menjadikan masyarakat sekitar tidak merasakan manfaat dari objek wisata tersebut. Kondisi tersebut menuntut masyarakat untuk lebih aktif dan partisipatif dalam memanfaatkan potensi objek wisata tersebut. Modal sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan interaksi sosial serta untuk memupuk kepercayaan dan kerjasama dalam pengembangan objek wisata, (Ozgun, Tarim, Delen, & Zaim, 2022). Kekurangan modal sosial menyebabkan pengelola objek wisata kehilangan akses ke sumber daya dan keuntungan dari jaringan yang dimiliki, selain itu kurangnya modal sosial juga memiliki efek negatif dalam menunjukkan potensi objek wisata yang mereka miliki. Selain itu, modal sosial melalui jaringan media sosial online yang kuat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan promosi terhadap calon pengunjung serta untuk tempat saling berbagi informasi seputar objek wisata tersebut.

Kabupaten Kampar memiliki beberapa objek wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan, seperti Pulau Cinta dan Panorama Ulu Kasok. Dua objek wisata ini memiliki daya tarik tersendiri.

Pulau cinta menawarkan wisata sungai dengan pasir dipinggiran sungai sedangkan ulu kasok menawarkan panorama dengan pemandangan alam yang sangat indah. Objek wisata ini sangat berpotensi menarik minat masyarakat untuk berkunjung sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar terutama dalam meningkatkan penghasilan mereka. Permasalahan yang terjadi adalah belum maksimalnya pemerintah dalam mengembangkan objek wisata ini sehingga pemanfaatan modal sosial sangat penting dalam pengembangannya. Hal yang paling penting adalah peran aktif masyarakat disekitar objek wisata tersebut yang bisa dijadikan sebagai modal sosial dalam mengembangkan objek wisata tersebut.

Karakteristik kelompok atau komunitas menjadi acuan pemanfaatan modal sosial dalam pemenuhan keinginan secara menyeluruh. Modal sosial mengacu pada sifat-sifat organisasi seperti jejaring sosial, kepercayaan, saling pengertian, nilai-nilai bersama, dan perilaku yang mengikat anggota, sementara koordinasi dan kerja sama akan menjembatani mencapai tujuan tertentu (Cohen & Prusak, 2002; R. Putnam, 1993; Schuller, Baron, 2000). Hawkins dan Maurer (2009) mencatat bahwa pemanfaatan modal sosial terjadi dari hasil hubungan terlemah namun memberikan hasil yang paling berharga karena pemanfaatan modal sosial memberikan akses dan koneksi ke struktur kekuasaan dan institusi. Tidak seperti ikatan yang menjembatani dan menghubungkan yang dikarakterisasi oleh paparan dan pengembangan ide, nilai, dan perspektif baru (Hawkins & Maurer, 2009). Kepercayaan adalah elemen mendasar dalam modal sosial (Paraskevopoulos, 2010; Shimada, 2015). Saling percaya bahwa tidak ada pihak dalam pertukaran yang akan mengeksplorasi kerentanan orang lain merupakan komponen terpenting dari modal sosial dan merupakan prasyarat untuk kesuksesan kompetitif (Paraskevopoulos, 2010). Ada dan Bolat (2010), menyatakan bahwa modal sosial memfasilitasi aliran informasi yang memberikan dasar untuk bertindak dan membantu pencapaian tujuan individu dan masyarakat.

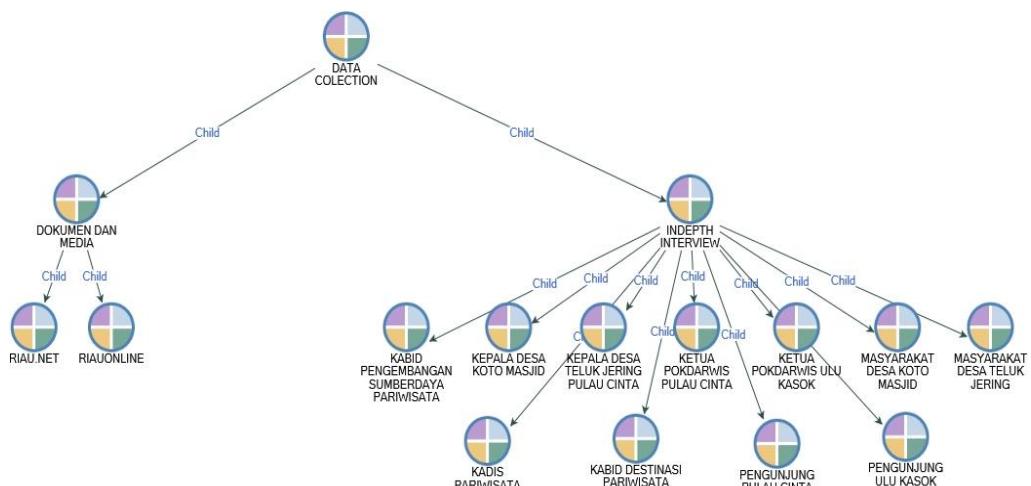
Ada tiga bentuk modal sosial yang terdiri dari *bonding*, *bridging*, dan *linking*. Ikatan modal sosial mengacu pada hubungan di antara anggota jaringan yang sama dalam beberapa karakteristik seperti status demografis, sosial, atau etnis atau di antara individu komunitas yang sudah saling mengenal (Putnam, 2000). Modal sosial mengacu pada hubungan di antara orang-orang yang berbeda dengan cara yang dapat dibuktikan seperti usia, kondisi sosial-ekonomi, ras atau etnis, dan pendidikan (Szreter & Woolcock, 2004), pemanfaatan modal sosial yang terjadi adalah sejauh mana individu membangun hubungan dengan institusi dan individu yang memiliki kekuatan relasi atas mereka untuk menyediakan akses ke layanan, pekerjaan, atau sumber daya (Woolcock, 2001). Sementara itu, Portes (1998) dan Arrow (2011) menyebutkan bahwa dengan modal sosial, anggota atau kelompok dalam komunitas yang memiliki akses ke manfaat dan sumber daya memiliki kecenderungan untuk mengecualikan non anggota dari akses. Oleh karena itu, modal sosial memiliki peringatan tersendiri. Membangun modal sosial berdasarkan interaksi sosial melalui jejaring sosial dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengembangan sebuah organisasi termasuk objek wisata. Bantuan berupa promosi yang didapatkan dari jaringan yang terdapat pada jejaring sosial sangat memberikan dampak dalam objek wisata, (Cheung & Chan, 2010).

Konsep modal sosial didefinisikan oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti kepercayaan, solidaritas, keadilan, jaringan, inklusi dan kohesi sosial, komunikasi dan pemberdayaan, (Rustinsyah, Prasetyo, & Adib, 2021). (Zhou, Chan, & Song, 2017) mendefinisikan modal sosial sebagai pemanfaatan dari sumber daya potensial yang terkait dengan jaringan yang terbentuk dari hubungan yang terjalin lama dan adanya hubungan timbal balik yang terjadi. (Zhou et al., 2017) juga menunjukkan bahwa modal sosial terdiri dari kewajiban sosial (koneksi), yang dapat dikonversi dalam konteks tertentu menjadi kapital ekonomi, (García-Villaverde, Ruiz-Ortega, Hurtado-Palomino, De La Gala-Velásquez, & Zirena-Bejarano, 2021). Modal sosial berperan penting dalam mengembangkan perekonomian masyarakat, karena modal sosial dapat membangun komunitas yang kuat termasuk dalam pengembangan objek wisata, (Knollenberg, Arroyo, Barbieri, & Boys, 2021). (Musavengane & Kloppers, 2020), mencatat bahwa masyarakat dengan modal sosial, ekonomi dan lingkungan yang kuat cenderung lebih tangguh daripada tempat-tempat yang tidak memiliki modal sosial. Modal sosial menekankan pada pembangunan jaringan sosial yang mengarah pada kelompok produktif dengan

norma, nilai, dan pemahaman bersama, (Musavengane & Simatele, 2016). Modal sosial dapat menjadi kendaraan di mana akumulasi berbagai bentuk modal dapat dicapai dan berkontribusi pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (Musavengane & Kloppers, 2020). Modal sosial juga didefinisikan sebagai jaringan hubungan yang mempromosikan pengembangan dan penyebaran sumber daya dan keuntungan yang dapat bermanfaat bagi individu maupun kolektif (Nunkoo, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Zhou et al., 2017) mengenai pemanfaatan modal sosial dan kewirausahaan dalam mengembangkan pariwisata salah satu desa di Cina menemukan bahwa pada saat melakukan pengembangan pariwisata masyarakat memiliki harapan yang tinggi untuk objek wisata tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi modal sosial yang dimanfaatkan dalam pengembangan objek wisata dan menganalisis pemberdayaan masyarakat disekitar objek wisata dengan memanfaatkan modal sosial.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif interpretatif yang bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan pemanfaatan modal sosial dalam pengembangan objek wisata. Adapun lokasi penelitian dilakukan di objek wisata Pulau Cinta dan Objek Wisata Panorama Ulu Kasok di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Untuk mencapai tujuan tersebut maka yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan data melalui observasi dengan melihat permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan modal social dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan objek wisata. Untuk mendapatkan data primer atau informasi dilakukan wawancara mendalam kepada informan yang terdiri dari Ketua Pokdarwis, Kepala Dinas Pariwisata, Kabid Pengembangan Sumberdaya Pariwisata, Kepala Desa, Masyarakat yang turut berperan dalam pengelolaan objek wisata, kemudian melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan informasi yang ada di media online yang berhubungan dengan pengembangan objek wisata tersebut. Proses pengumpulan data dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:



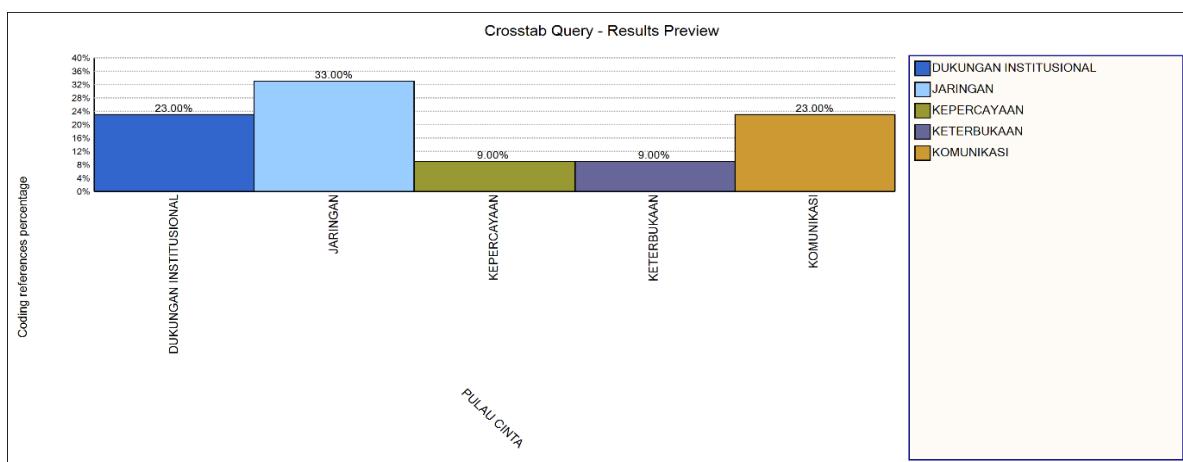
Gambar 1.1 Pengumpulan Data Melalui Wawancara Mendalam dan Analisis Dokumen dan Media

Hasil wawancara dengan informan penelitian dan pemberitaan di media online akan dimasukkan kedalam data set aplikasi pengolah data Nvivo12 Plus dan dilakukan pengcodingan data sesuai dengan masing-masing indikator penelitian dalam bentuk node yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian, Analisa data menggunakan fitur *crosstab*, *chart* dan *hierarchy chart* yang ada di aplikasi Nvivo 12 Plus, berdasarkan hasil coding didapatkan data yang kemudian dianalisis secara triangulasi dan menghasilkan gambaran mengenai sejauh mana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam pemanfaatan modal sosial pada pengembangan objek wisata, hasil analisis disajikan secara deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Identifikasi Pemanfaatan Modal Sosial

Modal sosial memiliki cakupan dimensi yang sangat beragam, keberagaman tersebut terjadi dikarenakan perbedaan sudut pandang yang dijadikan sebagai rujukan dalam menjelaskan arti dari modal sosial. Modal sosial berbeda dengan modal manusia, modal manusia lebih menekankan kepada keahlian atau daya yang dimiliki individu, sedangkan pada modal sosial lebih melihat bagaimana potensi yang dimiliki individu atau kelompok dan bagaimana hubungan satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam jaringan sosial, norma, nilai, kepercayaan yang dibangun (Arta, 2012). Kemampuan yang muncul dari adanya kepercayaan (*trust*) dalam sebuah komunitas bisa dijadikan sebagai modal sosial, (Jovita, Nashir, Mutiarin, Moner, & Nurmandi, 2019). Untuk mencapai keuntungan dan kemajuan bersama dibutuhkan modal sosial yang mampu memberikan motivasi, ide, kepercayaan dalam penggerakan masyarakat. Kompleksitas persoalan akan lebih mudah diselesaikan jika masyarakatnya memiliki modal sosial yang tinggi, (Rustinsyah et al., 2021). Dengan adanya toleransi, kepercayaan, kerjasama yang merupakan indikator dari modal sosial, maka akan lebih mudah membangun jaringan dalam kelompok masyarakat atau antar kelompok masyarakat. Kabupaten Kampar memiliki beberapa objek wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan, dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah objek wisata pulau cinta dan objek wisata ulu kasok, penelitian ini melihat sejauh mana modal sosial dimanfaatkan dalam pengembangan objek wisata ini. Selanjutnya berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan di objek wisata Pulau cinta diketahui bahwa modal sosial yang dimanfaatkan terdiri dari dukungan institusional, jaringan, kepercayaan, keterbukaan dan komunikasi yang dapat dilihat pada gambar 2:



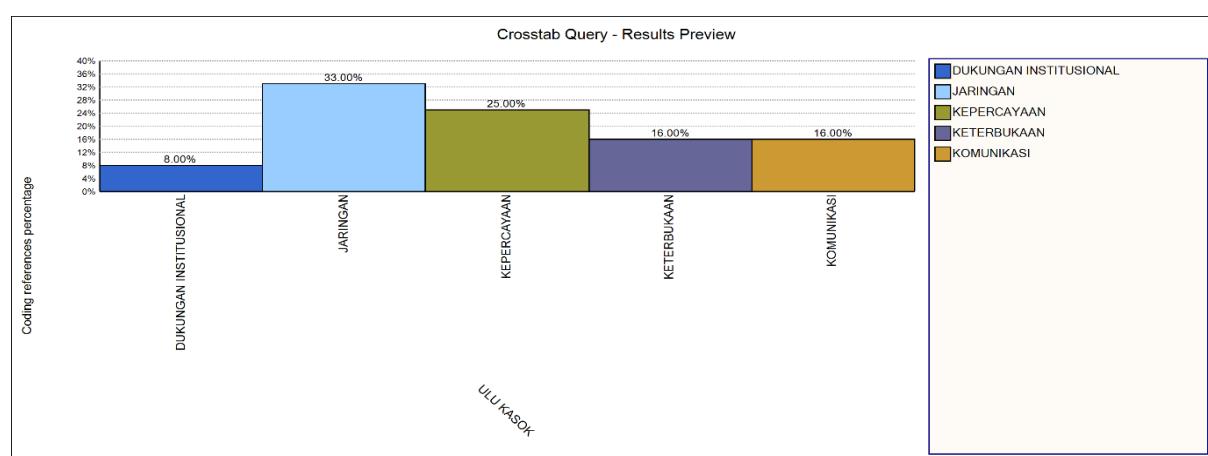
Gambar 2. Modal Sosial yang dimanfaatkan pada Objek Wisata Pulau Cinta

Gambar dua merupakan hasil identifikasi mengenai modal sosial yang dimanfaatkan pada Objek Wisata Pulau Cinta. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Informan yang terdiri dari Kepada Dinas Pariwisata, Ketua Pokdarwis, Kepala Desa dan Masyarakat dapat diketahui bahwa modal sosial yang paling banyak dimanfaatkan dalam pengembangan Objek Wisata adalah Jaringan, dengan persentase sebesar 33, jaringan merupakan hubungan yang tercipta antara masyarakat yang ada disekitar Objek Wisata dengan kelompok sadar wisata yang dibentuk untuk mengelola objek wisata, (Haridison, 2013). Dukungan dari masyarakat sekitar untuk kemajuan objek wisata menjadi dasar untuk mengembangkan objek wisata pulau cinta. Dengan demikian jaringan menjadi penting untuk dimanfaatkan dalam pengembangan objek wisata, (Lee & Hallak, 2020) karena akan mengurangi biaya dalam pengelolaan dan pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Kampar. Jaringan sebagai modal yang memiliki manfaat dalam interaksi antar masyarakat yang dapat memainkan perannya untuk mengurangi biaya yangmuncul dalam kegiatan pengembangan tersebut, (Nunkoo, 2017).

Dengan modal sosial berbentuk jaringan, pengembangan objek wisata dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan pemangku kepentingan (Isnri Reniati & Agung Fauzi, 2022). Dukungan institusional juga berperan cukup banyak dalam pengembangan objek wisata Pulau Cinta, dari hasil penelitian menunjukkan sebesar 23% dukungan institusional dimanfaatkan untuk pengembangan objek wisata di Pulau Cinta. Dukungan Institusional terlihat dari adanya Pokdarwis yaitu sebuah organisasi yang dibentuk dibawah Dinas Pariwisata. Dukungan Institusional dari pemerintah dengan adanya pembinaan dan pendampingan yang diberikan terhadap Pokdarwis mampu menciptakan dan menggali potensi objek wisata yang ada di Pulau Cinta. Selain dari adanya Pokdarwis, Pemerintah Desa juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap usaha dalam pengembangan Objek wisata ini.

Pengembangan objek wisata akan memberikan pengaruh terhadap norma dan budaya disekitar objek wisata, oleh sebab itu dukungan institusi berperan dalam menjaga norma-norma dan budaya disekitar objek wisata tersebut. Adanya dukungan institusi akan menjaga norma tetap terjaga dengan adanya aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang akan mengontrol sikap dan perilaku wisatawan selain itu dengan adanya institusi juga akan memudahkan dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam pengembangan objek wisata. Modal sosial lainnya yang dimanfaatkan adalah komunikasi, dengan persentase sebesar 23% menunjukkan bahwa komunikasi menjadi hal yang penting dalam pengembangan objek wisata. Dalam modal sosial komunikasi yang terjalin dapat meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan dalam pengembangan objek wisata, (Simbolon, 2018). Salah satu komunikasi yang dilakukan masyarakat disekitar objek wisata adalah antara pengelola dengan masyarakat sekitar yang ikut terlibat seperti pedagang makanan, pemilik wahana pendukung dan pengelola parkir yang saling memberikan informasi terkait pengunjung yang datang. Modal sosial yang dimanfaatkan dalam pengembangan objek wisata di Pulau Cinta merupakan rangkaian dari proses hubungan yang terjadi pada masyarakat yang dimulai dari adanya jaringan, sikap saling percaya serta komunikasi yang terjaga akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan yang dilakukan.

Pada objek wisata kedua yaitu objek wisata Ulu Kasok yang merupakan Objek Wisata dengan pemandangan alam yang dilihat dari perbukitan, pemanfaatan modal sosial yang teridentifikasi dimanfaatkan paling dominan adalah jaringan, jaringan adalah modal sosial yang paling menguntungkan untuk mengembangkan objek wisata Ulu Kasok, dengan adanya jaringan yang terbentuk dalam masyarakat, menjadikan mereka mampu bekerjasama untuk menjadikan kawasan Ulu Kasok menjadi sebuah objek wisata yang menarik. Jaringan yang dimanfaatkan dalam pengembangan objek wisata selain secara offline namun juga memanfaatkan jaringan secara online.



Gambar 3. Modal Sosial pada Objek Wisata Ulu Kasok

Gambar tiga menunjukkan bahwa modal sosial yang banyak dimanfaatkan adalah jaringan, hal ini terlihat dari hasil wawancara yang dikoding dan diolah dengan menggunakan Nvivo12 plus menunjukkan persentase jaringan yang dimanfaatkan dalam pengembangan objek wisata ulu kasok

adalah sebesar 33%, artinya jaringan menjadi modal sosial yang paling banyak dimanfaatkan. Jaringan yang terbentuk dalam membangun objek wisata ini adalah antara masyarakat pengelola objek wisata dengan para pelaku usaha, dengan menambah sarana prasarana serta fasilitas rumah makan yang menjadikan minat pengunjung menjadi meningkat.

Dengan meningkatnya teknologi informasi, maka pemanfaatan jaringan secara online juga dilakukan untuk pengembangan objek wisata, promosi yang dilakukan melalui media sosial terlihat memberikan kontribusi dalam menaikkan jumlah pengunjung ke objek wisata. Promosi yang dilakukan melalui pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, Status Whatsapp memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam meningkatkan jumlah pengunjung ke objek wisata. Teknologi digital memberikan manfaat yang besar dalam pada perluasan jaringan dalam mengembangkan sebuah usaha termasuk objek wisata, (Isni Reniati & Agung Fauzi, 2022). Selain dari jaringan yang dimanfaatkan dalam pengembangan objek wisata, adanya kepercayaan sesama masyarakat dalam mengembangkan objek wisata juga menjadi modal sosial yang bermanfaat, hal ini dapat dilihat dari persentase sebesar 25% yang didapatkan dari hasil penelitian.

Kepercayaan yang dibangun menjadikan mereka saling mendukung untuk kemajuan objek wisata ini. Membangun kepercayaan merupakan kunci utama dari modal sosial dalam pengembangan objek wisata, adanya saling percaya dari masyarakat bahwasanya pembangunan yang dilakukan pada objek wisata akan memberikan dampak positif terutama bagi perekonomian masyarakat. Membangun kepercayaan masyarakat dilakukan dengan partisipasi yang sungguh-sungguh dari masyarakat dalam mengembangkan objek wisata ini sehingga masyarakat lainnya akan turut berpartisipasi dalam pembangunan. Jika dilihat dari hasil penelitian di objek wisata ulu kasok, dukungan institusional sangat kurang dalam pengembangan objek wisata tersebut, hanya sebesar delapan persen. Dukungan intitusal menciptakan manfaat yang cukup besar bagi pengembangan objek wisata (Knollenberg et al., 2021). Dukungan tersebut memberikan kemudahan terutama untuk mengikat dan menjembatani dalam pengembangan objek wisata, (Tingginehe, 2020).

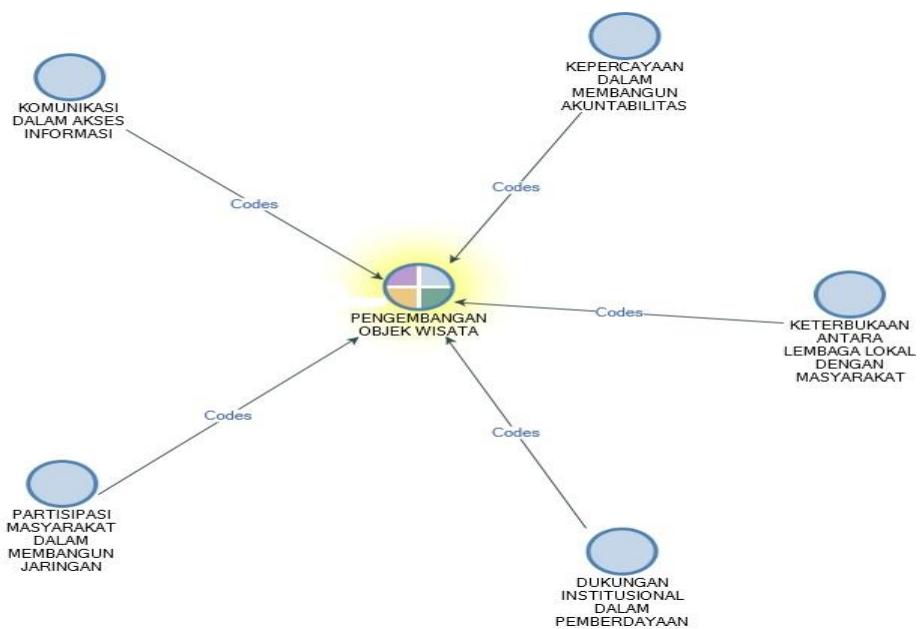
Secara khusus, temuan menunjukkan bahwa modal sosial yang mengikat dan memfasilitasi di antara pemangku kepentingan dalam kelompok yang sama melalui dukungan institusional belum terlihat. Kolaborasi yang dihasilkan antara pemangku kepentingan yang sama merupakan kontributor utama dalam pengembangan objek wisata. Pentingnya dukungan institusi adalah untuk membangun pendekatan secara terpadu untuk pengembangan pariwisata. Dukungan institusional yang mampu menjembatani modal sosial dan mendorong kolaborasi di antara para pemangku kepentingan yang memiliki tujuan yang sama akan memudahkan dalam pengembangan objek wisata. Elemen lainnya yang dimanfaatkan dalam modal sosial untuk pengembangan objek wisata adalah adanya keterbukaan dan komunikasi, keterbukaan dan komunikasi yang dimanfaatkan adalah masing-masing sebesar 16%. Masyarakat yang mampu memanfaatkan modal sosial dengan baik akan lebih mudah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Panorama Ulu Kasok yang memiliki potensi yang cukup bagus untuk dikembangkan, dengan adanya partisipasi masyarakat serta adanya rasa saling memiliki dan saling menghormati sehingga perkembangan objek wisata ini berjalan dengan baik. Meskipun disekitaran objek wisata Panorama Ulu Kasok juga bermunculan objek wisata serupa, namun masyarakat disekitar mampu untuk bekerjasama dalam memajukan objek wisata yang ada di daerah mereka, artinya persaingan yang terjadi tidak melewati batas norma-norma yang berlaku.

3.2 Pemberdayaan dan Modal Sosial dalam Pengembangan Objek Wisata

Pengembangan objek wisata termasuk dalam kegiatan pembangunan, ketika masyarakat disekitar objek wisata bersama-sama melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan modal sosial, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat akan terjadi secara langsung. Adanya partisipasi masyarakat sekitar yang secara bersama-sama membangun objek wisata dengan tujuan mendatangkan banyak wisatawan merupakan salah satu pemanfaatan modal sosial yang dilakukan (Susanti, 2022.). pemberdayaan masyarakat yang terjadi dalam pengembangan objek wisata adalah pada saat munculnya jaringan yang terbentuk dari adanya komunikasi yang dilakukan pada kelompok

masyarakat, komunikasi yang terjalin tidak terlepas dari peran kelembagaan yang ada sehingga mampu menggali modal sosial yang ada pada masyarakat, menurut Fukuyama (2001), lembaga-lembaga lokal mampu mempercepat kegiatan pembangunan dikarenakan memiliki modal sosial yang dimanfaatkan. Kelompok masyarakat yang berada di sekitar objek wisata memiliki modal sosial berupa jaringan yang dimanfaatkan secara online maupun offline. Jaringan terbentuk karena adanya komunikasi diantara kelompok masyarakat yang sama-sama berusaha dalam meningkatkan perekonomiannya. Komunikasi yang terjalin memberikan semangat dan kekuatan untuk berusaha mempromosikan objek wisata kepada masyarakat secara luas, dengan memanfaatkan media sosial dan interaksi dengan masyarakat lainnya dengan memanfaatkan fasilitas internet.

Dalam pengembangan objek wisata, pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan modal sosial dilakukan dengan komunikasi dalam mengakses informasi, kepercayaan dalam membangun akuntabilitas, keterbukaan antara lembaga lokal dan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam membangun jaringan serta dukungan institusional dalam pemberdayaan masyarakat.



Gambar 3. Pemberdayaan dan Modal Sosial dalam Pengembangan Objek Wisata

Gambar 3 menunjukkan bahwa dalam pengembangan objek wisata, modal sosial yang dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat yang **pertama** adalah komunikasi dalam mengakses informasi, komunikasi yang dilakukan antara masyarakat sekitar objek wisata dengan lembaga lokal, dan masyarakat dengan pemerintah secara online ataupun offline. Komunikasi bertujuan untuk memberikan ataupun mendapatkan informasi sejauh mana perkembangan objek wisata. Komunikasi juga dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan baik dari lembaga lokal ataupun dari pemerintah. Komunikasi yang telah dilakukan memberikan manfaat yang baik untuk perkembangan objek wisata. Komunikasi yang dibangun masyarakat sekitar objek wisata adalah antara masyarakat pengelola objek wisata dengan pengunjung, komunikasi yang ramah menjadikan pengunjung merasa nyaman pada saat berwisata. Komunikasi selanjutnya adalah antara masyarakat dengan lembaga lokal dan lembaga pemerintah, komunikasi yang terjalin menjadikan lembaga lokal dan pemerintah setempat ikut mendukung pengembangan objek wisata dengan mempromosikan objek wisata di media. Pemerintah juga melakukan komunikasi untuk meningkatkan motivasi masyarakat sekitar objek wisata dalam mengembangkan objek wisata serta mampu menggali potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan perekonomian. Permasalahan yang dihadapi masyarakat

dalam mengelola objek wisata juga dikomunikasikan kepada lembaga lokal dan pemerintah sehingga memudahkan lembaga lokal dan pemerintah membantu dalam menyelesaikan permasalahan.

Modal sosial dalam pemberdayaan yang **kedua** adalah kepercayaan dalam membangun akuntabilitas, dalam pemberdayaan masyarakat, akuntabilitas sangatlah penting agar rasa saling percaya diantara masyarakat, kelompok masyarakat dan lembaga lokal serta pemerintah dapat menjadi pondasi yang kuat dalam membangun objek wisata. Kepercayaan diantara masyarakat pengelola objek wisata sangatlah penting, karena dengan adanya kepercayaan maka kerjasama dapat dibangun dengan baik sehingga aktivitas di objek wisata akan selalu berjalan dan masyarakat akan menjadi produktif. Kepercayaan bahwasanya objek wisata akan mendatangkan pengunjung jika fasilitas tersedia dengan baik seperti tempat duduk untuk bersantai, makanan dan makanan ringan yang disediakan oleh pedagang maka pengelola akan berusaha untuk memastikan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana di tempat wisata. Pemerintah berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bahwasanya pemerintah mendukung kegiatan yang dilakukan masyarakat.

Modal sosial dalam pemberdayaan yang **ketiga** adalah keterbukaan antara lembaga lokal dan masyarakat, keterbukaan antara masyarakat dengan lembaga lokal dimulai dari perencanaan dukungan dari lembaga lokal dalam pengembangan objek wisata, lembaga lokal dalam hal ini adalah pokdarwis yang merupakan lembaga yang bertindak dalam mendukung kegiatan masyarakat sekitar objek wisata dalam mengembangkan objek wisata. Adanya keterbukaan dalam perencanaan membuat masyarakat memiliki semangat dan motivasi sehingga bersama-sama mewujudkan tujuan yang direncanakan. Keterbukaan juga dapat dilihat pada saat adanya permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata, lembaga lokal akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Modal sosial dalam pemberdayaan yang **keempat** adalah dukungan intitisional dalam pemberdayaan, dukungan institusional ini penting karna setiap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan membutuhkan peran serta institusional dalam memberikan semangat bagaimana masyarakat bisa bersama-sama menggali modal sosial yang dapat dimanfaatkan. Memberikan akses ke institusi lain dalam mempromosikan objek wisata. Dalam pengembangan objek wisata dukungan institusional yang didapatkan oleh masyarakat adalah pembangunan sarana dan prasarana untuk kenyamanan pengunjung maupun bagi masyarakat yang berjualan disekitar objek wisata. Modal sosial yang **kelima** adalah partisipasi masyarakat dalam membangun jaringan, jaringan merupakan unsur terpenting dalam mengembangkan objek wisata. Bentuk partisipasi masyarakat dalam mengembangkan objek wisata adalah bersama-sama membersihkan dan menjaga objek wisata terutama dari kegiatan pengunjung yang menyalahi aturan dan moral. Partisipasi lainnya adalah bersama-sama mempromosikan objek wisata di media masa atau media sosial yang mereka miliki, partisipasi masyarakat yang berada disekitar objek wisata juga dapat dilihat dari adanya keinginan mereka menambah wahana permainan bagi pengunjung sehingga menambah daya tarik objek wisata itu sendiri. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memiliki usaha seperti menyewakan permainan untuk pengunjung atau masyarakat yang berjualan disekitar objek wisata, semakin banyak pengunjung yang datang maka kesempatan masyarakat yang memiliki usaha ataupun berjualan untuk mendapatkan uang akan lebih besar, oleh sebab itu partisipasi masyarakat sangat besar dalam membangun jaringan atau komunitas baik melalui media sosial ataupun promosi yang dilakukan secara langsung. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lee & Hallak, 2020) di Selandia Baru yang melihat bagaimana modal sosial mempengaruhi usaha pariwisata secara online dan offline hasilnya menemukan bahwa adanya ikatan sosial untuk menemukan akses ke keuangan, inovasi dan sumberdaya manusia. Penelitian lainnya yang melihat peran modal sosial dalam pertumbuhan ekonomi bagi banyak masyarakat seperti industri pariwisata menemukan hasil pembangunan ekonomi yang dapat dihasilkan oleh wisata dipengaruhi oleh bentuk modal sosial yang diperlukan untuk membangun dan mempertahankan objek pariwisata tersebut, (García-Villaverde et al., 2021).

*Dia Meirina Suri, Moris Adidi Yogia, Cifebrima Suyastri
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Objek Wisata dengan Memanfaatkan Modal Sosial*

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pemberdayaan dibutuhkan modal sosial sehingga masyarakat yang berada disekitar objek wisata dapat bersama-sama membangun dan mengembangkan objek wisata tersebut sehingga dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat yang dilihat dari adanya peningkatan perekonomian masyarakat.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial merupakan alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan objek wisata. Jaringan merupakan modal sosial yang banyak dimanfaatkan dalam pengembangan objek wisata. Jaringan yang luas dimanfaatkan secara online maupun offline membantu masyarakat disekitar objek wisata dalam memposisikan pariwisata serta bersama-sama membangun fasilitas serta sarana dan prasarana yang mendukung objek wisata sehingga memberikan kenyamanan pengunjung dalam menikmati objek wisata. Jaringan online dibangun dengan memanfaatkan teknologi digital melalui media sosial. Pengembangan objek wisata terkendala pada saat pandemi karena ditutupnya objek wisata, namun dengan pemanfaatan jaringan secara online, objek wisata mulai berkembang secara signifikan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa memanfaatkan komunikasi dengan masyarakat dan membangun kepercayaan dan keterbukaan serta adanya dukungan institusional juga membuat objek wisata mampu untuk berkembang. Secara teoritis penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan, modal sosial yang dimanfaatkan dalam pengembangan objek wisata adalah jaringan secara online dan offline, komunikasi, kepercayaan dan dukungan institusi. Secara praktis hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan objek wisata dengan memanfaatkan modal sosial.

5. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah diambil, penulis memberikan saran kepada pemerintah untuk dapat mendukung pengembangan objek wisata dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan sehingga mampu menggali potensi modal sosial yang dapat dimanfaatkan, sehingga memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat disekitar objek wisata, untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk meneliti pemberdayaan dan modal sosial secara mendalam sehingga dapat menguatkan hasil penelitian dan dapat dimanfaatkan dalam peningkataan perekonomian masyarakat.

Ucapan Terima Kasih: Penulis mengucapkan terima kasih kepada DPPM Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi dalam melaksanakan penelitian serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian

Daftar Pustaka

- Arta, K. S. (2012). Kolaborasi Masyarakat Sipil, Politik dan Ekonomi dalam Pemanfaatan Modal Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 117–128.
- García-Villaverde, P. M., Ruiz-Ortega, M. J., Hurtado-Palomino, A., De La Gala-Velásquez, B., & Zirena-Bejarano, P. P. (2021). Social capital and innovativeness in firms in cultural tourism destinations: Divergent contingent factors. *Journal of Destination Marketing and Management*, 19(May 2020). <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100529>
- Haridison, A. (2013). Modal Sosial Dalam Pengelolaan Pembangunan. *JISPAR, FISIP Universitas Palangka Raya*, 4, 10. Retrieved from <https://bit.ly/3krykn1>
- Isni Reniati, & Agung Fauzi. (2022). Peran Modal Sosial Pada Digitalisasi Perdagangan. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(1), 148–158. <https://doi.org/10.37304/jpips.v14i1.4744>
- Jovita, H. D., Nashir, H., Mutiarin, D., Moner, Y., & Nurmandi, A. (2019). Social capital and disasters: How does social capital shape post-disaster conditions in the Philippines? *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29(4), 519–534. <https://doi.org/10.1080/10911359.2018.1556143>

- Knollenberg, W., Arroyo, C. G., Barbieri, C., & Boys, K. (2021). Craft beverage tourism development: The contributions of social capital. *Journal of Destination Marketing and Management*, 20(June 2020), 100599. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100599>
- Lee, C., & Hallak, R. (2020). Investigating the effects of offline and online social capital on tourism SME performance: A mixed-methods study of New Zealand entrepreneurs. *Tourism Management*, 80(February), 104128. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104128>
- Musavengane, R., & Kloppers, R. (2020). Social capital: An investment towards community resilience in the collaborative natural resources management of community-based tourism schemes. *Tourism Management Perspectives*, 34(March 2019), 100654. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100654>
- Musavengane, R., & Simatele, D. M. (2016). Community-based natural resource management: The role of social capital in collaborative environmental management of tribal resources in KwaZulu-Natal, South Africa. *Development Southern Africa*, 33(6), 806–821. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2016.1231054>
- Nunkoo, R. (2017). Governance and sustainable tourism: What is the role of trust, power and social capital? *Journal of Destination Marketing and Management*, 6(4), 277–285. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.10.003>
- Ozgun, A. H., Tarim, M., Delen, D., & Zaim, S. (2022). Social capital and organizational performance: The mediating role of innovation activities and intellectual capital. *Healthcare Analytics*, 2(March), 100046. <https://doi.org/10.1016/j.health.2022.100046>
- Rustinsyah, R., Prasetyo, R. A., & Adib, M. (2021). Social capital for flood disaster management: Case study of flooding in a village of Bengawan Solo Riverbank, Tuban, East Java Province. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 52(January 2020), 101963. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101963>
- Simbolon, A. K. (2018). Analisis Modal Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Lokal (Studi pada Wisata Petik Jeruk di Dusun Borogragal, Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang). *Cakrawala*, 12(1). <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v12i1.266>
- Susanti, N. (n.d.). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Modal Sosial*.
- Tingginehe, A. M., Waani, J. O., Wuisang, C. E. V., & Pariwisata, P. (n.d.). *Amanda M. Tingginehe, Judy O. Waani, Cyntia E.V Wuisang, Perencanaan Pariwisata Hijau di Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat, .., h. 513. 113 87. 87–99.*
- Upadani, I. G. A. W. (2017). Model Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Mengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bali. *Wicaksana, Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 1(1), 11–22.
- Utami, V. Y. (2020). Dinamika Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan, Jaringan Sosial Dan Norma. *Reformasi*, 10(1), 34–44. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1604>
- Yumantoko. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan: Proses Penguanan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Sesaot, Nusa Tenggara Barat. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(2). <https://doi.org/10.33007/ska.v11i2.3076>
- Zhou, L., Chan, E., & Song, H. (2017). Social capital and entrepreneurial mobility in early-stage tourism development: A case from rural China. *Tourism Management*, 63, 338–350. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.06.027>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).



Perlindungan Pekerja bagi Pekerja Lanjut Usia di Daerah Perdesaan: Analisis Situasi dan Kebijakan di Provinsi DI Yogyakarta

Aryan Torrido^{1*} , Muh. Ulil Abshor¹ dan Khatibul Umam¹

¹Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Korespondensi aryan.torrido@uin-suka.ac.id; Tel 081904049274

Diterima: 4 Juli 2023; Disetujui: 21 November 2023; Diterbitkan: 29 November 2023

Abstrak: Hanya sedikit penelitian yang memberikan perhatian pada kondisi kerja, perilaku ekonomi lansia, bahaya dan risiko kerja, serta perluasan akses terhadap perlindungan sosial di tempat kerja. Studi ini merupakan upaya untuk menganalisis kondisi kerja, perilaku ekonomi lansia, bahaya dan risiko kerja serta perluasan akses terhadap perlindungan sosial di tempat kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan observasi dan wawancara mendalam terhadap 22 informan yang berasal dari kalangan lanjut usia, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah. Studi ini menemukan bahwa lansia yang bekerja di pedesaan menggabungkan pertanian dan peternakan. Alasan bekerja bervariasi berdasarkan kelas sosial dimana alasan bekerja bagi lansia dari keluarga berada lebih cenderung karena alasan sosiologis sedangkan alasan bekerja bagi lansia dari keluarga berpendapatan rendah lebih cenderung karena alasan ekonomi. Paper ini juga menemukan bahwa berbagai bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan termasuk banyak pekerjaan yang menuntut fisik dan melelahkan, paparan bahan kimia, penggunaan alat pemotong yang tajam, mengangkat beban berat, berjalan jauh, jam kerja yang panjang dan binatang yang berbahaya. Sayangnya, para lansia tidak dilindungi oleh standar perlindungan sosial di tempat kerja mereka. Ada kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan mengenai lingkungan kerja yang ramah bagi orang lanjut usia.

Kata Kunci: perlindungan sosial, lanjut usia bekerja, kesehatan dan keselamatan kerja

Abstract: Little research attention has been given to working condition, economic behaviour of older people, hazards and risks of work and extend of access to social protection at employment. This study is an attempt to analyse the working condition, economic behaviour of older people, hazards and risks of work and extend of access to social protection at employment. This study employs qualitative approach by combining observation and in-depth interviews to 22 informants from older people, local leaders and government officers. This study found that older people who are working in rural areas combine farming and animal husbandry. The reason of working varied based on social class where the reason of working of older people from well-off family is more likely sociological reason while working older people from low income families is more likely economic reasons. This paper also found that a range of hazards related to work including much of work is physically demanding and strenuous, exposure to chemical, use sharp cutting tools, lifting heavy load, walking long distance, long working hours and dangerous animals. Unfortunately, older persons are not protected by social protection standard in their workplace. There is a need to develop a policy on friendly working environment for older people.

Keywords: social protection; working older people; health and safety occupation

1. Pendahuluan

Lanjut usia (lansia) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Penduduk lansia terus mengalami peningkatan seiring kemajuan di bidang kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya angka kematian. Bengtsson (2010) menjelaskan bahwasanya pertumbuhan penduduk lansia di negara berkembang sangat cepat, bahkan lebih cepat dibandingkan dengan negara maju. Pertumbuhan penduduk lansia tersebut umumnya terjadi di negara-negara Asia (Chiu, 2008). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan jumlah lansia di negara-negara Asia adalah 520 juta dan diprediksi meningkat menjadi 1.2 miliar tahun 2040an. Pertumbuhan penduduk lansia di sebuah negara dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang kompleks yang disebabkan oleh semakin meningkatnya pengeluaran untuk kesehatan dan perawatan sehari-hari yang selanjutnya dapat berimplikasi pada anggaran sebuah negara, pola konsumsi, perpajakan dan ketenagakerjaan (Bengtsson, 2010; Gruescu, 2007; Mason, 2007).

Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang memiliki pertumbuhan penduduk lansia yang sangat cepat (Arifin & Ananta, 2016; Hugo, 2000; Niehof, 1995; Suryadinata, Arifin, & Ananta, 2003; Van Eeuwijk, 2006; Witoelar, 2012). Dalam waktu hampir lima dekade, persentase lansia Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat (1971-2020), yakni dari 4,5 % (5,3 juta) tahun 1971 menjadi 9,92 % (26 juta-an) pada tahun 2020 dan diprediksi meningkat menjadi 16 % (48 juta) pada tahun 2035 (Adioetomo & Mujahid, 2014; BPS, 2014; BPS, 2020). Pada tahun 2020, sudah ada enam provinsi yang memiliki struktur penduduk tua (*ageing population*) di mana penduduk lansianya sudah mencapai 10 %, yaitu: DI Yogyakarta (14,71 %), Jawa Tengah (13,81 %), Jawa Timur (13,38 %), Bali (11,58 %), Sulawesi Utara (11,51 %), dan Sumatera Barat (10,07 %) (BPS, 2020). Sebuah daerah disebut memiliki struktur tua atau *ageing population* ketika persentase lansia di daerah tersebut mencapai 8 % sampai 10 % (Gavrilov & Heuveline, 2003).

Ditengah kondisi penduduk Indonesia yang kian menua, banyak dijumpai lansia yang masih aktif bekerja. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sebanyak 1 dari 2 lansia masih tetap aktif bekerja. Lansia yang bekerja cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada tahun 2016, persentase lansia yang bekerja sejumlah 47,4 %, meningkat menjadi 49,8 % pada tahun 2018 dan 51% tahun 2020 (BPS, 2020). Lebih dari 80 % bekerja di sektor informal yang menempatkan lansia pada kelompok yang sangat rentan karena bekerja dengan tidak memiliki perlindungan sosial, dasar hukum pekerjaan, imbalan kerja layak dan beresiko bekerja di sektor pekerjaan yang eksplotatif dan berbahaya. Berdasarkan jumlah jam kerja, dari setiap 5 orang pekerja lansia, setidaknya ada 1 orang yang bekerja secara berlebihan dengan jumlah jam kerja lebih dari 48 jam dalam seminggu (BPS, 2020).

Kudrna dan Piggott (2021) menemukan bahwa penghasilan utama lansia untuk memenuhi kehidupan sehari-hari di Indonesia di peroleh dari penghasilan bekerja. Disamping penghasilan dari bekerja, sumber penghasilan lansia yang lain adalah pensiun, bantuan keuangan dari anak dan asset yang dimiliki. Bantuan keuangan dari anak lebih sering diberikan untuk lansia yang sudah berumur 70 tahun keatas dimana kemampuan lansia untuk bekerja sangat menurun di usia tersebut.

Berdasarkan jenis kelamin, persentase lansia laki-laki yang bekerja jauh lebih besar dibandingkan lansia perempuan, yaitu 65,05 % berbanding 38,28 %. Lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja lansia, yaitu sebesar 54,81 %. Dari jumlah lansia yang tinggi tersebut, kebanyakan tinggal di daerah pedesaan yang umumnya anak-anak mereka bermigrasi ke kota untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak (Jones, 2016; Kreager, 2006). Hal tersebut menjadikan lansia di daerah pedesaan menjadi lebih rentan mengingat tidak ada anak-anak yang merawat mereka, fasilitas kesehatan yang kurang dan lemahnya program perlindungan sosial yang menjangkau mereka (Utomo, Mcdonald, Utomo, Cahyadi, & Sparrow, 2019).

Situasi ini menarik untuk dikaji secara lebih mendalam tentang situasi ketenagakerjaan lansia, model perlindungan sosial dan kebijakan sosial lansia di provinsi yang mengalami penuaan penduduk (*ageing population*) khususnya di Propinsi DI Yogyakarta (14,7 %). Kajian-kajian tentang lansia selama ini lebih banyak menggunakan data survey dengan pendekatan kuantitatif terkait dengan situasi

Aryan Torrido, Muh. Ulil Abshor, Khatibul Umam

Perlindungan Pekerja bagi Pekerja Lanjut Usia di Daerah Perdesaan: Analisis Situasi dan Kebijakan di Provinsi DI Yogyakarta

kesehatan lansia di Indonesia seperti Adioetomo & Mujahid, 2014; Arifin & Ananta, 2016; Wirakartakusumah, Nurdin, & Wongkaren, 1997. Penelitian-penelitian tersebut hanya memfokuskan di salah satu dimensi *wellbeing* lansia seperti aspek kesehatan atau ekonomi (kesejahteraan). Disamping fokus pada situasi lansia beberapa penelitian tentang lansia di Indonesia fokus pada kerentanan lansia seperti Kreager, 2006; Kreager & Schröder-Butterfill, 2007; Subiyono, 1999; Thristiawati, 2013; Van Eeuwijk, 2006. Kreager (2006) misalnya, menganalisa dampak migrasi terhadap kerentanan lansia di 3 desa di Indonesia. Desa yang diteliti dipilih berdasarkan perbedaan karakteristik desa dan responden dipilih berdasarkan kelas sosial dan *network* yang dimiliki. Kreager menemukan bahwasanya anak yang bermigrasi mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan kepada lansia khususnya ketika ada anggota keluarga lain yang masih tinggal di desa. Namun anak yang bermigrasi dari keluarga miskin cenderung mempunyai *network* yang lebih sedikit dan cenderung tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang dari migrasi sehingga cenderung belum mampu mengatasi situasi rentan yang dihadapi orangtua yang lansia. Daerah tujuan migrasi juga menjadi faktor penting terhadap kerentanan lansia dimana anak yang bermigrasi bukan ke kota besar cenderung bukan menjadi faktor yang dapat menghilangkan kerentanan lansia.

Van Eeuwijk (2006) menganalisis dimensi rentan lansia di daerah perkotaan di Indonesia. Van Eeuwijk (2006) menemukan bahwasanya kerentanan lansia dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin dan status pernikahan. Lansia yang tidak menikah dan janda adalah kelompok yang paling rentan karena perawatan lansia dilakukan oleh anak atau pasangannya. Disamping itu faktor lemahnya *networking* dan kondisi kemiskinan anak menjadi faktor yang mempengaruhi kerentanan lansia.

Thristiawati (2013) menemukan bahwasanya lansia perempuan lebih rentan dibandingkan dengan laki-laki karena diskriminasi yang dialami perempuan sepanjang hidupnya sejak masih anak-anak sampai menjadi lansia dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, perlindungan sosial di hadapan hukum dan posisi di tengah masyarakat. Status kesehatan dan kesejahteraan ekonomi lansia perempuan cenderung lebih buruk dibandingkan dengan laki-laki sebagai akibat status perempuan yang lebih rendah di masyarakat. Penelitian terkait dengan model perawatan baik kesehatan maupun perawatan dalam kehidupan sehari-hari juga sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian seperti dilakukan oleh Kreager & Schröder-Butterfill, 2015; Schröder-Butterfill, 2004; Schröder-Butterfill & Fithry, 2014; Van Eeuwijk, 2006 menemukan bahwa peran anak baik anak laki-laki maupun perempuan sangat penting dalam merawat orang tuanya yang lansia. Tanggungjawab anak untuk merawat orang tuanya yang lansia merupakan ajaran dari agama seperti Agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Yahudi dan agama lainnya.

Kajian yang mengkaji secara spesifik tentang situasi pekerjaan khususnya terkait dengan prilaku ekonomi (*economic behaviour*), kesehatan dan keselamatan pekerjaan yang dilakukan oleh lansia belum banyak dikaji. Akses terhadap perlindungan sosial khususnya di tempat kerja juga masih belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis situasi pekerjaan lansia di daerah pedesaan, alasan lansia masih bekerja berdasarkan kelas sosial, apa saja *hazard* dan resiko pekerjaan yang dihadapi dan rekomendasi kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang layak dan ramah untuk lansia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dianggap pendekatan yang tepat dalam mengeksplorasi persepsi dan pengalaman individu atau masyarakat secara mendalam yang sangat relevan dengan penelitian ini khususnya dalam menganalisis situasi pekerjaan lansia dan perilaku ekonomi. Untuk menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan teknik analisa tematik (*thematic analysis*) dengan menganalisa pola dan tema-tema yang muncul dalam data (Douglas, 2002; Liamputtong & Ezzy, 2005). Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan memilih desa yang secara umum penduduknya memiliki pekerjaan di sektor pertanian dan desa yang penduduknya banyak bekerja di sektor pariwisata yaitu desa Hargobinangun di Kabupaten Sleman dan Desa Pacarejo di Kabupaten Gunung Kidul.

Pengumpulan data dilakukan mulai Bulan September sampai November 2022. Ada dua teknik pengumpulan data yang dilakukan. Pertama adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam dianggap sebagai metode yang tepat untuk mendalami kehidupan dan situasi sehari-hari dari sekelompok masyarakat serta memahami kebiasaan masyarakat dalam konteks yang lebih luas (De Vaus, 2002). Wawancara mendalam juga dipandang metode yang tepat untuk menggali pengalaman masyarakat secara mendalam (Grbich, 2012). Wawancara mendalam dilakukan terhadap *key informan* dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan terbuka digunakan untuk menggali pengalaman lansia terkait topik yang diteliti (Minichiello, Aroni, Timewell, & Alexander, 1995). Pertanyaan-pertanyaan terbuka sangat strategis dalam pengumpulan data kualitatif dengan mendorong informan untuk berbagi informasi secara terbuka, menyampaikan pendapat secara bebas dan memberi kemudahan kepada peneliti untuk menggali informasi lanjutan secara lebih mendalam ketika dibutuhkan (Drummond, 2005; Henn, Weinstein, & Foard, 2005).

Informan dipilih secara purposive dengan memilih informan yang kaya informasi terkait topik yang diteliti, yaitu lansia yang bekerja di sektor pertanian dan pariwisata (Babbie, 2015). Peneliti dapat menggunakan justifikasi kayanya informasi dari informan dalam menseleksi informan dalam studi ini (Neuman, 2011). Wawancara secara mendalam dilakukan terhadap dua kelompok informan. Kelompok pertama adalah wawancara secara mendalam kepada lansia dan aparat desa seperti kepala desa, tokoh masyarakat. Beberapa informasi yang dikumpulkan melalui wawancara kepada lansia adalah demografi, struktur keluarga, aktivitas sehari-hari, situasi kerja, penghasilan, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan sosial dan dukungan sosial. Sedangkan informasi yang digali dari aparat desa adalah demografi desa, aktivitas sehari-hari lansia, aktivitas ekonomi, nilai dan budaya terkait lansia yang bekerja, kondisi lansia, faktor pendorong untuk bekerja dan program-program untuk lansia. Kelompok kedua adalah instansi pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial. Informasi yang dikumpulkan antara lain kondisi lansia yang bekerja, sektor pekerjaan, faktor pendorong untuk bekerja dan program-program untuk lansia. Dari kedua kelompok informan tersebut, peneliti telah mewawancarai 22 informan. Tabel 1 menjelaskan secara rinci demografi informan.

Tabel 1: Demografi Informan penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Keterangan
1	Sutino	Laki-laki	63	Lansia
2	Sutarwan	Laki-laki	72	Lansia
3	Narsiyah	Perempuan	60	Lansia
4	Marsuki	Laki-laki	73	Lansia
5	Marsilah	Perempuan	70	Lansia
6	Harjo Ngadiyo	Laki-laki	94	Lansia
7	Seniati	Perempuan	60	Lansia
8	Ngatinem	Perempuan	73	Lansia
9	Ani Isdiyanti	Perempuan	72	Lansia
10	Dwi	Perempuan	69	Lansia
11	Lismiyati	Perempuan	64	Lansia
12	Sumiyem	Perempuan	60	Lansia
13	Juminah	Perempuan	65	Lansia
14	Parto	Perempuan	84	Lansia
15	Sukinem	Perempuan	66	Lansia
16	Tri Suratin	Perempuan	66	Lansia
17	Suradji	Perempuan	68	Lansia
18	Mujiono	Laki-laki	52	Aparat Desa
19	Sumaryadi	Laki-laki	53	Aparat Desa
20	Aris	Laki-laki		Disnakertrans Sleman

Aryan Torrido, Muh. Ulil Abshor, Khatibul Umam

Perlindungan Pekerja bagi Pekerja Lanjut Usia di Daerah Perdesaan: Analisis Situasi dan Kebijakan di Provinsi DI Yogyakarta

21	Kurniyati	Perempuan	56	Dinsosnakertrans
22	Teguh budianta	Laki-laki	60	Dinsos Sleman

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah observasi. Observasi difokuskan pada aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh lansia. Dengan mengobservasi langsung aktivitas ekonomi lansia, peneliti dapat mengkaji resiko dan hazard yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan lansia ketika bekerja. Peneliti mengobservasi alat kerja apa saja yang digunakan, cara kerja, lingkungan kerja, sifat pekerjaan dan proses pekerjaan. Terkait dengan cara kerja peneliti akan memperhatikan posisi ergonomis tubuh saat bekerja dan cara mengangkat beban berat.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Aktifitas Ekonomi

3.1.1. Jenis Pekerjaan dan Perilaku Ekonomi

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 51% lansia tahun 2020 bekerja dan mayoritas lansia bekerja di sektor informal (BPS, 2020). Keasberry (2001) menemukan bahwa perbedaan antara lansia di daerah perkotaan dan di pedesaan adalah lansia di pedesaan lebih aktif secara ekonomi dan lebih tidak tergantung secara ekonomi dengan anak-anak mereka. Temuan tersebut dikuatkan oleh temuan penelitian ini yang menemukan bahwa mayoritas lansia masih bekerja di sektor informal di dua desa yang diteliti. Namun terdapat perbedaan dimana lansia di Desa Pacarejo banyak yang bekerja di sektor pertanian sedangkan di Desa Hargobinangun banyak yang bekerja di sektor jasa khususnya pariwisata mengingat lokasi penelitian dekat dengan daerah Wisata Kaliurang sebagaimana diungkapkan oleh pak Mujiono (Kamitudo Kalurahan Hargobinangun) ketika ditanya tentang aktivitas ekonomi lansia di desa tersebut:

Kebanyakan sektor jasa karena daerah wisata, ya hotel, warung, pedagang, kan banyak macamnya kalau jasa wisata... masih aktif kerjanya. Kalau yang sudah lansia banget yah enggak bekerja, mereka dirumah, tapi ada yang 70 tahun masih bekerja (Hargobinangun, 13 September 2022)

Lansia yang bekerja tidak dibatasi oleh umur bahkan diusia 70 tahun masih banyak yang bekerja di sektor pariwisata selama masih mampu. Hal serupa juga terjadi di sektor pertanian dimana lansia masih banyak yang bekerja diusia 70 tahun bahkan ada lansia yang sudah berusia 90 tahun masih bekerja dan memiliki 2 pekerjaan. Hal tersebut menggambarkan bahwasanya umur tidak membatasi lansia di daerah pedesaan untuk bekerja dan selama lansia masih kuat secara fisik mereka akan terus bekerja.

Pertanian adalah salah satu sektor pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja termasuk lansia. Bahkan di daerah pedesaan di Yogyakarta, sektor pertanian justru banyak diisi oleh lansia karena banyak anak-anak mereka yang bermigrasi ke kota besar untuk bekerja. Kebanyakan lansia menanam palawija di alas dan tegalan. Para petani lansia biasanya menanam padi, kacang, kedelai, jagung, singkong. Tanaman padi biasanya untuk konsumsi sendiri dan tidak dijual, sedangkan tanaman lain selain padi biasanya untuk dijual.

Bekerja di sektor pertanian menjadi aktivitas utama lansia juga dikuatkan oleh tokoh masyarakat Kalurahan Pacarejo saat peneliti menanyakan aktivitas apa yang dilakukan mayoritas lansia.

Yo petani, peternakan, masih banyak tegalan atau sawah, kalau enggak ya bantu anaknya di rumah. Kan ada anaknya yang punya kegiatan apa atau tanaman gitu terus dibantu...ya buruh tani, kalau yang masih kuat ya. Nanti kalau ada tetangga yang panen gitu dia bantu (Pacarejo, 30 Agustus 2022)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwasanya lansia yang masih kuat secara fisik cenderung aktif bertani dan beternak. Disamping kebutuhan lansia untuk aktif, faktor lain yang menyebabkan tingginya partisipasi lansia di sektor pertanian disebabkan karena hanya sedikit kaum muda yang masih tinggal di desa yang tertarik menjadi petani. Rendahnya minat kaum muda untuk bertani

mendorong kaum muda untuk bermigrasi mencari pekerjaan di kota-kota besar di Indonesia. Kalurahan Pacarejo memiliki tingkat migrasi kaum muda yang cukup tinggi. Kaum muda dari Kalurahan Pacarejo banyak yang bermigrasi untuk bekerja di kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang dan Depok.

Terkait dengan tempat bekerja, semua informan lansia yang diwawancara bekerja di lahan milik sendiri atau keluarga sedangkan lansia yang bekerja sebagai penjaga villa kebanyakan dimiliki oleh orang lain yang rata-rata tinggalnya di luar Sleman. Bahkan ada beberapa lansia yang menunggu villa selama puluhan tahun dengan pemilik villa yang berbeda-beda ketika pemilik villa sebelumnya menjual aset mereka ke orang lain. Namun, yang menunggu dan mengurus villa masih lansia yang sama.

Kebanyakan lansia setelah menjadi lansia beralih pekerjaan dari sektor lain seperti jasa (pertukangan dan dagang) ke pertanian seperti diungkapkan oleh Mbah Marsi (berusia 70 tahun) bahwa profesi sebelumnya adalah jualan tempe dan jadah di pasar. Bekerja sebagai pedagang di pasar cukup melelahkan disaat usia Mbah Marsi semakin tua sebagaimana diungkapkan:

Ya jualan tempe, jadah, ada apa-apa, ya dulu itu saya keturunan jualan dari ibu saya, tapi karena sudah tua jadi saya capek males ke pasar, dulu saya jualan di Wonosari itu (Pacarejo, 30 Agustus 2022).

Ada juga lansia yang sebelumnya bekerja menjadi tukang sekarang fokus bertani dan menjual hewan ternak di pasar. Jadi lansia di usia senjanya mencari aktivitas ekonomi yang lebih ringan dan sesuai dengan kemampuan fisik lansia dan bertani menjadi pilihan utama mereka yang tinggal di daerah pedesaan.

3.1.2. Kearifan lokal dalam mengkombinasikan bertani dan beternak

Disamping bertani, mayoritas lansia memelihara ternak seperti kambing dan sapi. Bagi lansia dan masyarakat secara umum, mereka merasa rugi kalau bertani jika tidak memiliki ternak karena antara memelihara ternak dan bertani saling melengkapi. Pakan hewan ternak dipenuhi dari pertanian dan kebutuhan akan pupuk dipenuhi oleh hewan ternak. Kotoran dari sapi dan kambing dikeringkan terlebih dahulu sehingga lebih ringan ketika dibawa ke areal pertanian. Disamping dari kotoran hewan ternak, lansia petani juga membuat pupuk organic dari sampah dengan menyapu dedaunan di halaman rumah selanjutnya dibakar untuk dibuat pupuk organic sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang petani lansia, Mbah Marsuki (73 tahun):

Nyapu-nyapu disini. Mengke sampah dikelompokke, diobong damel rabuk, rabuk teng sawah (Nanti sampahnya dikelompokkan, dibakar untuk rabuk, rabuk di sawah). Dukumpulkan Mas debune (Pacarejo, 30 Agustus 2022)

Oleh karena itu sudah menjadi kebiasaan para lansia untuk membawa pupuk organic dari kotoran hewan ternak dan dedaunan setiap pagi sedikit demi sedikit ketika berangkat ke tegalan atau sawah dan ketika pulang lansia membawa pakan ternak dari tumbuh-tumbuhan dan rerumputan di areal pertanian mereka atau membawa kayu bakar sebagaimana diungkapkan oleh Mbah Nino (usia 63 tahun)

Jam 7, jam setengah 8 (berangkat ke sawah/alas), pulang-pulang jam setengah 11, jam 10 itu...iya pakai motor, pakai karung kalau nggak ya diiket, Jadi pergi membawa rabuk pulangnya membawa pakan, Bisa aja kayu (bawa pulang) (Pacarejo, 30 Agustus 2022).

Praktik kombinasi antara bertani dan beternak menjadi kearifan lokal masyarakat yang masih dipraktekkan sebagai salah satu strategi resiliensi lansia dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ternak yang pakannya diambil dari areal pertanian lansia dapat menjadi tabungan lansia yang dijual ketika memerlukan uang bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari tetapi juga dipergunakan untuk membiayai sekolah cucu-cucu mereka.

3.1.3. Alasan bekerja berdasarkan kelas sosial

Secara umum lansia yang mampu bekerja akan terus bekerja baik dari lansia yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun keluarga mampu. Keluarga yang mampu diukur dengan status pekerjaan lansia sebelumnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pasangannya yang menjadi PNS. Alasan lansia bekerja berbeda dimana lansia yang berasal dari keluarga mampu bekerja karena alasan sosiologis yaitu untuk menyibukkan diri, tetapi aktif dan sehat. Alasan ekonomi bukan menjadi alasan utama karena kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi pensiun yang mereka miliki. Mbah Tri, istri seorang pensiunan PNS yang berusia 66 tahun yang memiliki warung mengatakan:

Karena saya itu kalo menganggur itu ya endak enak... yaa kegiatan mbak, karna gini mbak kalau udah tua nganggur itu malah garai loro (bikin sakit). biasanya gitu, jadinya pokoknya ya kalau udah cukup ya kita harus kerja, momong (mengasuh), masak-masak niku (itu) kalo pas rame saya ngewangi (membantu) masak, masak juga (Hargobinangun, 6 September 2022).

Hal senada disampaikan juga oleh Mbah Sutarwan, seorang pensiunan guru SD yang berusia 72 tahun, mengatakan bahwa disamping untuk beraktivitas, bertani juga bertujuan untuk olah raga.

Kulo lanjut tani, daripada nganggur, bisa dibuat olahraga jadi tani, Ini kesibukan Mbak, daripada nganggur yoh idup-idup (Mending) olahraga, ternyata yah sangat membantu, hasilnya yah lumayan, beras gak beli, cukup dengan hasil sendiri. Mulane yoh lek wong deso lek ora tani ki orah patut loh Mbak. Kulo tau diseneni konco-konco padahal wes pensiun tapi isih bertani, yoh kulo seneng kok." (Awalnya ya kalo orang desa tidak bertani ini tidak patut lo Mbak. Saya pernah dimarahin teman-teman padahal udah pensiun masih bertani, ya saya suka kok) (Pacarejo, 30 Agustus 2022)

Bagi lansia yang berasal dari keluarga mampu, bekerja bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan mereka menikmati dan merasa lebih bahagia jika dibandingkan ketika sebelum menjadi lansia (sebelum berusia 60 tahun). Menjadi lansia lebih menyenangkan karena sudah tidak membiayai pendidikan anak sebagaimana dikatakan oleh Mbah Sutarwan:

Tidak seberapa mikirin tentang kebutuhan hidup. Dadi nikmat, mun biyen niku kebutuhan hidup banyak, (Tapi dulu itu kebutuhan banyak) membiayai anak sekolah Mbak, lah saiki lebih nikmat, mikire mun mikir ringan-ringan. Soyo tambah sayang lan harmonis sama ibuk. (Semakin tambah sayang dan harmonis sama ibu) (Pacarejo, 30 Agustus 2022)

Sedangkan lansia dari keluarga kurang mampu bekerja karena faktor ekonomi untuk bertahan hidup. Penghasilan dari bekerja menjadi pendapatan utama untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Mbah Marsi (berusia 70 tahun) misalnya mengatakan:

Karena saya itu masih ingin megang uang, masih ingin jajan, masih mau kerja nemenin anak cucu gitu, saya itu dilarang anak kerja itu nggak mau disuruh diem dirumah (Pacarejo, 30 Agustus 2022)

Dukungan sosial khususnya dukungan finansial dari anak masih belum optimal mengingat banyak anak lansia yang merantau dan anak-anak mereka juga kurang mampu. Untuk mengatasi masalah tersebut tidak jarang lansia memiliki lebih dari satu pekerjaan. Misalnya Mbah Sumiyem (berusia 60 tahun), disamping bekerja sebagai penjaga villa, beliau setiap akhir pekan (hari sabtu dan minggu) berjualan makanan ringan dan menyewakan tikar di sekitar Taman Kaliurang. Selain Mbah Sumiyem, Mbah Sukinem (berusia 66 tahun) memiliki pekerjaan utama sebagai penjaga villa dan memiliki pekerjaan sampingan membantu usaha *catering* tetangganya. Lansia lainnya, Mbah Harjo (berusia 94 tahun) dimana selain bekerja sebagai petani, ia juga bekerja di Goa Jomblang. Pekerjaan yang dilakukan Mbah Harjo cukup unik yaitu menarik pengunjung/wisatawan yang masuk ke goa Jomblang. Lansia lainnya, Mba Nino selain bertani, beliau juga mblantik (menjadi penjual hewan ternak) seperti sapi dan kambing. Setiap minggu, Mbah Nino ke pasar hewan selama 2 kali untuk menjual hewan ternak. Mbah Nino mengatakan:

Ke ladang, cari pakan, terus kalau hari wage kliwon itu kepasar, Seminggu tu dua kali ke Wonosari sama Munggi, jadi kalau tidak kepasar ke sawah (Pacarejo, 30 Agustus 2022)

3.2. Bahaya dan Resiko Kerja

Perlindungan ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kesehatan dan keselamatan kerja/*occupational health and safety* (K3). Kesehatan dan keselamatan kerja adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ada tiga aspek yang menjadi perhatian dalam melaksanakan prinsip K3 yaitu tempat kerja, tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan sumber bahaya (*hazards*) yang berpotensi sebagai penyebab kecelakaan dan sakit. Sumber bahaya ditempat kerja dapat bersumber dari lima aspek yaitu kondisi mesin atau alat kerja, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja dan proses produksi.

Lansia yang bekerja di sektor informal khususnya pertanian dan pariwisata bisa dikategorikan sebagai sektor yang cukup banyak *hazard* dan resikonya karena umumnya sektor ini tidak diatur dan tidak dijangkau oleh peraturan perlindungan ketenagakerjaan. Bahaya-bahaya atau resiko kerja yang dihadapi oleh lansia terkait pekerjaan yang dilakukan adalah antara lain:

- a. Sebagian besar pekerjaan di sektor pertanian dan jasa sifatnya berat dan membutuhkan ketahanan fisik. Pekerjaan ini membutuhkan waktu yang lama untuk berdiri, membungkuk, menekuk, dan gerakan bertenaga yang dilakukan berulang-ulang dalam posisi tubuh yang janggal. Mengarit rumput misalnya menuntut lansia untuk jongkok cukup lama. Begitu juga membersihkan kamar mandi dan membersihkan rerumputan di sektor perhotelan menuntut lansia menggunakan gerakan bertenaga secara berulang-ulang dengan posisi yang sama. Hal tersebut dapat mengakibatkan gampang capek dan sakit persendian sebagaimana diungkapkan oleh Mbah Parto (berusia 84 tahun) yang bekerja sebagai penjaga villa:

Biasanya saya bangun jam 4 pagi, terus solat, jam 3 jam 2, ngga mesti. Setelah solat saya jalan-jalan. Setelah jalan-jalan, habis itu bersih-bersih. Masaknya setiap sore, makan paginya pakai masakan yang semalem. Makanannya makanan rebus kentang dan sayur yang lainnya, sup-sup an. Yang goreng-goreng kadang-kadang. Biasanya direbus bacem. Setelah itu bersih-bersih kawasan Villa, bersihin rumput, cukil-cukil....Lina-linu paling kalo habis bersih-bersih Villa (Hargobinangun, 5 September 2022)

Hal senada disampaikan Mbah Tri (66 tahun) yang bekerja sebagai pemilik warung

Kalau sekarang itu gampang kesel (capek) gitu, sering kesel gitu lo, kalau dulu itu saya kalau belanja itu bisa sehari dua kali ndak capek gitu mbak, kalau sekarang saya ke Jogja sekali itu uwes kesel (Hargobinangun, 6 September 2022)

Resiko sering kecapeaan akibat bekerja juga disampaikan oleh Mbah Juminah (65 tahun) yang bekerja sebagai penjaga villa:

Ya kadang-kadang itu suka kecapean ya sakit, saya buat istirahat engga kerja (Hargobinangun, 5 September 2022)

Pekerjaan Mbah Harjo (94 tahun) yang bekerja narik wisatawan di Goa Jomblang juga sangat berat. Ia biasanya turun ke goa dengan kedalaman 60 meter. Pekerjaan di Goa dilakukan dengan menarik pengunjung saat naiknya. Ia bekerja dan bersaing dengan teman kerja yang jauh lebih muda. Bahkan Mbah Harjo pernah rebutan pengunjung dengan pekerja lain yang masih muda sampai terjatuh sebagaimana diungkapkan:

Turun Jomblang itu jalan masuknya. Kalau pulang dari Jomblang, naiknya ditarik.. saya turun itu 60 meter pernah juga itu Mbak, temannya masih muda-muda. Larinya kalah cepat pernah ada yang bilang, mbah jatuh gitu, langsung dipijat...dulu juga pernah ada kucing di lemparin, dia jatuh kena batu. Katanya kan kucing itu karma, pernah bapak itu. Jadi jatuh kenak batu (Pacarejo, 30 Agustus 2022)

Aryan Torrido, Muh. Ulil Abshor, Khatibul Umam

Perlindungan Pekerja bagi Pekerja Lanjut Usia di Daerah Perdesaan: Analisis Situasi dan Kebijakan di Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan pemaparan diatas, posisi ergonomi saat melakukan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama untuk berdiri, membungkuk, menekuk, dan gerakan bertenaga yang dilakukan berulang-ulang dalam posisi tubuh yang janggal menjadi *hazards* yang dapat mengakibatkan gampang capek, sakit %dian dan terjatuh.

- b. Menggunakan alat potong yang tajam, seperti parang, gatul, cangkul, arit dan sabit besar untuk memotong hasil panen, jerami, rumput, dan semak belukar. Alat potong tersebut menjadi potensi *hazards* yang sering menimbulkan luka atau bahkan cedera yang lebih serius. Misalnya Mbah Juminem mengatakan sering kena arit ketika mencabut rumput di sekitar villa yang ditunggu.

Nggih kenging, sering kenging, ha dolanan arit niku nggih (ya kena, sering kena, ha mainan arit itu yaa) (Hargobinangun, 5 September 2022)

Pengalaman serupa juga dialami oleh Mbah Marsi dan Mbah Marsuki yang bekerja di sektor pertanian. Mbah Marsuki mengatakan sampai masuk rumah sakit karena terpeleset saat memotong bambu:

Nate (sering). Nggeh biasa wong kerja wonten (ada) resiko, wong kerja yoh iso kepeleset. Orang tua itu kalau kerja harus hati-hati mbah, lupa. Negor (Motong) bambu itu Mas kenak, rumah sakit. Dijahit. Kalau sudah lansia itu sudah lupa apa-apa. Saya sendiri yang kenak, dijahit 9 jahitan (Pacarejo, 30 Agustus 2022)

Mbah Sutarwan juga mengatakan bahwa sering kena arit sampai susah jalan.

Yoh sering, ini saja belum sembuh, ini saja kenak arit, jatuh ngenai kaki, saya kalau jalan masih susah Mbak, masih sakit, yah sering (Pacarejo, 30 Agustus 2022).

Gerakan bertenaga yang dilakukan secara berulang-ulang sewaktu memotong juga dapat mengganggu otot mereka. Linu-linu dan sakit %dian adalah resiko yang sering muncul dari gerakan bertenaga secara berulang-ulang tanpa melakukan peregangan terlebih dahulu. Meskipun petani sudah terbiasa melakukan gerakan berulang-berulang tersebut, resiko linu-linu masih sering terjadi.

- c. Membawa beban yang berat dan kaku seperti kayu, pupuk, tumpukan hasil panen, biasanya dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Jarak dari rumah lansia ke ladang mereka rata-rata satu sampai satu setengah kilometer. Membawa beban berat dengan jarak tempuh yang jauh menjadi potensi *hazards* yang beresiko terhadap kesehatan lansia. Lansia laki-laki biasanya mengendarai sepeda, tapi lansia perempuan cenderung berjalan kaki dengan kondisi jalan yang licin dan mendaki. Mbah Marsi mengatakan:

Nggih ngendong kabotan seko ngalas (ya ngendong keberatan kalau dari sawah)... Nggih pakan nggih, nek mboten dipethuk nggih tetep ngendong (iya makanan hewan, kalau enggak dijemput ya tetap ngendong), berat, sepuluhan kilo, iya pakan sepuluhan kilo jauh... Diangkat digendong (Pacarejo, 30 Agustus 2022).

Disamping itu, salah satu aktivitas lansia yang menunggu villa atau penginapan adalah mengganti sprei dan memindahkan kasur dan merapikan kursi-kursi di ruang tamu dimana sebagian dari pekerjaan tersebut harus mengangkat dan terkadang cukup berat untuk diangkat. Kadang memindahkan kasur dari gudang penyimpanan untuk dipakai di kamar atau ruang tamu ketika tamu penyewa atau pengunjung cukup banyak.

- d. Jam kerja yang cenderung lama untuk seumuran lansia. Kondisi fisik yang sudah mulai melemah dapat mengakibatkan cepat kecapekan dan sakit karena kerja dalam waktu yang lama. Mbah Marsi misalnya pernah hampir pingsan karena kecapean setelah pulang bekerja dari hutan/alas sebagaimana diungkapkan:

Kalau dulu itu di hutan jam sebelas belum pulang saya itu sampai rumah tiba tiba mau pingsan terus dilarikan ke tempat itu nginep dua hari di tempat Pak Suroyo itu (Pacarejo, 30 Agustus 2022).

Kebanyakan lansia berangkat ke ladang sekitar jam 7 atau jam 8 dan pulang lagi sekitar jam 10.30 untuk istirahat dan makan siang. Bahkan ada lansia yang langsung bekerja lagi di Goa Jomblang setelah dari sawah karena kebetulan cukup berdekatan sampai jam 14.00 siang. Setelah istirahat di sore hari, banyak lansia yang kembali lagi ke ladang atau hanya untuk mencari pakan ternak. Aktivitas tersebut dilakukan dari pagi bahkan ada yang sampai sore cukup melelahkan untuk lansia.

- e. Bekerja dengan alat pelindung kerja yang minim. Di sektor pertanian, alat pelindung kerja yang biasa dipakai oleh lansia adalah topi/caping dan baju lengan panjang. Beberapa lansia hanya menggunakan sandal dan ada juga lansia yang tidak menggunakan alas kaki sama sekali ketika bekerja. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kerja lansia apalagi lansia yang bekerja di alas (hutan) dimana banyak binatang berbahaya seperti ular dan kalajengking. Disamping itu, berjalan dan bekerja tanpa menggunakan sepatu atau sandal dapat menyebabkan kaki luka dari beling, batu tajam di jalan maupun di areal pertanian. Petani lansia juga tidak menggunakan sarung tangan ketika bertani. Menggunakan sarung tangan akan sangat membantu mencegah resiko terkena benda tajam atau gigitan binatang seperti ular dan kalajengking yang banyak ditemui di area hutan. Mbah Sutarwan mengatakan menggunakan alat pelindung kerja seperti sarung tangan menyulitkan:

Sarung tangan tuh rasane iki koyok ribet (rasanya ini seperti ribet), kalau ibuke iku mesti pakai sarung tangan. Kalau kulo niki (Kalau saya ini) kayak ngganggu kalau pake sarung tangan. Kepenak lepas (enak dilepas), koyok kurang bebas. Tapi pakaian harus lengan lengan panjang (Pacarejo, 30 Agustus 2022)..

Disamping itu, lansia yang bekerja sebagai penjual ternak biasanya menggunakan sepatu tebal sebagai alat perlindungan kerja sehingga tidak cedera atau terluka ketika diinjak sapi sebagaimana diungkapkan oleh Mbah Nino:

Ha njualkan di pasar iku sapine besar-besaran dituntut pakai sepatu tebel, makanya kalau diinjak sapi nggak apa apa (Pacarejo, 30 Agustus 2022).

- f. Jalan ke sawah dan alas (hutan) cukup jauh. Lansia tidak hanya bekerja di sawah, namun beberapa bertani di hutan (alas) yang sering sekali jaraknya cukup jauh. Lansia perempuan biasanya jalan kaki ke ladang pertaniannya sedangkan lansia laki-laki ada yang pakai sepeda ontel atau sepeda motor. Namun, karena lokasi bertaninya di areal hutan tidak bisa diakses oleh kendaraan, lansia tetap harus berjalan. Hal tersebut dapat berakibat kaki linu-linu dan Bengkak. Salah seorang lansia (Mbah Marsi) mengatakan:

Dulu sering Bengkak tapi sekarang malah sehat nggak pernah kumat, saya terapi, udah lama banget dah berapa tahun, dulu itu kalau sholat nggak bisa ditekuk nggak bisa mesti selonjor, tapi sekarang itu malah nggak papa sehat (Pacarejo, 30 Agustus 2022).

Pengalaman serupa dialami oleh Mbah Nino dimana kakinya sakit kalau ditekuk:

Sikil niku mbak, ditekuk itu sakit (kaki itu mbak, ditekuk sakit) (Pacarejo, 30 Agustus 2022).

- g. Lingkungan kerja yang berbahaya dari binatang buas khususnya lansia yang bekerja di alas. Beberapa binatang berbahaya yang ada di alas antara lain ular, kalajengking dan tawon. Mbah Nino misalnya menceritakan sering digigit kalajengking dan pernah dipatuk ular sehingga menjadikan badannya gatal dan panas. Mbah Nino juga menceritakan mata kanannya sampai tidak bisa melihat dan berdarah akibat terkena getah benguk.

Saya itu ceritanya mencari pakan terus mau menaruh pakan diatas, ada benguknya satu gerombol, pakannya belum jadi ditaruh, benguknya sudah jatuh ke mata sampai terasa sekali,

sampai keluar darahnya di mata.. tingginya saja hampir 6 meter, terus ini matanya nangis terus yang kanan, nggak bisa lihat, semisalkan sebelah kiri ditutup ya saya nggak kelihatan apa apa (Pacarejo, 30 Agustus 2022).

- h. Lansia yang bekerja di sektor pertanian cenderung terpapar dengan bahan kimia seperti pestisida. Penggunaan pestisida dan bahan kimia yang lain dapat berbahaya bagi kesehatan lansia apalagi tanpa alat perlindungan kerja yang standar seperti menggunakan masker, kaca mata, jas pelindung dan sepatu boat. Istrinya Mbah Tino mengatakan biasanya suaminya pusing karena kebiasaan orang di desanya tidak menggunakan masker ketika menggunakan bahan kimia seperti pestisida:

Yo biasane pusing kae, cuman jarang nganggo masker nek wong sini (biasanya cuma pusing disini jarang pake masker) (Pacarejo, 30 Agustus 2022).

Lansia yang menunggu villa juga menggunakan bahan kimia pembersih kamar mandi ketika membersihkan kamar mandi. Bagi sebagian penjaga villa, hal pertama yang selalu dibersihkan terlebih dahulu adalah kamar mandi setelah pengunjung *cek out* dari penginapan. Mendekati hari sabtu dan minggu dimana penginapan biasanya banyak yang nyewa, penunggu villa biasanya baru membersihkan kamar dan mengganti sprei dan sarung bantal.

3.3. Perlindungan di tempat kerja

Lansia yang bekerja di sektor pertanian dan jasa termasuk sector informal. Sektor informal secara umum tidak mendapatkan perlindungan di tempat kerja. Dinas Tenaga Kerja menekankan bahwa berdasarkan peraturan perusahaan yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, tidak ada perusahaan yang mempekerjakan lansia sehingga tidak di-*cover* oleh aturan perlindungan ketenagakerjaan. Oleh karena itu perlindungan kerja khususnya kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di sektor formal sekalipun tidak ada. Aris mengatakan:

Kalau dilihat dari peraturan perusahaan yang disahkan oleh dinas tidak ada, tapi tidak tau kalau praktiknya, rata-rata tidak ada karena rata-rata masih dibawah, berkisar antara 55 sampai 57. Berkisar itu sampai saat ini (Sleman, 7 September 2022).

Namun lansia yang bekerja sebagai penunggu villa karena bekerja sama orang biasanya mendapatkan THR dan penghasilan yang lebih rutin. Mayoritas informan memiliki asuransi kesehatan khususnya yang pensiunan dari PNS. Begitu juga lansia yang memiliki pasangan yang pensiunan PNS memiliki asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.

Punya, BPJS itu dari suami dulu, terus sekarang tenaga kerja, ada tenaga kerja tapi tenaga kerja itu udah lama tidak ditagih, ndak bayar ini. Saya kan pegawai yang di daftarkan 7, tapi ini udah berapa bulan ini udah, nda ditagih, endak dikasih nomernya jadi saya endak bayar. Belum bayar, udah lama banget itu (Hargobinangun, 6 September 2022)

Sedangkan lansia yang bukan pensiunan PNS sebagian punya BPJS dan biasanya dibayarkan iurannya oleh anak mereka.

Terkait dengan program perlindungan sosial, secara umum program untuk lansia adalah bantuan sosial seperti PKH Lansia, BPNT lansia dan permakanan sebagaimana diungkap oleh Ibu Kurniyati, Kasi Disabilitas dan Lansia Dinas Sosial Gunung Kidul

Untuk pelayanan sosial lansia itu ada yang dari PKH Lansia, BPNT Lansia, ada juga pelayanan bantuan permakanan untuk lansia, untuk satu tahun bantuan per makanan hanya bisa membantu 60 lansia dari beribu lansia di Gunung Kidul karena anggaran yang hanya sedikit tadi. Lansia juga diberikan Kartu Indonesia Sehat untuk berobat dan cek kesehatan (Gunung Kidul, 30 Agustus 2022)

4. Kesimpulan

Di tengah meningkatnya persentase jumlah penduduk lansia di Indonesia, banyak dijumpai lansia yang masih aktif bekerja dengan perbandingan sebanyak 1 dari 2 lansia masih tetap aktif bekerja. Di daerah pedesaan Yogyakarta, lansia banyak yang bekerja di sektor pertanian dan jasa. Di sektor pertanian, tenaga kerja banyak didominasi oleh pekerja lansia karena kaum muda banyak yang bermigrasi ke kota dan banyak kaum muda yang masih tinggal di desa tidak tertarik menjadi petani. Lansia yang bekerja di sektor pertanian mengkombinasikan bertani dan beternak karena kedua jenis pekerjaan tersebut saling melengkapi. Pakan hewan ternak dipenuhi dari pertanian dan kebutuhan akan pupuk dipenuhi dari kotoran hewan ternak. Setiap pagi petani lansia membawa pupuk yg telah dikeringkan dan pulangnya membawa pakan ternak atau kayu bakar.

Di sektor pertanian, secara umum jenis pekerjaan atau tugas yang dilakukan antara lansia laki-laki dan perempuan sama, namun lansia laki-laki biasanya menggunakan sepeda motor atau ontel ke lahan pertanian mereka sedangkan lansia perempuan banyak yang jalan kaki atau antar jemput. Di sektor jasa di daerah pariwisata, lansia perempuan lebih banyak yang bekerja sebagai penunggu villa dan berdagang di warung sedangkan lansia laki-laki banyak yang bekerja serabutan, beternak dan bertani disamping membantu istrinya menjaga villa.

Lansia yang bekerja memiliki alasan yang berbeda berdasarkan kelas sosial mereka. Lansia dari kelas sosial yang tinggi bekerja dengan alasan sosiologis yaitu untuk menyibukkan diri, tetap aktif, olah raga dan untuk sehat sedangkan lansia dari keluarga kurang mampu alasan bekerja karena alasan ekonomi untuk survive. Kebanyakan anak lansia tidak memperbolehkan orangtua yang sudah lansia untuk bekerja namun masyarakat melihat lansia yang bekerja sebagai sesuatu yang biasa dan aktivitas yang layak bagi lansia selama pekerjaan yang dilakukan bukan pekerjaan yang berat.

Lansia yang bekerja di sektor pertanian dan pariwisata menghadapi beberapa potensi *hazards* terkait pekerjaan yang mereka lakukan diantaranya ergonomi kerja dengan posisi berdiri, membungkuk, menekuk dalam waktu yang lama dan gerakan bertenaga yang dilakukan berulang-ulang dalam posisi tubuh yang janggal. Potensi *hazards* yang lain adalah menggunakan alat potong yang tajam, mengangkat dan membawa beban yang berat, jam kerja yang cenderung cukup lama, bekerja dengan alat pelindung kerja yang minim, binatang berbahaya dan terpapar bahan kimia. Potensi *hazards* tersebut mengakibatkan resiko kerja diantaranya adalah gampang capek, sakit %dian, terjatuh, luka, kaki linu-linu dan bengkak, digigit kalajengking dan ular serta pusing.

5. Saran

Resiko mengalami kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan menjadi masalah utama yang dihadapi lansia di tempat kerja. Namun, tidak ada perlindungan sosial yang menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para lansia. Situasi ini termasuk masalah kebijakan yang memerlukan pendekatan kebijakan dalam berkontribusi dalam menyelesaikan masalah kebijakan tersebut. Salah satu rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penguatan dan peningkatan kesadaran terhadap lansia tentang kesehatan dan keselamatan kerja khususnya terkait bagaimana melakukan pekerjaan di sektor pertanian dan jasa yang tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan mereka. Oleh karena itu, perlu mengembangkan standart ketenagakerjaan untuk lansia. Standart ketenagakerjaan ini selanjutnya dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja untuk lansia di sektor informal.

Daftar Pustaka

- Adioetomo, S. M., & Mujahid, G. (2014). *Indonesia on the threshold of population ageing*. Indonesia: United Nations Population Fund (UNFPA).
- Arifin, E. N., & Ananta, A. (2016). The past three population censuses: A deepening ageing population in Indonesia. In *Contemporary Demographic Transformations in China, India and Indonesia*. Springer, 309-323.
- Babbie, E. R. (2015). *The practice of social research*: Nelson Education.
- Bengtsson, T. (2010). Population ageing-a threat to the welfare state?: the case of Sweden: Springer Science & Business Media.

Aryan Torrido, Muh. Ulil Abshor, Khatibul Umam

Perlindungan Pekerja bagi Pekerja Lanjut Usia di Daerah Perdesaan: Analisis Situasi dan Kebijakan di Provinsi DI Yogyakarta

- BPS. (2020). Statistik Penduduk Lanjut usia. Jakarta: BPS
- Chiu, E. (2008). Ageing in Asia. *Ageing International*, 32(4), 257-257.
- De Vaus, D. A. (2002). *Social surveys* (Vol. 2): Sage.
- Douglas, E. (2002). *Qualitative analysis: practice and innovation*: Taylor & Francis
- Drummond, M. J. (2005). Men's bodies: Listening to the voices of young gay men. *Men and masculinities*, 7(3), 270-290.
- Gavrilov, L. A., & Heuveline, P. (2003). Aging of population. *The encyclopedia of population*, 1, 32-37.
- Grbich, C. (2012). *Qualitative data analysis: An introduction*: Sage.
- Gruescu, S. (2007). *Population ageing and economic growth: education policy and family policy in a model of endogenous growth*: Springer Science & Business Media.
- Henn, M., Weinstein, M., & Foard, N. (2005). *A short introduction to social research*: Sage.
- Hugo, G. (2000). Lansia—elderly people in Indonesia at the turn of the century. *Ageing in the Asia-Pacific region: Issues, policies and future trends*, 2, 299.
- Jones, G. W. (2016). Ageing in China, India and Indonesia: an Overview. In *Contemporary Demographic Transformations in China, India and Indonesia*. Springer, 325-328.
- Keasberry, I. N. (2001). Elder care and intergenerational relationships in rural Yogyakarta, Indonesia. *Ageing & Society*, 21(5), 641-665.
- Kreager, P. (2006). Migration, social structure and old-age support networks: a comparison of three Indonesian communities. *Ageing & Society*, 26(1), 37-60
- Kreager, P., & Schröder-Butterfill, E. (2007). Gaps in the family networks of older people in three Indonesian communities. *Journal of cross-cultural gerontology*, 22(1), 1-25.
- Kudrna, G., Le, T., & Piggott, J. (2021). Demographics, Labour Force, and Older People in Indonesia.
- Liamputong, P., & Ezzy, D. (2005). *Qualitative research methods. Second*: Melbourne: Oxford university press.
- Mason, A. (2007). *Demographic dividesnds: the past, the present, and the future*: na.
- Minichiello, V., Aroni, R., Timewell, E., & Alexander, L. (1995). In-depth interviewing. In: Sydney: Longman.
- Neuman, L. W. (2011). *Social research methods: qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Boston: Pearson.
- Niehof, A. (1995). Ageing and the elderly in Indonesia: identifying key issues. *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*(3de Afl), 422-437.
- Schröder-Butterfill, E. (2004). Inter-generational family support provided by older people in Indonesia. *Ageing and Society*, 24(4), 497.
- Schröder-Butterfill, E., & Fithry, T. S. (2014). Care dependence in old age: preferences, practices and implications in two Indonesian communities. *Ageing & Society*, 34(3), 361-387.
- Subiyono. (1999). *Formal and Informal Older Person Support in Urban and Rural Villages in Indonesia: A Case Study in Central Java and Bali Province*. (Dissertation). Tokyo: The University of Tokyo
- Suryadinata, L., Arifin, E. N., & Ananta, A. (2003). *Indonesia's population: Ethnicity and religion in a changing political landscape*: Institute of Southeast Asian Studies.
- Thristiawati, S. (2013). *Socio-cultural dimension of gendered wellbeing of older persons in Lampung, Indonesia*. (Dissertation Dissertation). The Australian National University, Canberra.
- Utomo, A., Mcdonald, P., Utomo, I., Cahyadi, N., & Sparrow, R. (2019). Social engagement and the elderly in rural Indonesia. *Social Science & Medicine*, 229, 22-31.
- Van Eeuwijk, P. (2006). Old-age vulnerability, ill-health and care support in urban areas of Indonesia. *Ageing & Society*, 26(1), 61-80.
- Wirakartakusumah, D., Nurdin, H., & Wongkaren, T. S. (1997). The role of Indonesian women in an ageing society. *Untapped Resources: Women in Ageing Societies Across Asia*. Times Academic Press, Singapore, 95-116.
- Witoelar, F. (2012). Household dynamics and living arrangements of the elderly in Indonesia: Evidence from a longitudinal survey. In *Aging in Asia: Findings from new and emerging data initiatives*: National Academies Press (US).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).